

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERISTIWA 1 OKTOBER 1965
(SUATU TINJAUAN POLITIK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Mikael Lipo

NIM : 011314025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERISTIWA 1 OKTOBER 1965

(SUATU TINJAUAN POLITIK)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Mikael Lipo

NIM : 011314025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

PERISTIWA 1 OKTOBER 1965

(SUATU TINJAUAN POLITIK)

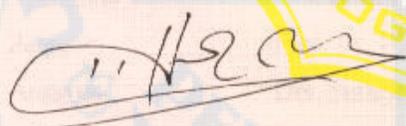
Oleh:

Mikael Lipo

NIM : 011314025

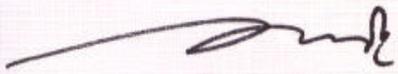
Telah disetujui oleh :

Pembimbing I


Prof. Dr. P.J. Soewarno, S.H.

Tanggal 2 Maret 2007

Pembimbing II


Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.S.Th

Tanggal 2 Maret 2007

SKRIPSI
PERISTIWA 1 OKTOBER 1965
(SUATU TINJAUAN POLITIK)

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

MIKAEL LIPO

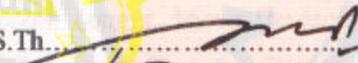
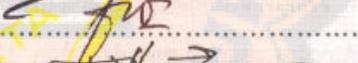
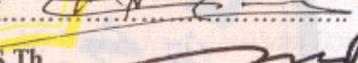
NIM : 011314025

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 10 Maret 2007
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.S.Th.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Prof. Dr. P.J. Soewarno, S.H.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.S.Th.	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	

Yogyakarta, 10 Maret 2007

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. Farsisius Sarkim, M. Ed., Ph. D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ~ *Yesus Kristus pelindung dan penyelamatku*
- ~ *Mama yang aku sayangi dan Papa (Alm) yang aku cintai, semoga papa damai bersamaNya di surga.*
- ~ *Kakak-kakakku: Litan, Litian, Lily, Amni alias Reos, Lina, Lisuan, Aili, Lipi dan semua keponakanku: A Chen, A Yen, A Chung, and adik, Wa_one, Ono, Juju, Wandu, Ling, Ulil, Dondong, Anjely, Nola, Jenny, Meyhua adik 1 dan adik 2, Ninda, Rama dan Dewa.*
- ~ *Zai Zai dan Hideaky Takizawa yang selalu mendukung dan memberiku semangat.*
- ~ *Teman-temanku di Colour Models Management, serta pelatih yang telah mengajarku cara berpenampilan yang baik dan bagaimana membawa diri sehingga aku menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi hidup.*
- ~ *Sahabat-sahabatku: Sr.Roberta, Indah, Longgi, Maria Derosari, Use-teen Babon (jangan ketawa teruss), Rumenda Simbolon, Simon Cungkring (fitness yang rajin ya biar sixpack), cah-cah pendidikan sejarah angkatan 01, makasih atas persahabatannya. My best Friend Abraham Bondan Aji W sang movieholic kapan nonton 21 lagi, terima kasih atas persahabatannya selama ini. Juga pujuk yang selalu mambantuku dalam menyelesaikan skripsi ini, "SEMANGAT".*
- ~ *Keluarga besar Pak Sugeng dan Bu Sugeng di Bantul, terima kasih atas bantuannya selama ini. Kalian adalah orang tua keduku, juga buat teman-teman KKN ku: Eko Harjono, Beni Alison, Ayu, Tien, Ernasari, Nyit-nyit dan Rina. Terima kasih atas kebersamaan kita yang penuh kenangan.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Kesabaran akan membuahkan hasil yang manis walau harus melalui jalan yang terjal dan berliku hingga akan indah pada akhirnya
(NN)

Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan impian-impian mereka
(Eleanor Roosevelt)

Memiliki cita-cita itu tidak bodoh, namun yang bodoh adalah tak memiliki cita-cita
(Cliff Clavin Cheers)

Hidup adalah sebuah pulau, karangnya harapan, pepohonannya mimpi, bunga-bunganya kesepian, mata airnya semangat. Dan ia di tengah lautan sendiri dan kesepian.
(Kahlil Gibran)

Perasaan yang membuat kita takut dan gemetar ketika melintas melalui hati kita merupakan hukum alam yang membimbing bulan mengelilingi bumi dan matahari mengelilingi Tuhan
(Kahlil Gibran)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 Maret 2007

Penulis



Mikael Lipo

ABSTRAK

Peristiwa 1 Oktober 1965 (Suatu Tinjauan Politik)

Oleh :

Mikael Lipo

NIM : 011314025

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965; kedua menganalisis peranan TNI-AD, PKI, CIA dan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965; dan ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari peristiwa 1 Oktober 1965 bagi Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dan ditulis secara deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidimensional yang meliputi pendekatan politis, sosiologis, ekonomi dan ideologi.

Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 yaitu karena adanya konflik intern di dalam tubuh Angkatan Darat, dan jatuh sakitnya Presiden Sukarno serta isu adanya Dewan Jendral yang akan melakukan kudeta yang didukung oleh CIA sehingga menimbulkan Peristiwa 1 Oktober 1965.

TNI-AD ikut terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965, sebab yang bertugas melakukan penculikan terhadap para jendral AD merupakan kesatuan-kesatuan gabungan batalyon-batalyon AD dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa. PKI juga terlibat karena tokoh-tokoh PKI seperti Aidit, Untung, Latief ikut berperanan dalam peristiwa tersebut. CIA diduga terlibat dalam peristiwa tersebut bekerjasama dengan salah satu klik di dalam tubuh AD dengan tujuan menghancurkan pengaruh komunis di Indonesia serta menjatuhkan Presiden Sukarno yang notabene mendukung PKI. Soeharto juga ikut berperanan dalam peristiwa tersebut karena sebelum peristiwa tersebut terjadi, dia sudah mengetahui rencana penculikan tersebut. Selain itu antara Soeharto dengan tokoh-tokoh kunci G 30 S sudah terjalin persahabatan jauh sebelum peristiwa itu terjadi.

Peristiwa 1 Oktober 1965 mempunyai dampak yang besar dalam bidang politik yaitu terbunuhnya enam jendral besar AD, pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI dan rakyat sipil hingga mencapai sekitar 2 juta orang pada tahun 1965, pembuangan tahanan politik ke pulau Buru tanpa proses pengadilan, jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno dan munculnya TNI-AD sebagai salah satu kekuatan politik yang baru. Dampak dalam bidang ekonomi yaitu semakin terpuruknya kondisi perekonomian bangsa Indonesia, dalam bidang ideologi yaitu hancurnya faham komunis di Indonesia serta semakin kokohnya ideologi Pancasila.

ABSTRACT

Incident 1th October 1965 (A Political Review)

By:

Mikael Lipo

011314025

This writing of thesis aimed: first, to describe and to analyze the background happen of incident 1th October 1965; second, to analyze the involvement the armed land force, PKI, CIA and Soeharto into incident 1th October 1965; and third, to description and analyze the impact of incident 1th October 1965 to Indonesian poeple.

The used method in this study was historical method, and written in descriptive-analytical way. The used approach were multidimensional approach covered political approaches, social approaches and economic approaches.

The result of this research showed that the background happen the incident 1 th October 1965 was because are conflict inside the armed land force and the sick of President Sukarno and issue general council in armed land force that will do the coup with support by CIA until bring up the incident 1th October 1965. The armed land force involvement inside incident 1 th October 1965, because are duty do the abduction the general of armed land force constitute fused the battalion of armed land force, involve the Cakrabirawa troops. PKI also involved because the shapes of PKI like as Aidit, Untung, Latief involved in this incident. CIA also involved joined with someone in armed land force with destination to destroying the communism influence in Indonesia and to go down President Sukarno and PKI. Soeharto involve in this incident because before this incident, he already knows the kidnapping plan from Latief. Besides between Soeharto and keyshapes of G 30 S friendship tied before this incident.

The incident 1th October 1965 have great impact in politic field are killed the six general in armed land force, the great killing to persons of PKI and civil poeple are amount about two million persons. Each other, political prisoners and persons estimate envolvment with PKI, cathhed and put into the jail and much persons trowing in Buru Island to a long time without the court and justice and fell might of president Sukarno replacement with Soeharto as president and bring up the armed land force as the new power politic in Indonesia. The economic impact is be hidden economic condition of Indonesia and ideology impact is destroyed the communism ideology and Pancasila more be strong.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan cintaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :“PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 (Suatu Tinjauan Politik)” dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan, pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. P.J. Suwarno, S.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sutardjo Adikusilo J.R. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Segenap Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sangat penulis hormati khususnya Dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi bekal pengetahuan dan membimbing selama kuliah.
7. Yang tercinta: Mama yang selalu memberiku cinta, semangat, dukungan dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya.
8. Kakak-kakakku: Litan, Litian, Lily, Amni alias Reos, Lina, Lisuan, Aili dan Lipi. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini, karena tanpa kakak penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan kuliah serta skripsi ini.
9. Keponakan-keponakanku: A Chen, A Yen, A Chung dan adik, Wawan, Nono, Juju, Ulil, Dondong, Wandu, Ling, Anjeli, Nola, Meyhua dan adik 1 dan 2, Ninda, Rama dan Dewa. Kalian adalah sumber semangatku.
10. My best friend: Bondan, Pujex, Sr. Roberta, Indah, Rumenda Simbolon, Acu, Maria Derosari, teman-teman Cosmic, Alpian, Rano, dan Beni Lico.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 10 Maret 2007

Penulis

Mikael Lipo

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

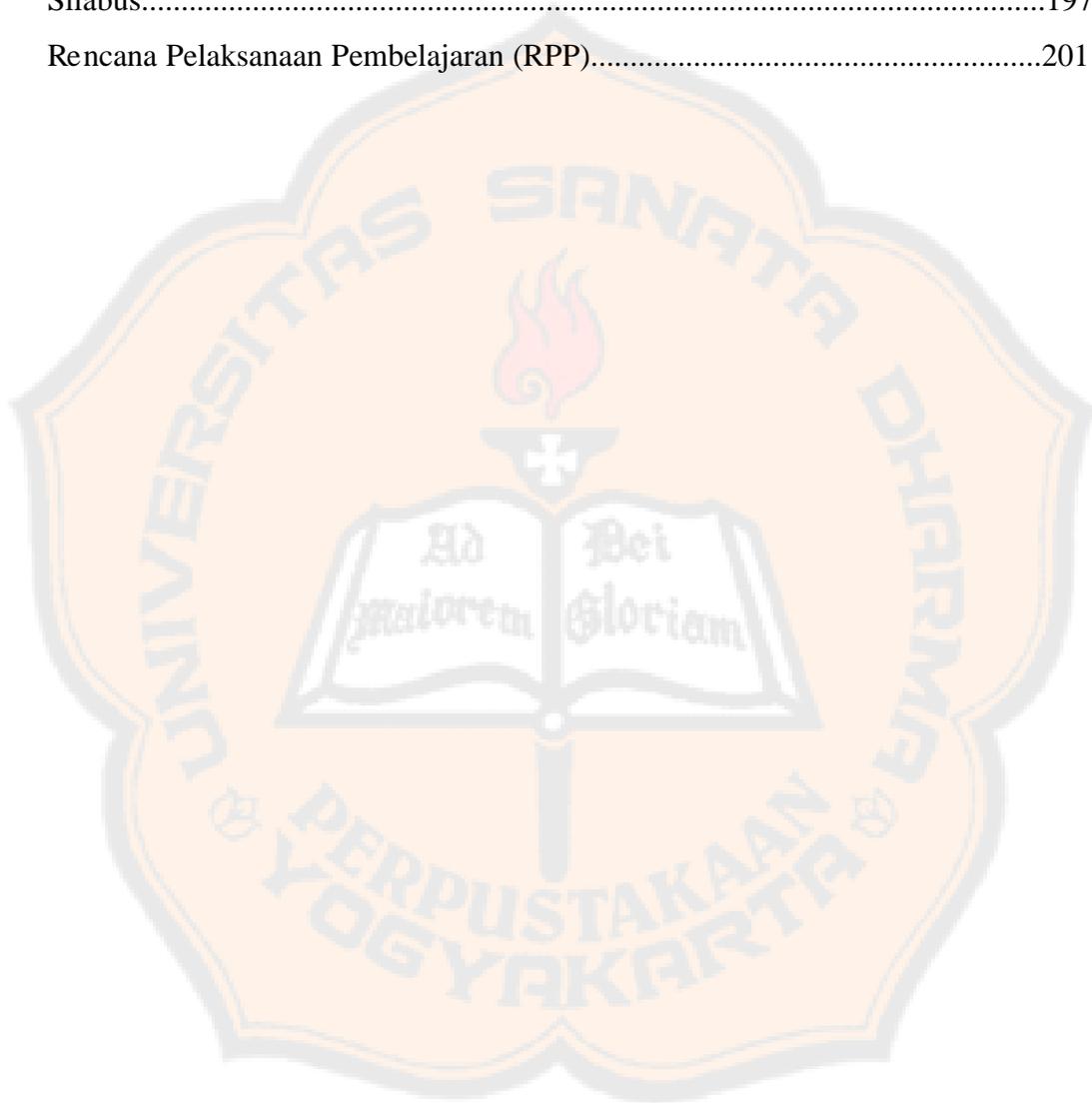
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Landasan Teori	20
F. Hipotesis	37
G. Metode dan Pendekatan	40
H. Sistematika Penulisan	50
BAB II. LATAR BELAKANG TERJADINYA PERISTIWA 1 OKTOBER 1965.....	51
A. Latar Belakang Politik	51
1. Muncul Dan Berkembangnya PKI	51
2. PKI Pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959.....	59
3. PKI Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966	64
4. Situasi Politik Indonesia Menjelang Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965.....	73

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Latar Belakang Sosial Ekonomi	76
C. Latar Belakang Ideologi.....	84
BAB III. KETERLIBATAN TNI-AD,CIA,PKI DAN SOEHARTO DALAM	
PERISTIWA 1 OKTOBER 1965.....	87
A.TNI-AD Penghalang Utama PKI	87
B.Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa 1 Oktober 1965	94
C.Keterlibatan TNI-AD Dalam Peristiwa 1 Oktober 1965	102
D.Keterlibatan CIA Dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.....	109
E.Keterlibatan Soeharto Dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.....	120
BAB IV. DAMPAK PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 BAGI RAKYAT	
INDONESIA.....	129
A. Dampak Politik Peristiwa 1 Oktober 1965.....	129
1.Munculnya Tritura dan Supersemar	129
2.Pembantaian Massal Terhadap Orang-Orang PKI Tahun	
1965.....	140
3.Pembuangan Tahanan Politik Ke Pulau Buru.....	146
4.Jatuhnya Kekuasaan Presiden Sukarno Dan Naiknya Soeharto Sebagai	
Presiden ke-2 RI.....	148
B. Dampak Sosial Peristiwa 1 Oktober 1965.....	156
C. Dampak Ekonomi Peristiwa 1 Oktober 1965.....	158
D. Dampak Ideologi Peristiwa 1 Oktober 1965.....	162
BAB V. PENUTUP.....	165
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN.....	174
Surat Perintah Sebelas Maret.....	174
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.....	175
Dekrit No.1 Tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia.....	176
Keputusan No.1 Tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia.....	177
Keputusan No.2 Tentang Penurunan Dan Peningkatan Pangkat.....	181

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

The Gilchris Document.....	182
Terjemahan Dokumen Gilchris.....	183
Gambar-gambar.....	184
Silabus.....	197
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).....	201



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristiwa 1 Oktober 1965 perlu diteliti kembali guna mendapatkan informasi-informasi sejarah yang benar, di mana sekarang bermunculan fakta-fakta sejarah baru setelah hampir 40 tahun terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 dan pergantian pemerintahan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul fakta-fakta baru yang diungkapkan para pelaku sejarah dan diharapkan dapat membantu pengajaran sejarah yang benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi sesungguhnya, karena pengajaran sejarah mengandung suatu proses sosialisasi nilai-nilai yang harus diwariskan kepada anak didik. Dan dengan mempelajari sejarah yang benar, maka nilai sejarah masa lampau tersebut dapat dijadikan motivasi bagi diri anak didik itu sendiri.

Yang penulis maksudkan dengan Peristiwa 1 Oktober 1965 di sini adalah peristiwa penculikan yang disertai pembunuhan terhadap enam jenderal besar angkatan darat oleh gerakan yang menamakan dirinya dengan Gerakan Tiga Puluh September atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah G30S. Alasan penulis menyebut gerakan tiga puluh September sebagai Peristiwa 1 Oktober 1965 sebagai judul yaitu karena peristiwa penculikan yang disertai pembunuhan terhadap enam jenderal besar AD tersebut terjadi pada tanggal 30 September subuh, jadi rentang waktu tersebut sudah termasuk dalam tanggal 1 Oktober 1965 subuh, sedangkan sejarah sendiri sangat terkait erat atau dibatasi oleh ruang dan waktu, yang dalam hal ini adalah waktu.

Jadi yang penulis maksud dengan judul Peristiwa 1 Oktober 1965 di sini tak lain adalah peristiwa Gerakan Tiga Puluh September 1965 yang terjadi di Jakarta, tentunya dengan berbagai sumber baru dan beberapa pandangan dan pendapat yang baru pula yang berbeda dengan pandangan yang ada selama ini. Oleh karena itulah penulis selanjutnya dalam penulisan skripsi ini menggunakan istilah Peristiwa 1 Oktober 1965.

Membahas Peristiwa 1 Oktober 1965, maka tidak terlepas dari keterlibatan PKI, TNI-AD Suharto dan CIA yang kala itu mewarnai percaturan politik dan Peristiwa 1 Oktober 1965 itu telah membawa dampak serta perubahan yang besar pada tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, yang pada hakekatnya juga terkait erat dengan peristiwa tersebut. Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut merupakan suatu peristiwa yang kompleks, di mana terdapat berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Peristiwa yang terjadi di Jakarta 1 Oktober 1965 ini telah merenggut nyawa enam jendral AD dan satu perwira menengah. Peristiwa ini dipimpin oleh letkol Untung dengan melibatkan kesatuan-kesatuan di dalam Angkatan Darat serta pasukan Cakrabirawa yang merupakan pasukan pengawal presiden. Selain keterlibatan tokoh-tokoh PKI di dalam peristiwa ini, TNI-AD juga diduga terlibat terutama Mayjen Soeharto.¹

Sejak tahun 1945-1965, Soeharto sudah mengakrabkan diri dengan orang-orang yang berfahaman komunis seperti Untung dan A.Latief, meskipun persahabatan akan segera diputuskan oleh Soeharto apabila situasi dan kondisi tidak menguntungkan dirinya. Soeharto memanfaatkan persahabatan antara

¹ Suwarno,P.J.Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966, USD, Yogyakarta, 2004, hlm.71 - 71

Untung dan Latief untuk dapat membantu dirinya dalam pemberontakan. Sifat Soeharto yang praktis tersebut ternyata menguntungkan untuk menghadapi situasi yang cepat berubah. Terakhir tampak pada Latief, Untung, dan Supardjo pada tanggal 30 September pukul 23.00 masih merencanakan akan bertemu Soeharto, meskipun yang jadi bertemu hanya Latief sendiri. Namun pada tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto menuduh Untung dan kawan-kawan mengadakan pemberontakan dengan menculik para jenderal dan berusaha membunuh presiden. Walaupun rencana untuk membunuh Presiden Sukarno gagal dilakukan.²

Melihat situasi ini, Soeharto berusaha untuk menghancurkan Untung dan bersikap pura-pura melindungi presiden dan keselamatan RI dari pemberontakan yang dipimpin oleh Untung dengan dukungan PKI. Dengan keadaan seperti ini, Soeharto dapat menempatkan diri sebagai pembela para jenderal yang diculik dan penyelamat negara dari pemberontakan. Soeharto menuduh Untung yang melakukan pemberontakan itu dengan dukungan PKI.³ Keterlibatan PKI seperti yang dituduhkan oleh Soeharto melakukan pemberontakan, Soeharto hanya ingin merebut kekuasaan dari tangan Sukarno dan PKI. Perkembangan selanjutnya tampak bahwa Soeharto menginginkan kedudukan presiden. Soeharto menggunakan PKI karena pada waktu itu PKI dekat dengan Sukarno. Lambat laun tuduhan terhadap PKI dapat meyakinkan seluruh rakyat dan militer bahwa PKI melakukan pemberontakan itu.⁴

Selanjutnya Soeharto meneruskan perjuangan untuk merebut kedudukan Mayjen. Pranoto Reksosamodro sebagai *care taker* dengan alasan seolah-olah terjadi dualisme dalam kepemimpinan Angkatan Darat. Presiden terpaksa

² *Ibid*, hlm. 87-88

³ *Ibid*, hlm. 89

⁴ *Ibid*, hlm. 90

menghentikan Mayjen. Pranoto Reksosamodro karena Nasution menemukan surat Latief yang ditujukan kepadanya. selanjutnya presiden mengangkat Soeharto menjadi Panglima Angkatan Darat. Dengan kedudukan yang dimilikinya, Soeharto memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bertindak membuktikan tuduhan terhadap PKI yang diambil dari Yoga Sugomo bahwa PKI lah yang berada di belakang Untung sebagai pemimpin gerakan penculikan tersebut.⁵

PKI sudah berdiri sejak Desember 1920 dan dinyatakan sebagai partai yang terlarang karena menganut paham komunis pada tahun 1948. Kemampuan bertahannya PKI sebagai sebuah partai di Indonesia selama empat puluh enam tahun merupakan suatu prestasi tersendiri mengingat selama dalam masa kurun waktu tersebut, PKI mengalami masa pasang surut dan jatuh bangun. Namun PKI mampu menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu partai besar pada waktu serta usaha-usaha yang dilakukan oleh PKI yang hampir saja merobohkan ideologi Pancasila serta merebut kekuasaan RI dalam setiap aksi yang dilancarkannya yang kemudian diduga berpuncak pada meletusnya Gerakan 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan sebutan G 30 S.⁶

PKI memiliki sifat yang berbeda dengan partai lainnya. PKI lebih cenderung mewujudkan cita-citanya dengan cara menghancurkan masyarakat lama melalui revolusi. Hal ini dikarenakan PKI memakai azas Marxis hasil penafsiran dari Lenin (Marxisme–Leninisme) yang lebih dikenal dengan komunisme. Keberadaan partai komunis Indonesia senantiasa dianggap sebagai ancaman yang sangat potensial yang sewaktu-waktu dapat saja melakukan

⁵ *Ibid*, hlm. 95

⁶ Pinardi, *Lihat Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948 di Madiun*, Inkopak Hazera, Jakarta, hlm.16

pemberontakan untuk merebut kekuasaan dari pemegang kekuasaan yang sah di Indonesia. Pada tahun 1948, PKI kembali bangkit dan melancarkan aksinya kembali dalam pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Namun pemberontakan kali ini dapat dihentikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁷

Partai Komunis Indonesia (PKI) menganut faham Marxisme yang datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I melalui seorang pemimpin buruh dari negeri Belanda bernama H.J.F.M Sneeveliet. Ia adalah anggota *Social Democratische Arbeiders Partij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosial-Demokrat.⁸ Faham Marxisme ini mempunyai sifat revolusioner yang telah dibuktikan dengan berbagai peristiwa seperti peristiwa pada saat Lenin berhasil menggulingkan kekuasaan *Tsar* yang lalim dan Lenin beserta kelompoknya hendak mendirikan negara Rusia baru yang sosialis. Dalam perkembangannya, revolusi di Rusia ini menjadi “ilham” bagi kaum yang tertindas.⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, dan dengan didukung oleh organisasi yang rapi dan disiplin kader yang tinggi, PKI menjadi partai yang besar. Perkembangan partai ini yang begitu pesat merupakan ancaman tersendiri bagi Tentara Nasional Indonesia, terutama karena faham komunis yang dianutnya. Dalam mempersiapkan kader-kadernya, PKI memperkuat diri dengan semakin memperkokoh basis dukungannya, di antaranya dengan mempersiapkan Pemuda Rakyat, Gerwani, dan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang akan dijadikan basis

⁷ *Ibid*, hlm.vii

⁸ Sartono Kartodirjo, dkk, *Sejarah Nasional* Jilid V, Depdikbud, Jakarta, 1975, hlm. 202 – 203

⁹ *Ibid*, hlm 204

kekuatannya. Organisasi-organisasi tersebut dipersenjatai dan dilatih berperang. Pembentukan kader dengan cara dipersenjatai ini juga dijadikan alasan oleh PKI sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Maka keluar usul dari PKI untuk membentuk Angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh tani.¹⁰ Gagasan pembentukan Angkatan kelima tersebut sebenarnya merupakan strategi PKI untuk menggalang kekuatan militer.

Menanggapi usul pembentukan Angkatan Kelima, Sukarno mempunyai perhitungan tersendiri. Di samping dengan memperhitungkan jumlah pasukan PKI yang besar dan sifatnya yang revolusioner sangatlah disenangi Sukarno. Konsep pembentukan itu di samping TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL dan POLRI, atas usulan Aidit rupanya cukup menarik perhatian Sukarno. Dalam beberapa kali sidang kabinet, gagasan itu dilontarkan sendiri oleh Sukarno, namun mendapat tentangan keras dari TNI-AD. Letjend. Achmad Yani yang paling gigih menentang gagasan pembentukan tersebut.

Melihat sikap tegas dan keras dari kalangan TNI-AD, Sukarno nampaknya mulai memperhitungkan kekuatan massa PKI sebagai tandingan apabila terjadi pembangkangan dari TNI-AD terhadap garis politiknya. Selain itu, Presiden Sukarno juga mulai melihat kemungkinan angkatan lainnya yang bisa menjadi tandingan kekuatan militer terhadap intervensi politik TNI-AD yang mulai berani menentangnya, yaitu dengan jalan mengistimewakan AURI dan KKO AL sebagai pasukan pendukungnya yang nampak setia mengikuti garis kebijaksanaan presiden.¹¹

¹⁰ Todiruan Dydo, *op. cit.*, hlm. 74

¹¹ *Ibid.*, hlm. 75

Adanya indikasi bahwa Sukarno mulai memihak kepada PKI tentu saja tidak disia-siakan oleh PKI untuk semakin menjauhkan kredibilitas para pimpinan TNI-AD di mata presiden. Dalam situasi demikian, PKI terus menerus menghimpun kekuatan kontra ditubuh kalangan tentara sendiri. Satu-satunya yang sangat mungkin dipengaruhi adalah Pasukan Pengawal Presiden yaitu Cakrabirawa. Letkol. Untung sebagai Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa dibina secara intensif sebagai kader PKI yang pada waktunya nanti akan diberi peran penting.¹²

Kekuatan militer pun terus digalang dan latihan pertahanan militer pun dilaksanakan secara intensif dengan alasan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Adapun daerah untuk melaksanakan latihan para kader PKI tersebut adalah daerah Lubang Buaya. Peluang PKI untuk menancapkan pengaruhnya semakin terbuka lebar ketika Sukarno mengusulkan Nasakom dan rencana pembentukan Kabinet Berkaki Empat, yaitu kabinet yang di dalamnya duduk semua unsur politik Islam, Nasionalis, Sosialis, dan Komunis, telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kaum komunis akan dapat memanfaatkan Nasakom sebagai “Front Bersatu” untuk merebut kekuasaan. Bagi PKI, Nasakom merupakan sarana yang menguntungkan karena menganggap Nasakom merupakan bentuk keseimbangan antara nasionalis, agamis, dan komunis pada tingkat eksekutif pemerintahan dan dewan-dewan perwakilan, sedangkan angkatan bersenjata hanya melihat sebagai bentuk kerja sama dalam semangatnya yang umum berkaitan dengan jalannya urusan negara.¹³

Keberpihakan Sukarno pada PKI semakin melicinkan ruang gerak PKI. Demi memberi kemudahan pada PKI, Sukarno telah mencoba mengganti A.H.

¹² *Ibid*, hlm. 10

Nasution dengan A. Yani sebagai kepala Staf Angkatan Darat, dengan alasan Ahmad Yani lebih mudah untuk dikendalikan. Sukarno semakin yakin bahwa PKI yang revolusioner akan mampu menjadi kekuatan untuk mendukung kelangsungan kekuasaannya. Keunggulan yang dimiliki oleh PKI membuat partai ini semakin disenangi oleh Sukarno yang membutuhkan dukungan untuk menghadapi Angkatan Darat. PKI ternyata mampu mengikat Sukarno karena beliau memegang kekuasaan besar, maka sebagai akibatnya hubungan PKI dengan Sukarno semakin dekat sehingga partai ini semakin berani melakukan berbagai aksi menghadapi keadaan yang dianggap menguntungkan dan menyingkirkan berbagai organisasi yang dianggap musuhnya.¹⁴

Dengan keberpihakannya pada PKI, membuat hubungan antara Sukarno dengan TNI-AD menjadi tidak harmonis. Sukarno menganggap TNI-AD sebagai “penghalang” dalam mencapai tujuan politiknya. Kondisi yang seperti inilah yang diharapkan oleh PKI. PKI semakin merasa di atas angin dan semakin terdorong terutama pada saat Presiden Sukarno mengucapkan pidato pada tanggal 17 Agustus 1964, yang berjudul *Vivere Periculoso* yang artinya tahun yang menyerempet-nyerempet bahaya. Maksudnya adalah bahwa pada waktu ini bangsa Indonesia sedang diancam bahaya yaitu rongrongan bangsa-bangsa yang dianggap nekolim oleh Sukarno. Di utara ada Malaysia sedangkan di selatan ada Australia yang dianggap sebagai bangsa yang nekolim. Berdasarkan hal tersebutlah, Sukarno menyebut tahun tersebut sebagai tahun yang menyerempet bahaya.¹⁵

¹³ Legge, J.D. (ed), “*Sukarno A Political Biography*”, Diterjemahkan : *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 400

¹⁴ G. Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20* Jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 136

¹⁵ Nugroho Notokusanto, *Tercapainya Konsensus Nasional*, Balai Pustaka, Jakarta, 1969, hlm. 10

PKI sendiri telah menyusun rencana yang rapi dalam usahanya untuk menghancurkan TNI-AD yang dipandang sebagai saingan tangguh yang dapat menghalangi tujuan politiknya. PKI melancarkan kampanye untuk menguasai pendapat rakyat dengan memutar-balikkan fakta-fakta. Yang mencoba-coba menghalanginya dituntut untuk *diretool* atau ditangkap setelah diganyang habis-habisan dengan suatu kampanye pers dan kampanye demonstrasi. Keadaan ekonomi yang buruk pada waktu itu, digunakan oleh PKI untuk propagandanya membangun masyarakat adil dan makmur. Dokumen PKI yang akan mengadakan kudeta dan dengan segala persiapannya, disiarkan oleh Partai Murba pada bulan April 1965. Namun, PKI berhasil mendiamkan persoalan ini dengan menyatakan bahwa dokumen itu palsu. Sebaliknya, untuk cuci tangan, PKI menyerang Murba habis-habisan.¹⁶

PKI terus melakukan *build-up* terutama di kalangan ormas-ormasnya serta simpatisan-simpatisannya. Media yang digunakan, yaitu melalui media massa ataupun radio. *Build-up* ini semakin gencar dilaksanakan terutama pada bulan Agustus 1965. Dengan adanya *build-up* ini, semakin memberikan keyakinan kepada kader ormas-ormasnya serta simpatisan PKI akan tujuan revolusi yang akan dicapai. Usaha-usaha *build-up* ini semakin memicu pertentangan antara PKI dengan TNI-AD.¹⁷

Dalam keadaan tegang diliputi pertentangan politik antara PKI dengan TNI-AD, terdengar berita bahwa Presiden Sukarno jatuh sakit. Setelah didapat kepastian dari hasil diagnosa tim ahli para dokter dari RRC yang ditemui D.N.

¹⁶ William H. Frederick, *op. cit*, hlm. 399 - 400

¹⁷ *Ibid*, hlm.41

Aidit, diketahui bahwa karena penyakitnya sangat parah, maka tidak lama lagi Sukarno akan meninggal. Padahal satu-satunya tempat berlindung PKI hanyalah tinggal pada Presiden Sukarno. Maka, jika Sukarno meninggal sudah dapat dibayangkan bahwa TNI-AD akan mengganyang PKI habis-habisan.¹⁸ D.N. Aidit sebagai pemimpin berusaha meyakinkan ormas-ormasnya dalam menanggapi informasi tersebut. Maka dengan kelicikannya ia berusaha meyakinkan CC PKI dengan cara menyebarkan informasi palsu bahwa “Dewan Jenderal” akan melakukan kudeta. Suhu politik pada tahun 1965 ini semakin naik terutama setelah munculnya berbagai isu politik, seperti *Dokumen Gilchrist*, lalu disusul dengan isu adanya sekelompok TNI-AD yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang akan merebut kekuasaan negara dari pemerintah.¹⁹

Menanggapi situasi itu, maka D.N. Aidit mengundang para pemimpin partai untuk berembuk. Ia mengemukakan bahwa ada dokumen Gilchrist yang ditemukan oleh para Pemuda Rakyat ketika sedang berdemonstrasi di Kedutaan Inggris, di mana isi dari dokumen itu adalah rincian dari rencana kudeta yang akan dilakukan oleh TNI-AD yang bertepatan dengan peringatan Hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1965. Hasil dari pertemuan tersebut adalah bahwa sebelum kudeta itu terjadi, PKI harus bertindak terlebih dahulu yaitu dengan menculik para jenderal yang menurut dokumen tersebut bahwa jenderal-jenderal tersebut tergabung dalam “Dewan Jenderal” yang akan melakukan kudeta.²⁰

Gerakan 30 September didukung oleh personel yang terdiri dari satuan-satuan militer Batalyon I Resimen Cakrabirawa, Batalyon 454 Divisi Diponegoro, Batalyon 530 Divisi Brawijaya, Pasukan Gerak Cepat AURI, dan Brigade

¹⁸ Todiruan Dydo, *op. cit.*, hlm. 77 - 78

¹⁹ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik*, Haji Massagung, Jakarta, 1989, hlm. 35

²⁰ Depdikbud, *Gerakan 30 September PKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1994, hlm. 62

Infanteri I Jakarta Raya. Pasukan-pasukan tersebut bergabung dalam satu unit kesatuan yang diberi nama Pasukan Pasopati, yang dibagi dalam tujuh pasukan yang masing-masing pasukan menculik satu jenderal. Pasukan yang diberi nama Pasopati itu berkumpul di Lubang Buaya pada pukul 02.30 pagi tanggal 1 Oktober, dan masing-masing pasukan mulai bergerak pada pukul 03.00 dini hari. Pasukan-pasukan ini berpakaian PDLT dan memakai baret merah Cakrabirawa, yang merupakan Pasukan Pengawal Presiden Sukarno. Ini hanyalah siasat gerakan tersebut agar para jenderal yang diculik tidak menaruh curiga akan kedatangan mereka. Alasan yang digunakan adalah bahwa sang jenderal dipanggil mendadak oleh Presiden Sukarno, karena saat itu keadaan negara sedang genting. Akhirnya, tragedi penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal besar TNI-AD inipun terjadi, dan jenazah para jenderal ini dibuang ke dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya.²¹

Dugaan bahwa Soeharto terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 cukup kuat karena melihat kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh sentral pelaku Peristiwa 1 Oktober 1965 bahkan hingga menjelang terjadinya peristiwa itu. Alasan lain yang memperkuat dugaan bahwa Soeharto terlibat dalam penculikan itu ialah kedongkolan Soeharto pada sebagian jendral tersebut sehubungan dengan kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Soeharto sewaktu di Jawa Tengah. Kasus itu diselidiki oleh Jend. Ahmad Yani, S. Parman, M.T. Haryono dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo yang diketuai oleh Mayjen Suprpto. Jenderal-jenderal itu semua kemudian menjadi korban dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.²²

²¹ *Ibid*, hlm 45

²² P.J. Suwarno, *Gerakan Politik tentara Nasional Indonesia*, Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004, hlm. 76

Meskipun coup yang dilakukan Gerakan Tiga Puluh September yang dipimpin oleh Letkol Untung ini berhasil menculik dan membunuh jenderal jenderal besar TNI-AD, namun usaha kudeta ini dikatakan gagal. Dalam waktu singkat, gerakan ini dapat dihancurkan dan ditumpas oleh kekuatan-kekuatan TNI-AD di bawah pimpinan Soeharto.²³ Dalam keadaan politik yang tidak stabil akibat terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, muncullah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI yang kemudian dikenal dengan Tritura. Ketika sidang “Kabinet Seratus Menteri” sedang berlangsung, muncul banyak tentara yang tidak dikenali identitasnya bergerak menuju Istana, mengakibatkan Presiden Sukarno pergi dengan terburu-buru menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter.

Sesungguhnya tentara yang tidak dikenali tersebut adalah tentara RPKAD dan Kostrad yang bergerak di bawah komando Soeharto untuk secara tidak langsung mengancam Sukarno yang sedang memimpin sidang kabinet seratus menteri di istana. Pasukan ini sengaja melepas tanda identitas agar tidak dikenali orang. Pasukan RPKAD dan Kostrad ini dipimpin oleh Kemal Idris di bawah komando Soeharto, sedangkan Soeharto sendiri pada hari tersebut tidak menghadiri sidang kabinet tersebut.²⁴

Untuk mengatasi situasi negara yang genting, Soeharto mengutus tiga jenderal, yaitu M. Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rahmad menghadap ke Istana Bogor yang pada akhirnya menghasilkan Supersemar yaitu suatu surat perintah dari Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk memulihkan kondisi keamanan yang genting kala itu, agar situasi kembali stabil di tangan

²³ G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 142

²⁴ P.J. Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia, op.cit.*, hlm. 56

Soeharto. Mengenai penyerahan Supersemar ini, sampai sekarang masih menjadi perdebatan karena banyak fakta-fakta baru bermunculan yang bertolak belakang dengan versi pemerintah Orde Baru. Kontroversi ini akan dibahas pada bab berikutnya.

Pada tanggal 12 Maret 1966, di luar perhitungan Presiden Sukarno, ternyata langkah awal yang diambil Soeharto dalam rangka pengamanan dan penertiban tidak lain dengan berbekal Supersemar digunakan untuk membubarkan PKI. Dengan kejelian Soeharto, maka secara perlahan dan hati-hati mulai menghimpun kekuatan dan membentuk citra dirinya (*image building*) di mata masyarakat luas bahwa ia mampu menjadi penegak kebenaran.²⁵

Maka dengan terjadinya tragedi berdarah tanggal 30 September 1965 semakin kuatlah tuduhan yang ditudingkan oleh Soeharto terhadap PKI. Citra Soeharto yang baik serta dianggap pahlawan di mata rakyat membuat rakyat menaruh simpati dan mempercayai kata-kata Soeharto. Selanjutnya, muncullah gerakan-gerakan menentang PKI, seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang mengeluarkan tiga tuntutan yang dikenal dengan Tritura. Peristiwa tersebut menyebabkan menurunnya wibawa Sukarno dan semakin kuatnya pengaruh Soeharto. Peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya Sukarno dengan orde lamanya dan digantikan oleh Soeharto dengan Orde Barunya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dalam skripsi yang berjudul “Peristiwa 1 Oktober 1965” (Suatu Tinjauan Politik), penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

²⁵ *Ibid*, hlm. 88 - 89

1. Apa latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 ?
2. Bagaimana keterlibatan TNI-AD, CIA, PKI dan Soeharto pada Peristiwa 1 Oktober 1965 ?
3. Apa dampak Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan ideologi Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

- a. Latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965
- b. Keterlibatan TNI-AD, CIA, PKI dan Soeharto pada Peristiwa 1 Oktober 1965
- c. Dampak dari Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ideologi Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan khususnya karya ilmiah dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain dalam melakukan penulisan skripsinya tentang peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia.

b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sejarah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan tentang sejarah Indonesia, yaitu Peristiwa 1 Oktober 1965.

c. Bagi Peneliti / Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan selama di bangku kuliah ke dalam praktek dunia nyata sekaligus untuk menambah pengetahuan tentang Peristiwa 1 Oktober 1965.

d. Bagi dunia pendidikan

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan bahan pengajaran di sekolah pada umumnya sehingga dapat menambah pengetahuan siswa tentang sejarah Indonesia.

e. Bagi pembaca sekalian

Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Peristiwa 1 Oktober 1965, dan khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa dapat berperan bagi penanaman sikap nasionalisme dan patriotisme.

f. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan perbandingan apabila ada penelitian yang sama pada waktu yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau dengan alat mekanis atau selanjutnya secara singkat disebut saksi pandang mata.²⁶

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber primer merupakan

²⁶ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 35

sumber yang didapat secara langsung oleh orang pertama atau seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang terjadi.

Buku yang digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah buku *Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*, yang ditulis berdasarkan hasil wawancara oleh Surya Lesmana dan diterbitkan oleh Media Pressindo pada tahun 2005. Buku ini berisi pengakuan langsung dari para pelaku Gerakan 30 September yang masih hidup selama wawancara itu dilakukan oleh penulis buku selama penulisan buku ini. Mereka mengungkapkan kesaksiannya masing-masing tentang Peristiwa 1 Oktober 1965. Selain pengakuan yang disampaikan oleh pelaku Gerakan 30 September, saksi-saksi lain yang melihat kejadian tersebut secara langsung juga menyampaikan pengakuannya.

Selain itu, sumber primer yang lain yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku *Siapa Sebenarnya Soeharto Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, ditulis oleh Eros Djarot dkk berdasarkan hasil wawancara dengan saksi sejarah dan dokumen Detak Files, diterbitkan oleh Media Kita, Jakarta, tahun 2006. Buku ini mengungkap fakta-fakta baru di seputar Peristiwa 1 Oktober 1965 termasuk di dalamnya diungkapkan peran dan pembangkangan Soeharto berdasarkan kesaksian-kesaksian para pelaku yang terbungkam selama orde baru berkuasa.

Selain itu juga diungkapkan tentang kedekatan Soeharto dengan para pelaku, Soeharto, CIA dan avonturisme Aidit, dan termasuk pula di dalam buku ini berisi wawancara dengan para pelaku dan saksi sejarah G-30-S/PKI seperti

wawancara dengan Mayjen Purn.Tahir (sekarang berusia 87 tahun), Mayor TNI Soekarbi (sekarang berusia 80 tahun), Anton Ngenget (mantan agen rahasia RI-CIA-KGB), Dayno (pendiri kelompok Pathuk dan mantan anggota Dewan PSI) yang menguraikan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut serta kedekatan Soeharto dengan Syam Kamaruzaman. Selain itu juga diuraikan tentang konflik internal Soeharto dan AD serta keterlibatan Amerika dalam peristiwa tersebut.

Selain sumber primer di atas, ada juga sumber lain atau sumber sekunder yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder menurut Louis Gottschalk, merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh dari orang kedua yaitu orang yang memperoleh berita dari sumber primer. Jadi bukan dari tangan pertama atau disebut sumber primer lain yang tidak sejamin dengan peristiwa atau sumber yang diperoleh dari seseorang yang tidak langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi.

Buku-buku tersebut adalah buku karangan Benedict R.O.G. Anderson dan Ruth McVey yang berjudul *Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Analisis Awal*. Buku ini diterbitkan oleh LKPSM Syarikat Jakarta. Buku ini digunakan dalam penelitian ini karena isinya membahas secara spesifik tentang peristiwa 1 Oktober 1965. Pembahasan dalam buku ini lebih detail dan terperinci. Didalam buku ini diuraikan analisis-analisis tentang latar belakang terjadinya kudeta 1 Oktober 1965. Pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965 serta bagaimana peristiwa kudeta itu terjadi.

Selanjutnya buku *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G30S/PKI*, buku ini ditulis oleh Todiruan Dydo dan diterbitkan oleh Golden Terayon Press Jakarta 1989. Buku ini menguraikan tentang perjuangan TNI, timbulnya pemberontakan-pemberontakan terutama oleh PKI, meletusnya Gerakan 30 September hingga penumpasannya. Juga diuraikan tentang proses kejatuhan Sukarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden ke-2 Republik Indonesia.

Buku *Bung Karno Menggugat dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 1965 Hingga G30S*, yang ditulis oleh Dr. Baskara T. Wardaya SJ dan diterbitkan oleh Galangpress Yogyakarta 2006. Buku ini menguraikan tentang tragedi '65 dalam perspektif yang lebih luas khususnya berkaitan dengan hidup dan perjuangan Bung Karno. Buku ini juga menguraikan tentang pembunuhan massal atas nama penumpasan pemberontakan PKI yang dikaitkan dengan peristiwa 1 Oktober 1965 dimana ratusan ribu orang dibantai tanpa proses pengadilan. Buku ini juga dilengkapi dengan dokumen rahasia Dubes AS Marshall Green, 1 oktober 1965 dan memorandum CIA, 6 Oktober 1965. Buku *Fakta dan Latar Belakang G 30 S*

Buku, ditulis oleh Boerhan Soebekti dan diterbitkan oleh Semarang Sala, Semarang 1966. Buku ini menguraikan tentang percobaan kudeta 1965 termasuk persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Dalam buku ini terdapat pula pengakuan Njono sebagai pihak yang terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 serta keterlibatan Aidit.

Buku *Fakta-fakta Persoalan Sekitar G 30 S*, yang ditulis dan diterbitkan oleh Pusat Penerbangan Angkatan Darat, Jakarta 1965. Buku ini menguraikan tentang fakta-fakta sekitar Peristiwa 1 Oktober 1965, dari persiapan, pelaksanaan gerakan menculik enam jenderal angkatan darat hingga penumpasan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia*, buku ini ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh dan diterbitkan oleh PT. Intermasa, Jakarta 1989. Buku ini berisi tentang kisah seputar kejadian G 30 S di Jakarta, Jawa Tengah hingga Lahirnya Orde Baru. Buku ini lebih detail membahas tentang Peristiwa 1 Oktober 1965 karena selain membahas yang terjadi di pusat, juga membahas peristiwa yang sama yang terjadi di Jawa Tengah.

Berikutnya buku *Ledakan Fitnah Subversi G 30 S*, ditulis oleh Dharmawan Tjondronegoro dan diterbitkan oleh PT. Matoa Jakarta 1966. Buku ini menguraikan tentang seputar Peristiwa 1 Oktober 1965 yang mencakup serangan dan taktik PKI serta tindakan dan reaksi dari ABRI khususnya TNI-AD dalam mengatasi peristiwa tersebut. Selanjutnya buku *40 Hari Kegagalan G 30 S 1 Oktober – 10 November 1965*, yang ditulis dan diterbitkan oleh Staf Pertahanan Keamanan Lembaga Sejarah, Jakarta 1966. Buku ini menguraikan tentang persiapan yang dilakukan oleh pelaku Peristiwa 1 Oktober 1965 hingga berhasil digagalkan oleh TNI-AD. Yang terakhir yaitu buku *Pengkhianatan G 30 S/PKI* yang ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1986. Buku ini menguraikan tentang rencana dan pelaksanaan G 30 S hingga penumpasan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat. Selain itu juga ditulis juga tentang kronologi terjadinya peristiwa tersebut.

E. Landasan Teori

Yang dimaksud dengan teori di sini adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang telah diakui keabsahannya sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa. Landasan adalah dasar, patokan atau sesuatu yang dijadikan. Jadi landasan teori adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang telah diakui kebenarannya tentang suatu peristiwa, dan pendapat para ahli yang telah diakui keabsahannya tersebut dijadikan patokan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu rancangan yang telah difikirkan, dan rancangan tersebut belum bisa diakui keabsahannya.²⁷

Sebelum masuk pada pembahasan masalah, penulis akan menguraikan beberapa hal seputar judul dan istilah yang akan sering muncul. Konsep-konsep tersebut adalah peristiwa, pemberontakan, kudeta, konflik dan revolusi. Penjelasan beberapa konsep tersebut penting karena merupakan landasan berfikir dan sebagai pembatasan masalah. Dengan demikian diharapkan nantinya ada kesamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan. Teori juga memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi dan juga mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah dan atau sedang terjadi.²⁸ Dalam konteks ini, teori tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta tentang Peristiwa 1 Oktober 1965.

1) Batasan istilah dan pengertian konsep

Dalam penulisan skripsi yang berjudul Peristiwa 1 Oktober 1965 (Suatu Tinjauan Politik) perlu dikemukakan dalam konsep-konsep yang berkaitan dengan

²⁷ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, op.cit.hlm.67

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 10

judul dan tujuan skripsi. Alasan penulis memilih judul Peristiwa 1 Oktober 1965 yaitu tentang Gerakan Tiga Puluh September 1965 (G30S) adalah karena pemikiran yang selama ini berkembang dalam masyarakat di mana jika menyebut Peristiwa 1 Oktober 1965 selalu dikaitkan dengan PKI sehingga menjadi G30S/PKI, padahal keterlibatan PKI sebagai pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut saat ini kembali dipertanyakan.

Jika menyebut G30S dengan embel-embel PKI di belakangnya (G30S/PKI) maksudnya adalah bahwa gerakan tersebut murni didalangi dan dilakukan oleh PKI. Namun dewasa ini hal tersebut kembali dipertanyakan khususnya PKI sebagai dalang maupun pelaku tunggal dalam peristiwa tersebut karena diduga ada keterlibatan berbagai pihak seperti Angkatan Darat dan Soeharto di dalam peristiwa tersebut. Untuk itulah dalam peristiwa ini penulis menggunakan istilah G30S tanpa embel-embel PKI di belakangnya, namun selebihnya penulis menggunakan istilah Peristiwa 1 Oktober 1965.

Sedangkan pengertian konsep-konsep yang berkaitan dengan judul dan peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

Peristiwa mempunyai arti suatu kejadian, hal, perkara atau kejadian yang luar biasa dan peristiwa tersebut sungguh-sungguh terjadi sehingga jadi menarik perhatian.²⁹ Peristiwa dalam penulisan skripsi ini lebih mengacu pada suatu kejadian yang membawa dampak politis yang besar bagi bangsa Indonesia. 1 Oktober 1965 merupakan tanggal, bulan dan tahun terjadinya peristiwa tersebut.

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 740

Pemberontakan adalah perlawanan kepada pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan dan perjuangan bersenjata. Pemberontakan politik yang sering terjadi dan amat ditakuti adalah bentuk revolusi yang disertai dengan tindakan kekerasan yang kejam, penuh tipu daya dan tidak berperikemanusiaan. Pada dasarnya, semua bentuk revolusi mengandung bahaya yang mengancam eksistensi negara.³⁰

Revolusi berasal dari bahasa Latin *revolvere* yang berarti menjungkir-balikkan kembali. Revolusi dalam arti luas adalah menjungkir-balikkan tata nilai yang lama diganti dengan yang baru atau suatu perombakan dari akar-akarnya.³¹ Melancarkan revolusi dalam arti sempit adalah mengubah suatu tata kemasyarakatan atau kenegaraan dengan kekerasan. Revolusi juga diartikan sebagai perubahan yang dilakukan dengan jalan mengesampingkan azas-azas lama dan diganti dengan yang baru.³² Selain itu revolusi juga diartikan sebagai perubahan di bidang sosial politik yang serba cepat, mendadak dan disertai dengan kekerasan dan perlawanan bersenjata. Secara lebih sempit, revolusi sering diartikan sebagai pemberontakan bersenjata.³³

Selanjutnya revolusi memiliki implikasi yang lebih jauh yakni suatu pergantian suatu golongan satu oleh golongan lain.³⁴ Pengertian revolusi dalam arti sempit adalah perubahan dengan tiba-tiba atau perubahan yang hebat yang sifatnya baik dan tetap atau mengarah pada kemajuan atau perkembangan. Selanjutnya revolusi memiliki implikasi yang lebih jauh, yakni pergantian suatu

³⁰ John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 6

³¹ Kursus Kader Katolik, *Kristalisasi Politik*, Sekretariat Nasional, Djakarta, 1966, hlm. 192

³² T.S.G. Mulia, *Ensiklopedi Indonesia*, W. Van Hoeve, Bandung, Tanpa tahun terbit, hlm.320

³³ *Ibid*, hlm. 193

³⁴ -----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, *op.cit*, hlm.190

golongan oleh golongan yang lain, apabila tidak dijalankan dengan pemberontakan yang dahsyat, maka dijalankan dengan perebutan kekuasaan.³⁵

Hampir semua definisi ilmu sosial kontemporer mengenai revolusi menekankan pada perubahan negara dan struktur kelas dengan kekerasan. Revolusi yang lazim adalah definisi menurut tokoh-tokoh sebagai berikut:³⁶ Menurut *Theda Skocpol* revolusi adalah perubahan cepat dan mendasar pada negara dan struktur kelas masyarakat berbarengan dengan dan sebagian berlangsung memulai, pemberontakan kelas bawah. Menurut *Anthony Giddens* yang mendefinisikan revolusi sebagai perebutan kekuasaan negara melalui cara-cara kekerasan oleh para pemimpin gerakan massa, kemudian kekuasaan tersebut digunakan untuk memprakarsai proses reformasi sosial besar-besaran. *Charles Tilly* mengatakan revolusi sebagai peralihan kekuasaan negara dengan paksa di mana setidaknya dua blok pesaing yang berbeda membuat klaim yang tidak sama untuk menguasai negara, dan jumlah masyarakat yang signifikan dalam kekuasaan negara tersebut menerima klaim masing-masing blok.³⁷

Menurut *John Forlan* revolusi merupakan setiap peristiwa yang partisipasinya dikaitkan dengan partai sosialis revolusioner dan menuntut perubahan politik inkonstitusional maupun perubahan radikal struktur kelas pedesaan atau keduanya. Biasanya tuntutan-tuntutan tersebut berkenaan dengan tuntutan penggulingan paksa atas sistem politik yang ada.³⁸ *Eisenstadt* mengartikan revolusi sebagai suatu gerakan yang paling terpadu dari seluruh

³⁵ Crane Brinton, *Anatomi Revolusi (terjemahan)*, Bhratara, Jakarta, hlm.13-14

³⁶ John Forlan (Ed), *The Future Revolution; masa depan revolusi di era globalisasi dan mendefinisi ulang makna revolusi*, Yogyakarta, Insist Press, 2004, hlm.34

³⁷ *Ibid*, hlm. 197

³⁸ *Ibid*, hlm.5

gerakan sosial maupun yang menghendaki pembaharuan dan perubahan secara menyeluruh, bila perlu dengan kekerasan dalam rangka menciptakan suatu tatanan sosial yang baru yang lebih baik.³⁹

Kudeta adalah perebutan kekuasaan secara mendadak melalui kekerasan oleh mereka yang memegang sejumlah kekuatan militer atau pemerintahan. Berbeda dengan revolusi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok militer, kudeta dilaksanakan dari atas.⁴⁰

Selain konsep konsep dan teori tentang kudeta, pemberontakan dan revolusi, juga terdapat konsep tentang konflik untuk membantu menjelaskan seputar Peristiwa 1 Oktober 1965. *Konflik* berarti pertentangan, percekcoakan, perselisihan atau ketegangan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.⁴¹ Namun dalam penulisan ini kaitannya adalah bahwa terjadi pertentangan ideologi terutama antara TNI-AD dengan PKI.

2) Pendapat Para Ahli Sejarah Mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965

a) Pendapat Para Ahli

Ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965, di antaranya :

1. Antonie Dake dan John Hughes, yang menyebutkan bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah tragedi penculikan perwira AD karena hasil skenario Sukarno untuk melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi AD. PKI ikut serta terseret akibat sangat tergantung pada Sukarno. Jadi Dake dan Hughes menekankan bahwa Sukarnolah yang menjadi dalang dalam Peristiwa 1 Oktober

³⁹ J.R.Adikusilo, *Nasionalisme, Revolusi dan Perubahan Sosial di Perancis Sekitar Tahun 1789*, SPPS Seri XV, No.5, Februari 1989, IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, hlm.10

⁴⁰ Hassan Sadhily, *Ensiklopedi Indonesia Jilid II*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1980, hlm.714

⁴¹ Depdibud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.98

1965 karena kedekatan Sukarno dengan PKI. PKI dijadikan alat oleh Sukarno untuk melenyapkan kekuatan oposisi yang dianggap dapat mengancam posisi Sukarno sebagai Presiden. Sedangkan PKI ikut terseret dalam peristiwa ini karena PKI sangat tergantung pada Sukarno.⁴²

2. Benedict R. Anderson dan Ruth McVey, menyimpulkan bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah puncak dari konflik intern di tubuh Angkatan Darat (*A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 in Indonesia, Cornell Paper*) Menurut Anderson dan McVey bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 merupakan puncak konflik yang ada di dalam tubuh Angkatan Darat karena di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri ada kekuatan yang bertentangan yaitu sayap kanan yang memihak A.Yani dan Nasution dan sayap kiri yang memihak Presiden Sukarno.⁴³

3. Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson, menyatakan bahwa dalang utama Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah CIA yang ingin menjatuhkan Sukarno dan kekuatan komunis. CIA bekerja sama dengan sebuah *klik* di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Teori ini cukup kuat bila dikaitkan dengan konteks Perang Dingin, apalagi jika kita baca buku-buku George McT Kahin tentang keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta sebelumnya, maka bukan mustahil CIA juga memegang peranan dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Jadi dalam hal ini CIA mempunyai andil yang cukup besar dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 mengingat peranan CIA yang cukup besar dalam pemberontakan-pemberontakan daerah

⁴² Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2004, hlm.117

⁴³ *Ibid*, hlm.16

sebelum maupun pasca Peristiwa 1 Oktober 1965 yaitu dalam pembantaian massal terhadap orang-orang PKI tahun 1965-1966.⁴⁴

4. Menurut pendapat kalangan militer rezim orde baru yang mengatakan bahwa seluruh peristiwa tersebut didalangi, kalau bukan dikerjakan sendiri oleh PKI dengan memperalat unsur ABRI. Persiapan gerakan telah dilakukan sejak lama dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dan menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. Bukti-bukti yang dikemukakan adalah fakta bahwa para jendral dibawa ke Halim Perdanakusuma, tempat latihan Gerwani. Bukti lain yaitu kehadiran D.N Aidit di Halim, tempat jasad para jendral dibuang. Hal itu semakin memperkuat tuduhan terhadap PKI sebagai pelaku Peristiwa 1 Oktober 1965. Menurut teori ini bahwa PKI lah dalang dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 dengan asumsi bahwa PKI ingin merebut kekuasaan negara dan menggulingkan ideologi Pancasila.⁴⁵

5. Menurut pendapat professor Wertheim yang mengatakan bahwa bukan PKI dan bukan para perwira muda AD, melainkan Soeharto lah yang menjadi otak Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut. Teori Wertheim ini lebih menekankan pada keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, bahkan menduga bahwa Soeharto adalah dalang yang berdiri di belakang kejadian berdarah tersebut dengan mengacu kepada kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh inti pelaku Gerakan 30 September.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm.117

⁴⁵ Dhaniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.201

⁴⁶ *Ibid*, hlm.207

6. Selanjutnya pendapat yang dikemukakan oleh Wieringa yang mengajukan tesis dua kudeta yaitu, kudeta pertama dilakukan oleh perwira menengah Angkatan Darat dan kudeta kedua yang dikerjakan oleh Soeharto sendiri ketika dia menumpas para pelaku kudeta yang membunuh enam jenderal dan seorang perwira. Kudeta Soeharto tersebut mencapai puncaknya pada kudeta kedua ketika Sukarno menyerahkan kekuasaan dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966.⁴⁷

b) Kritik Penulis

Kritik yang dapat diberikan dengan melihat beragamnya pendapat para ahli sejarah mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965 di Jakarta, dalam penulisan skripsi ini tentu tidak dapat berpatokan hanya pada pendapat satu ahli saja, melainkan berusaha memilah dan menilai pendapat yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober 1965. Jika dikatakan bahwa Presiden Sukarno ada di balik terjadinya peristiwa tersebut seperti yang dikatakan oleh Antonie Dake dan John Hughes, ini sangatlah mustahil karena Sukarno adalah orang yang sangat dicelakakan oleh peristiwa itu karena tidak mau mengutuk PKI sehingga ia dikesankan terlibat bahkan lambat laun kekuasaannya semakin memudar hingga akhirnya jatuh.⁴⁸ Selain itu Sukarno bukanlah pemimpin yang haus darah, malah ia terkejut dengan mendengar kejadian yang dilakukan terhadap para jenderal jenderal itu.⁴⁹

Jika mengulas lagi tentang keterlibatan Amerika Serikat pada sebelum dan sesudah Peristiwa 1 Oktober 1965, maka sangatlah tidak mustahil jika Amerika

⁴⁷ *Ibid*, hlm.208

⁴⁸ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, *op.cit*, hlm. 82

⁴⁹ _____, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, *op.cit*, hlm. 144

melalui CIA terlibat lebih jauh dalam peristiwa tersebut,⁵⁰ jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Sedangkan antara teori Benedict Anderson dan Ruth McVey dengan teori prof. Wertheim dan Wieringa terdapat kesamaan yaitu bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 yang terjadi di Jakarta merupakan puncak dari konflik di dalam tubuh AD, dan dalam hal ini Soeharto memainkan peranan yang penting jika dikaitkan dengan teori yang disampaikan oleh Wieringa tentang tesis dua kudeta yang dilakukan oleh Soeharto.⁵¹ Ini adalah sebuah drama tanpa sutradara dan skenario yang ketat dan Soeharto bukanlah dalang melainkan pemain yang mampu berimprovisasi, namun ia lebih banyak beruntung karena piawai memanfaatkan kesempatan.⁵²

3) Landasan Teori

1. Adapun teori-teori yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Teori Kudeta

Kudeta adalah perebutan kekuasaan secara mendadak melalui kekerasan oleh mereka yang memegang sejumlah kekuatan militer atau pemerintahan, dan kudeta dilakukan dari atas.

Kondisi yang cocok bagi terjadinya kudeta adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya krisis yang berkepanjangan yang diikuti dengan terjadinya pengangguran secara besar-besaran dan krisis ekonomi ini disertai dengan kesenjangan sosial politik. Rakyat miskin hanya bisa menonton kemewahan serta korupsi oleh kelompok konglomerat dan birokrat. Lebarnya jurang pemisah antara

⁵⁰ *Ibid*, hlm.80

⁵¹ Dhaniel Dhakidae, *op cit*, hlm. 208

⁵² Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia, op cit*, hlm. 14-15

kaya dan miskin menyebabkan rakyat miskin semakin menderita dan kondisi ini dapat memicu terjadinya kudeta terhadap pemerintahan demi membela nasib rakyat.⁵³

2. Perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik. Kekalahan ini dapat memicu terjadinya kudeta terhadap pemerintah.⁵⁴

3. Instabilitas kronis di bawah sistem multipartai, di mana di bawah pemerintahan sistem multipartai, stabilitas politik tidak stabil. Di Indonesia sendiri pernah mengalami sistem multipartai pada masa liberal sehingga sering kali terjadi pergantian kabinet dan ketidakstabilan kondisi politik.⁵⁵

Pelaksanaan kudeta sendiri diibaratkan seperti pisau yang harus ditancapkan kepada jantung pasien dalam waktu yang tepat dan tidak boleh keliru. Bila dalam operasi militer, ada pasukan cadangan yang belum diterjunkan, khusus untuk kudeta berlaku azas totalitas. Malam kudeta dan sebelumnya diisi dengan aktivitas yang tersusun rapi. Setelah kudeta harus dilakukan stabilisasi massa dan stabilisasi birokrasi dan perlu dipersiapkan komunike pertama yang dikeluarkan setelah terjadi kudeta.⁵⁶

Claude E. Welch berpandangan bahwa apabila anggota militer mengakui keunggulan pemerintah sipil, kemungkinan campur tangan militer tidak akan timbul. Welch menganggap ada *tujuh faktor pendorong* keterlibatan militer yang di beberapa negara terjelma dalam bentuk kudeta yakni kemerosotan ekonomi, perpecahan para politisi terkemuka, keadaan ekonomi sosial yang tidak stabil, korupsi serta rendahnya kesadaran politik.⁵⁷

⁵³ *Ibid*, hlm.29

⁵⁴ *Ibid*, hlm.30

⁵⁵ *Ibid*, hlm.31

⁵⁶ _____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 192

⁵⁷ Muhammad Rusli Karim, *op.cit.* hlm 46

Setelah pemerintah sipil berhasil dijatuhkan, pimpinan kudeta berusaha untuk membenarkan tindakannya dalam merebut kekuasaan dengan menonjolkan masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial yang tidak dapat ditangani oleh para politisi. Penguasa-penguasa baru itu menyatakan bahwa pemerintahan militer dalam satu periode saja cukup dapat memperbaiki kekurangan sistem politik yang ada. Akan tetapi, retorika mereka belum tentu sesuai dengan tindakan-tindakan yang mungkin mereka lakukan. Negara yang berdasarkan kekuatan militer belum tentu akan berhasil dalam menangani kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah sipil.⁵⁸

b) Teori Pemberontakan

Aristoteles mengemukakan bahwa ada dua motivasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk mengobarkan api pemberontakan yaitu keuntungan dan kehormatan. Lebih lanjut Aristoteles mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yaitu *pertama*, kondisi manusia yang menyebabkan pemberontakan itu yaitu kondisi sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan kepada pemerintah di mana di dalam masyarakat tidak ada kesamarataan. *Kedua* yaitu keinginan dan impian yang hendak diraih yaitu sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri yang merupakan penyebab utama pecahnya pemberontakan. *Ketiga* yaitu kondisi politik yang tidak sehat yang menyebabkan manusia tidak puas dan memberontak yaitu keuntungan, kehormatan, ketakutan, ketidakseimbangan, kekurangwaspadaan dan ketidakcocokan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.* hlm 47

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 7

Selanjutnya juga dikemukakan tentang bagaimana mencegah timbulnya pemberontakan dengan melakukan tiga hal yaitu *pertama* dengan mengembangkan pendidikan, *kedua* dengan meningkatkan kepekaan dan rasa hormat dan tunduk pada hukum yang berlaku dan *ketiga* dengan melaksanakan keadilan dalam bidang hukum, administrasi dan pembangunan. *James C Davies* menganalisa penyebab terjadinya pemberontakan bahwa penurunan tingkat kepuasan akan kebutuhan dasar manusia akan menimbulkan frustrasi yang sangat potensial untuk melahirkan pemberontakan.

Kebutuhan dasar di sini meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dalam masyarakat seperti pergaulan dan penghargaan kepada sesama, kebutuhan akan prestise dan kebutuhan akan keinginan untuk mempertinggi kemampuan kerja. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi pemberontakan kepada pemerintahan dalam suatu negara.

c) Teori Revolusi

Secara umum, revolusi terjadi karena situasi dan kondisi khusus yang menyebabkan meletusnya revolusi di suatu negara. Namun demikian, di setiap terjadinya revolusi ternyata mempunyai sebab yang hampir sama. Di antara *penyebab terjadinya revolusi ialah* struktur dan kondisi masyarakat, dinamika konsep pemikiran kelas menengah dalam masyarakat, keresahan dalam bidang politik dan terjadinya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ketidakadilan hukum. Keseluruhan alasan inilah yang menjadi sebab sebuah revolusi.⁶⁰

Akibat revolusi bisa sangat beragam. Hal ini tergantung tidak hanya pada faktor-faktor yang menyebabkan revolusi, pengaruh yang ditimbulkan oleh

⁶⁰ *Ibid*, hlm.192

negara–negara asing serta permasalahan dan sumber daya yang dihadapi oleh pemenang dari perjuangan revolusioner.

Akibat dari revolusi itu sendiri menurut Eisenstadt yaitu: *pertama*, perubahan secara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, *kedua*: penggantian elit politik atau elit yang sedang berkuasa dengan yang lainnya, *ketiga*: perubahan secara mendasar seluruh bidang kelembagaan utama seperti dalam bidang sosial ekonomi dan *keempat*: pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau serta *kelima*: memberikan kekuatan ideologis dan orientasi kebangkitan mengenai gambaran revolusioner. Hal ini mengandaikan revolusi tidak hanya membawa transformasi kelembagaan dan keorganisasian, melainkan juga perubahan terhadap sistem pendidikan dan sistem moral yang akan menciptakan manusia baru.⁶¹

Maka jika dikaitkan dengan revolusi di Cina yang menghasilkan negara yang berdasarkan partai sosialis dan Meksiko menghasilkan partai negara kapitalis, maka revolusi yang terjadi pada Peristiwa 1 Oktober 1965 di Indonesia mengakibatkan hancurnya PKI, munculnya TNI-AD sebagai figur kekuatan militer dan jatuhnya kekuasaan Sukarno serta munculnya orde baru.

d) Teori Konflik

Konflik dapat dibedakan menjadi dua; yang *pertama*, konflik ideologi atau faham. Konflik ini dapat berlangsung dalam tataran konsep atau tertutup, tetapi dapat juga bersifat terbuka artinya dapat terjadi dalam persidangan atau konflik fisik atau perang. Contohnya yaitu konflik antara Uni Soviet dan Amerika dalam

⁶¹ *Ibid*, hlm. 12

Perang Dunia II, atau pertentangan antara Mao Zedong dengan Chiang Kai Sek di China menjelang, selama dan sesudah Perang Dunia II.⁶²

Dalam sejarah Indonesia pun diketahui bahwa konflik ideologi pernah terjadi, baik yang masih secara tertutup maupun terbuka, khususnya pada periode berlakunya UUDS 1950, karena adanya kemajemukan azas, dasar, maupun ideologi yang dianut oleh partai-partai di Indonesia. Periode berlakunya UUD 1950-1959 juga sering dinamai dengan masa berlakunya sistem parlementer di Indonesia, merupakan periode penuh dengan pertentangan. Periode ini merupakan bagian dari suatu masa yang ditandai dengan suatu pertikaian ideologi yang pada hakekatnya merupakan kelanjutan munculnya perbedaan paham serta kemajemukan aliran atau ideologi dalam masa-masa sebelumnya.⁶³

Pada umumnya, partai-partai politik waktu itu mengacu pada ideologinya masing-masing yang dapat bersifat keagamaan, kebangsaan maupun ideologi yang terpengaruh oleh aliran-aliran yang berkembang di dunia barat baik yang sosialis maupun komunis. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan konflik ideologi.⁶⁴

Konflik yang *kedua* yaitu konflik organisasi yang terjadi karena perbedaan pendapat, pandangan, interpretasi, persepsi serta kepentingan antar individu atau kelompok. Menurut teori, konflik dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu: *pertama*, tingkatan terendah adalah konflik yang tidak rasional dan bertujuan untuk menyingkirkan atau membinasakan lawan. *Kedua* yaitu konflik tingkat menengah yang merupakan permainan strategi yang pada umumnya bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan dan bersifat negatif. *Ketiga* yaitu konflik tingkat tinggi yang lebih bersifat persuasif.⁶⁵

⁶²-----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, Adi Pustaka, 1990, hlm.100

⁶³ *Ibid*, hlm 101

⁶⁴ *Ibid*, hlm 102

⁶⁵ *Ibid*, hlm.103

Langkah-langkah untuk menangani konflik adalah *pertama*, mengidentifikasi tingkat konflik, *kedua* mencegah pengaruh yang ditimbulkan *ketiga* penetapan sanksi, *keempat* mencari jalan keluar dengan menuntut toleransi maksimum serta mencegah timbulnya konflik yang berakibat negatif dimasa yang akan datang.⁶⁶

Teori konflik ini jika dikaitkan dengan Peristiwa 1 Oktober 1965 memang dapat dikatakan suatu konflik khususnya konflik intern AD, namun tidak sepenuhnya konflik karena Peristiwa 1 Oktober 1965 sendiri adalah sebuah revolusi, walaupun dalam kenyataannya adalah sebuah revolusi yang gagal.

Jika dihubungkan dengan teori konflik, Peristiwa 1 Oktober 1965 sesungguhnya juga berakar dari konflik, khususnya konflik intern AD dengan Sukarno, namun tidak terlepas pula konflik ideologi antara AD dengan PKI yang beraliran komunis. AD sangat menentang ideologi komunis karena tidak sejalan dengan Pancasila. Konflik ini semakin meruncing dengan adanya konflik di dalam tubuh AD sendiri antara pihak yang mendukung dan menentang Sukarno, kemudian diselipi oleh kepentingan berbagai kelompok yang memanfaatkan situasi tersebut sehingga terjadilah Peristiwa 1 Oktober 1965 yang notabene adalah sebuah revolusi yang gagal.

2. Teori yang digunakan

Adapun teori yang penulis anggap paling cocok untuk dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini adalah teori revolusi karena penyebab terjadinya revolusi hampir sesuai dengan Peristiwa 1 Oktober 1965 di Jakarta, di antaranya kondisi masyarakat yang menderita, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi,

⁶⁶ *Ibid*, hlm 104

namun yang paling dominan adalah keresahan dalam bidang politik yaitu pertikaian antara dua kubu yang saling bertentangan yaitu antara PKI dan TNI-AD. TNI-AD menganggap PKI sebagai ancaman serius karena PKI berideologikan komunis yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Ideologi komunis dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan Pancasila karena PKI pada saat itu telah berkembang menjadi partai besar yang memiliki jutaan massa pendukung.

Kemudian akibat terjadinya revolusi juga sesuai dengan akibat Peristiwa 1 Oktober 1965 bahwa terjadi perubahan secara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, di mana dalam hal ini rezim orde lama mulai pudar dan terkikisnya kekuasaan PKI sebagai salah satu partai yang paling berpengaruh serta penggantian elit politik atau elit yang sedang berkuasa dengan yang lainnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah pudarnya kekuasaan Presiden Sukarno pasca Peristiwa 1 Oktober 1965 dan kemudian munculnya TNI-AD sebagai figur kekuatan yang baru hingga kemudian naiknya Soeharto sebagai penguasa yang baru dengan orde baru menggantikan orde lama.

Adapun teori revolusi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini juga sesuai dengan definisi revolusi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dan Charles Tilly bahwa revolusi adalah perebutan kekuasaan negara melalui cara-cara kekerasan oleh para pemimpin gerakan yang mempunyai basis dukungan, selanjutnya kekuasaan tersebut direbut dengan paksa di mana setidaknya ada dua blok yang bersaing yang membuat klaim yang berbeda untuk menguasai negara.

Selain teori revolusi, penulis juga sedikit mengkaitkan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 dengan teori konflik, karena meletusnya peristiwa tersebut sebagai suatu bentuk revolusi, sebelumnya juga turut dipicu oleh berbagai konflik khususnya konflik intern dalam tubuh AD sendiri yaitu pertentangan dua kubu yaitu antara sayap kanan yang memihak A.Yani dan Nasution dan sayap kiri yang memihak Presiden Sukarno. Konflik tersebut membuat TNI-AD menjadi tidak solid ketika harus dihadapkan dengan pertentangan dengan PKI yang semakin meruncing. Walaupun demikian hal tersebut merupakan konflik intern AD, namun Peristiwa 1 Oktober 1965 di Jakarta tetaplah merupakan suatu bentuk revolusi.

Sedangkan pendapat para ahli yang cukup relevan untuk menggambarkan revolusi yang terjadi di Indonesia tanggal 1 Oktober 1965 adalah pendapat Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson, dengan mengaitkan dengan teori yang disampaikan Wieringa serta Wertheim, bahwa dibalik tragedi 1 Oktober 1965 ada campur tangan CIA mengingat bahwa pada waktu terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965 bertepatan pula dengan berlangsungnya Perang Dingin. Kubu Amerika sedang menghadapi perang Vietnam, dan sikap Sukarno yang cenderung melindungi komunis (PKI) dan ideologi Nasakom yang dianut Sukarno diindikasikan menjadi penyebab CIA ikut campur tangan dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 karena Amerika tidak ingin pengaruh komunis masuk ke Indonesia.

Untuk itulah CIA ingin menghancurkan pengaruh komunis di Indonesia sekaligus menjatuhkan Sukarno dengan bekerja sama dengan *klik* Angkatan Darat.

Teori Wieringa juga terkait terutama tentang keterlibatan Soeharto dalam peristiwa tersebut. Hanya dalam kasus ini Soeharto lebih pandai dalam memanfaatkan peluang untuk merebut kekuasaan dari tangan Sukarno. Dari sini dapat dilihat bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 tidak dilakukan oleh pelaku tunggal namun ada beberapa pihak yang terlibat dengan berbagai kepentingan.

Penulis sendiri dalam skripsi ini menggunakan istilah G30S tanpa kata “PKI” dibelakangnya karena berdasarkan sumber-sumber yang digunakan maupun pendapat para ahli sejarah, sebagian besar meragukan keterlibatan PKI sebagai dalang maupun sebagai pelaku tunggal dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Hal itu dikarenakan adanya indikasi keterlibatan berbagai pihak seperti TNI-AD dan Soeharto di dalam peristiwa tersebut. Untuk itulah penulis dalam skripsi ini menggunakan istilah G30S tanpa embel-embel PKI di belakangnya.

Presiden Sukarno sendiri mengatakan bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 yang menewaskan enam petinggi militer Angkatan Darat tersebut sebagai riak air di tengah samudera revolusi dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar terjadi dalam sebuah revolusi. Selain itu, Sukarno juga sering mengumandangkan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa revolusi belumlah selesai.

F. Hipotesis

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian. Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan pedoman bagi penelitian. Ini berarti sebelum penelitian dilakukan sudah dirumuskan hipotesis dari masalah yang diteliti. Hipotesis itulah yang akan dibuktikan dalam penelitian.

Dengan adanya rumusan hipotesis, maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah.

Dalam situasi pertentangan antara PKI dan TNI-AD yang semakin meruncing, tersiar berita bahwa Presiden Sukarno jatuh sakit, padahal satu-satunya tempat berlindung PKI hanyalah tinggal pada Presiden Sukarno, maka jika beliau meninggal sudah dapat dipastikan bahwa TNI-AD akan mengganyang PKI habis-habisan.⁶⁷ Untuk mengatasi situasi dan menyelamatkan diri, PKI kemudian menyebarkan isu adanya dewan jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Isu tentang adanya dewan jenderal yang merencanakan untuk menggulingkan pemerintah telah diinjeksikan pada kabar angin di Jakarta sekitar bulan Maret 1965. Hal inilah salah satunya yang memicu terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965.⁶⁸

Pasukan Cakrabirawa memegang peranan penting Peristiwa 1 Oktober 1965 karena pasukan Cakrabirawalah yang bertugas menjemput paksa para jenderal yang diculik, walau demikian tokoh-tokoh seperti Serka Bungkus, Latief, Soepardjo, Untung dan Aidit terlibat dalam peristiwa tersebut di mana tokoh-tokoh tersebut merupakan anggota PKI namun sekaligus pula merupakan bagian dari AD. Namun secara umum AD secara tidak langsung ikut terlibat karena dalam gabungan pasukan Pasopati yang bertugas untuk menculik para jenderal terdiri dari kesatuan-kesatuan batalion AD.⁶⁹ CIA diduga terlibat dalam peristiwa tersebut dengan melihat betapa besarnya keterlibatan AS dengan berdasarkan

⁶⁷ Todiruan Dydo, *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G30S/PKI*, Media Pressindo, Jakarta, hlm.78

⁶⁸ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI, Op. Cit.*, hlm.350

⁶⁹ Proyek Historiografi Center For Information Analysis, *Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa*, Galangpress, Yogyakarta, hlm.204.

dokumen dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa secara tidak langsung AS melalui CIA terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 dan pembantaian massal terhadap orang-orang PKI tahun 1965-1966 dengan memberikan daftar 5000 orang PKI yang harus dilenyapkan.⁷⁰

Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 ternyata mempunyai dampak yang besar, di mana pembalasan dendam atas kematian para jenderal tersebut telah menyebabkan terjadinya sebuah pembunuhan massal di kepulauan Indonesia yang antara lain meliputi Jawa, Sumatera, Flores bahkan hingga ke Bali. Besarnya jumlah korban pembunuhan massal tersebut diperkirakan antara 500.000 hingga 2 juta orang penduduk Indonesia.⁷¹ Peristiwa tersebut kemudian diikuti dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk memulihkan situasi keamanan negara yang genting serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu demi pemulihan keamanan. Keluarnya Supersemar ini mengandung arti yang sangat penting dalam sejarah kehidupan perpolitikan di Indonesia terutama bagi TNI-AD dalam hubungan dengan legitimasi peranan politik yang dimainkannya. Surat perintah itu pula yang kemudian mengakhiri showdown antara Presiden Sukarno yang sejak tahun 1959 telah menjadi figur politik yang dominan melawan AD.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Baskara T. Wardaya, *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA hingga G 30 S*, Galang Press, Yogyakarta, 2005, hlm.155.

⁷¹ Lambert J. Giebels, *Pembantaian Yang di Tutup-tutupi Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.173.

⁷² Yahya Muhaimin, *Perkembangan Politik Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 211

1. Jika Presiden Sukarno jatuh sakit dan muncul isu kudeta oleh Dewan Jenderal, maka terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965.
2. Jika TNI-AD khususnya Cakrabirawa telah dipengaruhi PKI, tokoh-tokoh PKI seperti Untung memerintahkan untuk menghadapkan para jendral kepada presiden, Amerika melalui CIA ikut campur dalam memerangi komunis di Indonesia serta Soeharto sudah mengetahui bahwa akan terjadi penangkapan para jendral namun dia tidak bertindak apa-apa, maka terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965.
3. Jika terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965, maka terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang PKI dan terbit Supersemar yang berimbas pada jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno serta keterpurukan ekonomi Indonesia.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Penelitian sejarah mempunyai ciri tersendiri dibanding dengan penelitian ilmu sosial. Penelitian sejarah lebih menekankan pada dua hal pokok yaitu ruang dan waktu. Oleh karena itu setiap topik penelitian sejarah yang kemudian menjadi historiografi harus mencakup kedua unsur tersebut. Penelitian ini secara eksplisit telah mencakup adanya dua unsur tersebut.

Metode penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif, data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dikonversi dalam bentuk angka-angka. Sedangkan metode penelitian kualitatif, datanya berupa pernyataan

pernyataan atau kalimat-kalimat. Karena skripsi ini datanya berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat, maka termasuk penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif bisa ditempuh dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan, peneliti mencari sumber dengan wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) peneliti mencari data-data yang telah dibukukan, seperti halnya dalam skripsi ini.

Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan penelitian kepustakaan, penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, dan menghindari duplikasi penelitian.⁷³

Dalam mencari sumber-sumber tulisan, penulis menggunakan data historis. Data historis yang dimaksud adalah pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu, yang memberikan sampel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang.⁷⁴ Data historis dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

⁷³ Masri Siarimbun dan Sofian Effendi (ed), 1987, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hlm.45

⁷⁴ Kartini Kartono, 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ALUMNI, Bandung, hlm. 225 - 226

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan tentunya banyak buku-buku yang dibaca dalam rangka mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna menemukan generalisasinya. Penganalisaan digunakan untuk meramu data-data yang telah didapat guna mencari kesimpulan yang muncul. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Yang dimaksud dengan metode sejarah di sini adalah prosedur atau langkah-langkah kerja yang digunakan dalam proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif terhadap masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses disebut *historiografi* (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah), sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia sebanyak-banyaknya.⁷⁵ Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.⁷⁶

1. Pengumpulan Sumber (heuristik)

Heuristik adalah kegiatan peneliti memilih subyek untuk diteliti dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Sumber yang diperoleh dapat berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah keterangan langsung dari pelaku sejarah (narasumber), selain itu dapat juga berupa arsip-arsip sejarah, tulisan-

⁷⁵ Louis Gotchalk, *op.cit*, hlm. 32

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 35-38

tulisan asli pelaku sejarah maupun dokumen-dokumen resmi. Sedangkan sumber sekunder yaitu yang bukan keterangan langsung dari pelaku sejarah, yang dapat juga buku-buku.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, diantaranya adalah buku karangan Surya Lesmana *Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*; buku yang ditulis oleh Lambert J.Giebels *Pembantaian Yang Ditutup-Tutupi Peristiwa Fatal Di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*; buku yang dikarang oleh Edward C.Keefer *Dokumen CIA-Melacak Penggulingan Sukarno Dan Konspirasi G30S 1965*; Buku yang dihimpun oleh Proyek Historiografi Center For Information Analysis *Gerakan 30 September Antara Fakta Dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*; buku yang dikarang oleh P.J.Suwarno *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Supersemar)*; buku yang ditulis oleh Baskara T.Wardaya *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA Pembantaian Massal 1966 Hingga G30S*; dan buku yang ditulis oleh Asvi Warman Adam *Revolusi Belum Selesai (Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara)Jilid II, Pelurusan Sejarah Indonesia*.

Selain itu, penulis juga menggunakan sumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian tentang Peristiwa 1 Oktober 1965 di Jakarta.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul maka segera dilakukan kritik terhadap sumber yang sudah diambil. Kritik ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas

sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakeaslian.⁷⁷ Adapun kritik sumber juga terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk mengetahui tingkat kredibilitas sumber, apakah sumber yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian (otentisitas) sumber yang digunakan dalam penelitian, misalnya ditemukan dokumen sejarah, maka harus diamati ciri dan kualitas kertas dokumen tersebut, tinta, gaya bahasa serta tulisannya untuk mencocokkan dengan tahun terjadinya peristiwa sejarah itu.

a. Kritik *Ekstern*, untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber.

Kritik ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya penulisan, bahasanya, ungkapannya, tintanya, kalimat yang digunakan, dan jenis huruf yang digunakan serta semua penampilan luar untuk mengetahui otentisitasnya.

Dalam penelitian ini kritik ekstern perlu dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber yang digunakan. Caranya yaitu dengan menggunakan buku pustaka asli yang merupakan hasil karya asli dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah maupun bukan saksi atau pelaku sejarah tetapi bukunya relevan dengan topik dari penelitian ini. Penulis menggunakan semua sumber yang berupa buku asli bukan foto kopi sehingga otentisitas sumber tidak diragukan. Dari seluruh sumber yang digunakan, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

b. Kritik *Intern*, untuk mengetahui kredibilitas atau kelayakan sumber untuk dipercayai.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 99

Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang konkrit. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kredibilitas sumber digunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar, apabila terdapat perbedaan informasi tentang suatu masalah maupun informasi maka pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang disampaikan kebanyakan sumber yang relevan.

Contoh penggunaan kritik intern dalam penulisan skripsi ini adalah: terdapat perbedaan informasi mengenai proses penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto. Dalam buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* menyatakan bahwa penandatanganan Supersemar dilakukan oleh Presiden Sukarno dengan sukarela, serta jendral yang datang ke istana Bogor berjumlah tiga orang yaitu M.Yusuf, Basuki Rahmat serta Amir Mahmud.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Asvi Warman Adam *Pelurusan Sejarah Indonesia dan Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, buku yang ditulis oleh P.J.Suwarno *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Hingga Supersemar)*, buku yang ditulis oleh Surya Lesmana *Saksi Dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*, dan buku yang dirangkum oleh Lembaga Analisis Informasi (LAI) *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, yang diterbitkan oleh Media Pressindo, keempatnya menyatakan bahwa ada

indikasi pemaksaan dalam penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto, khususnya dalam penandatanganan Supersemar tersebut Presiden Sukarno berada di bawah tekanan, sedangkan jendral yang datang ke istana Bogor juga bukan hanya tiga orang melainkan ditambah satu orang lagi yaitu Jend.Panggabean yang datang dengan menggunakan mobil jiff.

Solusi atau pemecahan yang ditempuh penulis adalah mengikuti informasi yang disampaikan oleh banyak sumber yaitu bahwa memang ada unsur paksaan dalam penyerahan Supersemar di mana penyerahan tersebut dilakukan Presiden Sukarno di bawah tekanan empat jendral utusan Soeharto.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan kritik maka selanjutnya dilakukan analisis dan sintesis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan data tidak bisa berbicara, sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihat dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektivitas penulis sejarah diakui, tetapi perlu dihindari. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.

a) Analisis berarti menguraikan informasi atau data dari berbagai sumber dan mengkaitkannya antara satu dengan yang lain.

Contoh cara menganalisis, pada waktu terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965 dinihari, Soeharto sudah mengetahui bahwa akan terjadi penculikan terhadap para

jendral AD dari kol. Latief, namun Soeharto tidak berbuat apa-apa. Melihat kenyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Soeharto merupakan salah satu bagian yang terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 terlebih dengan melihat kedekatan hubungan antara Soeharto dengan tokoh-tokoh kunci pelaku gerakan tersebut, karena walaupun sudah mengetahui bahwa akan terjadi peristiwa tersebut tetapi Soeharto tidak berusaha untuk mencegahnya.

b) Sintesis berarti menyatukan atau mengelompokkan informasi atau temuan dari berbagai sumber.

Contoh, penulis melakukan sintesis dengan cara menyatukan informasi dari berbagai sumber yaitu buku yang ditulis oleh Asvi Warman Adam *Pelurusan Sejarah Indonesia, dan Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*; buku yang ditulis oleh Lambert J.Giebels *Pembantaian Yang Ditutup-Tutupi Peristiwa Fatal Di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*; buku yang dihimpun oleh Proyek Historiografi Center For Information Analysis *Gerakan 30 September Antara Fakta Dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*; buku yang ditulis oleh Baskara T.Wardaya *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 1965 Hingga G30S*, bahwa terdapat banyak pihak yang terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 seperti Angkatan Darat, PKI, Soeharto dan CIA dengan dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah suatu peristiwa yang kompleks di mana terdapat banyak pihak yang terlibat dengan berbagai macam kepentingan di dalamnya.

4. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian, di mana setelah melalui proses verifikasi dan interpretasi, maka data yang telah valid dituangkan dalam suatu tulisan sejarah. Tulisan sejarah ini sudah menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang terjadi secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya dengan demikian memberi kemudahan bagi pembaca dalam memahami peristiwa tersebut. Penulisan sejarah hendaknya dilakukan secara kronologis, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa yang baku dan ilmiah. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memenuhi kriteria suatu penulisan sejarah seperti berpedoman pada cara penulisan yang ilmiah.

Penelitian mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965 ini telah melalui tahap-tahap metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulisan skripsi ini mencakup hal-hal penting yang diperhatikan oleh penulis seperti topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu pendekatan yang menggunakan berbagai jenis konsep, hipotesis, dan teori sebagai kerangka referensi yang dipakai untuk mencari dan mengatur data, sehingga penulisan sejarah dapat lebih lengkap dalam mempelajari fenomena historis yang kompleks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, politik, ekonomi dan sosiologis.

Seseorang yang ingin menulis tentang masa lampau tepat kiranya menggunakan pendekatan historis. *History* itu sendiri menurut Louis Gotschalk berarti masa lampau umat manusia. Pengertian yang lebih tajam diungkapkan oleh Sartono Kartodirjo bahwa sejarah tidak hanya mengungkap peristiwa masa lampau saja tetapi juga mengungkap fakta mengenai apa, siapa, kapan dan di mana serta menerangkan bagaimana sesuatu telah terjadi. Pendekatan historis digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Peristiwa 1 Oktober 1965.

Pendekatan politik digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, karena penelitian tentang Peristiwa 1 Oktober 1965 ini termasuk kategori sejarah politik. Pendekatan politik digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, keterlibatan TNI-AD, Soeharto, CIA dan PKI dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, dan dampak dari peristiwa tersebut bagi Indonesia.

Pendekatan sosiologis dan ekonomi digunakan untuk memberi gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat Indonesia sebelum, sewaktu dan sesudah terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965. Dengan menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi, kita dapat mengetahui bahwa pada awal tahun 1963 hingga tahun terjadinya peristiwa tersebut merupakan masa krisis bagi Indonesia terutama dalam bidang ekonomi, terutama krisis ekonomi yang berkepanjangan yang membuat rakyat Indonesia hidup melarat, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan kesehatan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peristiwa 1 Oktober 1965”(Suatu Tinjauan Politik), mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis dan pendekatan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini menyajikan uraian tentang latar belakang terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965

Bab III : Bab ini menguraikan mengenai keterlibatan TNI-AD, CIA, PKI dan Soeharto pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan dampak Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan ideologi Indonesia.

Bab V : Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, dan IV.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dan dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang latar belakang terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965, peran TNI khususnya Angkatan Darat, CIA, PKI dan Soeharto pada peristiwa 1 Oktober 1965, serta dampak politik yang ditimbulkan dari Peristiwa 1 Oktober 1965 bagi rakyat Indonesia.

BAB II

LATAR BELAKANG TERJADINYA PERISTIWA

1 OKTOBER 1965

1. Latar Belakang Politik

A. Muncul dan Berkembangnya PKI

Gerakan 30 September 1965 yang diduga dilakukan oleh PKI ini merupakan pemberontakan yang kedua sejak kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan pertama dilancarkan di Madiun pada tahun 1948, dan kemudian dikenal dengan pemberontakan PKI Muso. Setelah gerakan Madiun ini dapat ditumpas oleh angkatan perang Republik Indonesia, ternyata masih banyak tokoh PKI yang selamat dari hukuman pengadilan. Hal ini antara lain disebabkan karena keadaan negara yang pada waktu itu belum memungkinkan. Selain disibukkan dengan peristiwa Agresi Militer Belanda yang kedua, pemerintah juga menghadapi pemberontakan lain, seperti pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.⁷⁸

Suatu hal yang amat menentukan perjalanan PKI selanjutnya adalah meskipun telah mengadakan pemberontakan, PKI tidak dibubarkan oleh pemerintah, dengan demikian PKI masih mempunyai hak hidup. PKI berhasil menyusun kekuatan lagi, dan dapat menghimpun kekuatan dari kalangan buruh dan tani yang keadaan ekonominya lemah.⁷⁹

Sebelum Indonesia merdeka, PKI pernah melancarkan pemberontakan pada tahun 1926, di mana PKI pernah mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan memanfaatkan Sarekat Islam. Pada tahun

⁷⁸ Tanpa pengarang, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 127

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 127

1947, PKI kembali bangkit dan melancarkan aksinya kembali dalam pemberontakan di Madiun tanggal 18 September 1948, sedangkan pemberontakan tahun 1965 atau lebih dikenal dengan Peristiwa 1 Oktober 1965, PKI kembali diidentikkan dengan menculik para Jenderal Angkatan Darat yang diindikasikan masuk dalam Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta (*coup d'etat*). Para Jenderal itu dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur tua di desa Lubang Buaya dekat lokasi Kompleks Angkatan Udara (AURI) Halim Perdanakusuma.⁸⁰

Partai Komunis Indonesia sudah berdiri sejak 1920 dan dinyatakan sebagai partai terlarang baru pada tahun 1948. PKI cenderung mewujudkan cita-citanya dengan cara menghancurkan masyarakat lama melalui revolusi, karena PKI menggunakan asas Marxisme (Marxisme-Leninisme), yang lebih dikenal dengan komunisme.⁸¹

Komunisme merupakan sebuah faham ideologi yang dicetuskan oleh filsuf Jerman, Karl Marx yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantinya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Ideologi ini dicetuskannya pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul "*Manifest der Kommunistischen Partej* (Manfaat Komunisme)".⁸²

Ketika Marx menyusun pemikiran komunis, pemikirannya lebih dikenal dengan Marxisme. Marxisme sebenarnya merupakan penyempitan atas ajaran Karl Marx. Yang terpenting dalam Marxisme adalah ajaran tentang perjuangan

⁸⁰ Todiruan Dydo, *op.cit.* hlm. 79

⁸¹ *Ibid*, hlm.83

⁸² Abdul Syukur, dkk. *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar*. Ictiar Baru Van Hoeven. 2005. hlm. 172

kelas. Konsep perjuangan kelas harus dicapai melalui revolusi atau pertumpahan darah.⁸³

Generasi setelah Marx adalah Lenin. Dia beranggapan bahwa revolusi yang dicanangkan Marx tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kaum buruh karena mereka lemah dan tidak berpendidikan. Buruh harus diwakili partai komunis yang memegang kekuasaan absolut. Untuk mencapai cita-citanya, partai komunis menghalalkan segala cara. Dalam memerintah negara, mereka memegang kekuasaan dan menjalankan kediktatoran atas nama rakyat.⁸⁴

TNI-AD menyadari bahwa secara ideologis, Marxisme-Leninisme suatu waktu dapat mengancam Pancasila karena paham tersebut pada akhirnya akan diperjuangkan melalui suatu perjuangan bersenjata. Sedang di Indonesia, kiranya tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa satu-satunya potensi yang sanggup membela Pancasila secara bersenjata hanyalah TNI-AD. Sedang potensi-potensi yang lain dalam tubuh TNI sifatnya sangat teknis, kurang mempunyai corak dan identitas politik dan karenanya memilih untuk loyal mengikuti garis kebijaksanaan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁸⁵ Di samping ancaman ideologis dan ancaman fisik ini, TNI-AD juga sadar dan telah memperhitungkan bahwa karena sifat partai komunis adalah internasional, maka PKI akan dibantu oleh potensi-potensi asing tertentu. Hal lain yang sangat memprihatinkan TNI-AD dan karenanya juga diperhitungkan ialah apakah pemerintah Indonesia melalui PKI telah dapat dipengaruhi oleh paham komunis. Sejauh itu TNI-AD masih tetap setia dan menjunjung tinggi kepemimpinan Sukarno.⁸⁶

⁸³ *Ibid.* hlm. 172

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 172

⁸⁵ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, CV Muliasari, Jakarta, 1991, hlm.68

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 66

Komunisme di Indonesia dibawa oleh seorang sosialis Belanda yang bernama Hendricus Sneevliet (1883 – 1942), dengan mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) pada tahun 1914 dan menjadi Partai Komunis Indonesia yang berdiri tahun 1920.⁸⁷ Sementara itu pada tahun 1920, Sneveevliet dan kawan-kawan menjadikan ISDV sebagai bagian dari komunis internasional (*komintern*). Secara resmi berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah menguasai Syarikat Islam. PKI berusaha menggalang kekuatan revolusioner massa rakyat. Sepanjang periode 1945–1949, eksistensi PKI makin mantap, terlebih setelah wakil presiden Mohammad Hatta mengeluarkan “Maklumat X Pemerintah” tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut memberi peluang bagi PKI untuk membentuk masyarakat sosialis yang berazaskan Marxisme-Lenimisme, dan untuk mencapai tujuan itu. PKI memperjuangkan kelas revolusioner, yaitu kelas buruh tani dan golongan-golongan yang terhisap dan tertindas oleh kelas borjuis.⁸⁸

Dalam hal ini, PKI memanfaatkan kelas buruh yang akan dijadikan basis kekuatan dengan memanfaatkan kondisi perekonomian Indonesia yang buruk pada waktu itu. Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan kesengsaraan rakyat, terutama yang lebih dirasakan oleh kaum buruh tani yang berada di pedesaan.⁸⁹

Kondisi ini dimanfaatkan oleh PKI untuk membujuk kaum buruh tani untuk menjadi kader PKI dengan mengiming-imingi kehidupan yang lebih baik di bawah kekuasaan PKI. Dalam usahanya ini tentu saja PKI telah mempengaruhi

⁸⁷ Abdul Syukur dkk, *Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar*, op.cit hlm. 172

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 6

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 12

rakyat dengan ide-ide komunisnya. Para kaum buruh tani yang hidupnya menderita lebih gampang dipengaruhi oleh ide komunis, karena dalam keadaan miskin dan menderita seperti itu, masyarakat akan cenderung lebih revolusioner. Hal inilah yang dikehendaki oleh PKI. Kaum buruh tani, terutama yang berada di pedesaan ini kemudian dipersenjatai.⁹⁰

Dalam perkembangan selanjutnya dan dengan didukung oleh organisasi yang rapi dan disiplin kader yang tinggi, PKI berkembang menjadi partai besar. Perkembangan partai ini yang begitu pesat menjadi ancaman tersendiri bagi Tentara Nasional Indonesia terutama karena paham komunis yang dianut PKI.

Dalam mempersiapkan kader-kadernya, PKI memperkuat diri dengan semakin memperkokoh basis dukungan, di antaranya dengan mempersiapkan Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), dan Barisan Tani Indonesia (BTI), yang akan dijadikan basis kekuatan PKI. Organisasi-organisasi tersebut dipersenjatai dan dilatih militer. Pembentukan kader dengan cara dipersenjatai ini dijadikan alasan PKI sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Maka, keluarlah gagasan PKI untuk membentuk angkatan ke-5 dengan mempersenjatai buruh tani.⁹¹

Masa demokrasi liberal pasca pemberontakan PKI di Madiun dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh PKI, seperti Aidit dan Alimin untuk kembali pulang ke Indonesia dengan tujuan untuk menghilangkan citra buruknya di mata rakyat Indonesia. Jalan yang ditempuh yaitu dengan melakukan aliansi dengan partai politik yang penting pada waktu itu, yaitu PNI, dengan harapan bahwa

⁹⁰ Hidayat Mukmin, *op.cit.*, hlm. 35

⁹¹ Todiruan Dydo. *op.cit.* hlm. 74

dengan beraliansi dengan PNI, maka partai-partai lain tidak lagi menaruh curiga dan anti terhadap PKI. Upaya yang ditempuh PKI ini membuahkan hasil, di mana sejumlah tokoh PNI mulai bekerja sama dengan PKI. Kerja sama PKI dan PNI ini kemudian berhasil menjatuhkan Kabinet Wilopo, dan kemudian terbentuk Kabinet Ali Sastrowijoyo I. Di dalam kabinet baru ini termasuk di dalamnya PKI namun tanpa Masyumi. PKI mendukung penuh kabinet baru tersebut dan melawan kelompok manapun yang hendak menjatuhkannya.⁹²

Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI mengalami kemajuan yang pesat, di mana pada pemilu tanggal 29 September 1955 mampu menempatkan partainya masuk dalam empat partai besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Meskipun PKI mendapat suara yang cukup besar dalam pemilu, namun PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilu. Keberhasilan PKI dalam kebesaran partainya tentu tidak terlepas dari kemampuan Aidit dengan segala propagandanya yang mampu menarik perhatian massa (Abdul Gafur, 1987 : 222). Walaupun PKI tidak diikutsertakan dalam kabinet koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU, namun Presiden Sukarno tetap memberi dukungan kepada partai ini.

Kepemimpinan D.N. Aidit semakin kuat setelah tokoh-tokoh muda lainnya, seperti Nyoto dan Sudisman bergabung. Pada bulan Januari 1951, CC PKI memilih Politbiro baru yang terdiri atas D.N. Aidit, M.H. Lukman Nyoto, Sudisman, dan Alimin. Pemimpin-pemimpin baru inilah yang kemudian berhasi membangun kembali dan mengembangkan PKI. Politbiro ini menjalankan strategi Front Persatuan Nasional. Sampai awal tahun 1952, Politbiro CC PKI

⁹² Hidayat Mukmin, *op.cit*, hlm. 52

memusatkan perhatian pada perumusan taktik-taktik utama, bentuk perjuangan, dan bentuk organisasi yang kemudian diikuti oleh PKI dalam tahun-tahun berikutnya.⁹³

Pada tahun 1951, PKI diduga melakukan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan Bogor, di mana banyak penduduk yang menjadi korban. Akibatnya pada masa Kabinet Sukiman dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah-rumah para pemimpin PKI. Peristiwa ini dikenal dengan “Razia Agustus 1951”. Akibat dari razia ini, sejumlah besar pimpinan PKI menjadi tahanan politik dan beberapa pimpinan lainnya berhasil menyelamatkan diri, termasuk Aidit yang lari ke Moscow. Selama dua tahun di Moscow, tahun 1953 Aidit kembali ke tanah air dengan membawa konsep baru yang dikenal dengan “Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”. Dengan konsep ini, untuk mencapai tujuan politiknya, selain menempuh cara-cara parlementer, PKI juga akan menempuh jalan yang lebih revolusioner.⁹⁴

Dengan berdasarkan Marxisme-Lenimisme dan analisa mengenai situasi kondisi Indonesia sendiri, CC PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit mulai menyusun program partai untuk mencapai tujuannya, yaitu menyebarkan ideologi komunisnya dan secara tidak langsung ingin mengkomuniskan Indonesia. Adapun isi program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membina Front Persatuan Nasional yang berdasarkan persatuan kaum buruh dan kaum tani.

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. hlm. 24

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 23

2. Membangun PKI yang meluas di seluruh negara dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan ideologi politik dan organisasi.⁹⁵

Semakin jelas bahwa dengan program baru yang dibawa Aidit, PKI akan semakin bersifat revolusioner dan radikal. Cara-cara yang ditempuh melalui jalan parlementer yang dilakukan PKI sebelumnya, dianggap tidak membawa hasil dan dinilai lambat untuk mencapai tujuan PKI. Dengan adanya program tersebut, PKI akan menggalang kekuatan dengan kekuatan basis massa. Sasaran yang dituju PKI adalah kaum buruh dan kaum tani yang ada di pedesaan.

Alasan memilih kaum tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang buruk pada waktu itu, sehingga akan mudah untuk dipropaganda. Aidit sangat menaruh perhatian yang besar kepada para petani untuk dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan konsep demokrasi rakyat. Dengan propaganda yang menarik dilancarkan bahwa petani harus merdeka, memiliki tanah atau menyewa tanah, dan menerima upah dengan harga yang sesuai dengan yang dikehendaki. Hal itu dilakukan dengan asumsi bahwa desa merupakan sumber pangan dan sumber prajurit yang revolusioner yang sangat dibutuhkan oleh PKI. Desa juga dapat dijadikan benteng pertahanan dan tempat persembunyian jika terpukul di perkotaan dan sebagai basis untuk merebut kembali kekuatan di perkotaan.⁹⁶

Kondisi kemiskinan yang dialami petani justru dimanfaatkan oleh PKI untuk menggalang kekuatan massa. Propaganda-propaganda yang dilakukan Aidit ternyata mampu menarik dan memikat kaum tani. Dalam usahanya untuk membangun PKI, Aidit pernah berkata :

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 24

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 43

“Kalau kita mau menang dalam revolusi, kalau kita mau mengubah wajah masyarakat yang setengah jajahan menjadi Indonesia yang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah wajah dunia, maka kita harus mempunyai partai model Partai Komunis Uni Soviet dan model Partai Komunis Cina.”⁹⁷

Jadi, dalam menjalankan misi politiknya, PKI lebih mendasarkan diri pada partai-partai komunis seperti di Cina dan Uni Soviet. Namun dalam melakukan propaganda dalam mengembangkan PKI, lebih disesuaikan dengan kondisi nyata Indonesia, sehingga propaganda-propaganda yang dilakukan menjadi tepat dan terarah.

B. PKI Pada Masa Demokrasi Liberal 1950 – 1959

Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang berdasarkan pada prinsip kebebasan individu. Dalam hal ini, pemerintah hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya, terkecuali menyangkut kepentingan umum. Kebebasan yang menyangkut individu tidak mendapat campur tangan dari pemerintah, akan tetapi menyangkut kepentingan umum tetap dilakukan oleh negara.

Dalam periode 1950 – 1959, disebut sebagai masa demokrasi liberal yang merupakan zaman keemasan bagi kehidupan partai-partai politik di Indonesia. Suatu masa di mana dalam sejarah perjalanan partai-partai politik yang penuh keairahan dan dinamika. Boleh di kata, hampir dalam struktur kenegaraan diperebutkan oleh dan untuk orang partai. Parlemen dikendalikan oleh “orang-orang partai”, karena menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kedudukan kabinet selalu labil yang ditunjukkan dengan sering terjadi

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 25

pergantian kabinet.⁹⁸ Dianutnya sistem ini menyebabkan berkurangnya kekuasaan presiden, mengingat kekuasaan riil sepenuhnya berada di tangan perdana menteri. Oleh karena itu, keadaan partai politik kecuali memiliki kekuasaan politik sekaligus penentu dalam pengambilan keputusan politik, sedangkan kekuasaan presiden dan kaum militer kecil sekali.⁹⁹

Pada masa demokrasi liberal inilah PKI dapat dikatakan “menemukan” dirinya kembali serta bangkit dari “kematian” singkatnya pasca pemberontakan di Madiun 1948. Pada masa ini, PKI mampu “mensejajarkan” dirinya dengan partai-partai besar lainnya. Bahkan PKI termasuk salah satu dari empat partai besar pada saat itu setelah PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan PKI dalam mengembangkan dirinya tentu tidak terlepas dari taktik dan propaganda-propaganda para pimpinan PKI. Namun yang lebih dominan, yaitu D.N. Aidit. Kesadaran bahwa untuk dapat menjadi nomor satu tidaklah cukup dengan basis massa yang besar, namun juga harus didukung dengan kemampuan berpolitik dan dengan kecerdikan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jalan parlemen pun ditempuh, dan untuk dapat duduk dalam pemerintahan, maka PKI harus mampu menarik simpati rakyat. Akal yang cerdas pun digunakan dengan melakukan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang penting. Pada era tahun 50-an, memang ada beberapa partai yang mempunyai basis dukungan yang besar, di antaranya PNI dan Masyumi, dan menurut PKI bahwa yang paling cocok untuk didekati dan diajak kerja sama adalah PNI.

Sebagai partai besar, PNI cukup memegang peranan penting dan mempunyai pengaruh dalam kabinet, sehingga ketika Kabinet Sukiman jatuh pada

⁹⁸ Todiruan Dydo. *op.cit.* hlm 40 – 41

⁹⁹ Muhammad Rusli Karim. *op.cit.* hlm. 27

tahun 1952 sebagai akibat persetujuan *Mutual Security Act* (MSA) dengan Amerika Serikat yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo (Masyumi), CC PKI mengeluarkan pernyataan politik yang pada hakekatnya menawarkan pada PNI untuk membentuk kabinet tanpa Masyumi. Meskipun kemudian dalam kabinet baru yang dibentuk di bawah pimpinan Mr. Wilopo (PNI), ternyata terdapat pula menteri-menteri dari Masyumi, tetapi PKI tetap menyatakan dukungannya walaupun kecewa karena Masyumi diikutsertakan.¹⁰⁰

Sikap dan dukungan yang diberikan oleh PKI bukanlah tanpa imbalan. PKI menginginkan agar semua partai politik yang ada pada waktu itu menghilangkan kecurigaan dan sikap anti PKI. Usaha dan propaganda yang dilakukan PKI memang tidak sia-sia. PNI mulai menjalin kerja sama dengan PKI. Puncak kerja sama ini adalah dengan jatuhnya Kabinet Wilopo oleh PNI sendiri walaupun notabene pemimpin kabinet tersebut adalah dari kalangan PNI sendiri. Diduga penyebabnya adalah akibat adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Setelah berhasil menjatuhkan kabinet tersebut, PKI menuntut agar segera dibentuk kabinet baru tanpa melibatkan Partai Sosialis dan Masyumi. Kemudian terbentuklah Kabinet Mr. Ali Sastroamijoyo I. Terhadap kabinet baru ini, PKI dengan nyata memberikan dukungannya bahkan PKI dengan gigih membela kabinet ini yang identik dengan PNI tersebut.¹⁰¹

PKI berjuang dengan gigih agar kabinet tersebut tetap bertahan dan PKI siap membela jika ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan kabinet yang baru

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 26

¹⁰¹ Eric A. Nordlinger. *Militer Dalam Politik*. Rineka Cipta. Jakarta. 1990. hlm. 127

terbentuk tersebut walaupun dalam kenyatannya kabinet tersebut gagal mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia kala itu.

Puncaknya ketika Pemilu tahun 1955, di mana PKI unggul dengan enam juta suara. Ini adalah suatu prestasi besar yang diperoleh partai yang sebelumnya sempat “mati suri” tersebut. Walaupun di dalam pemilu PKI unggul dan termasuk dalam empat partai besar, namun PKI gagal duduk dalam kabinet yang terbentuk sesudahnya. Walaupun Presiden Sukarno yang dari awal sudah menaruh simpati yang besar pada PKI dan menginginkan agar PKI diikutsertakan dalam kabinet, dengan pertimbangan bahwa PKI berhasil mengumpulkan suara yang cukup besar dalam pemilu. Namun usaha Presiden Sukarno tersebut tidak berhasil.¹⁰² Pengaruh NU dan Masyumi cukup mampu menjegal masuknya PKI dalam kabinet. Kabinet yang terbentuk itu dinamakan Kabinet Ali Sastroamijoyo II.

Gagalnya PKI untuk masuk dalam kabinet tersebut tidak berarti bahwa PKI akan berhenti sampai di situ, bukan juga berarti bahwa PKI telah kehabisan peluang dan kesempatan. Berpisahnya Dwi Tunggal Sukarno-Hatta pada tahun 1956 telah memberi angin segar dan peluang yang sangat menguntungkan bagi PKI, karena PKI akan semakin leluasa untuk mendekati Presiden Sukarno. Usaha PKI ini memang tidak sia-sia. PKI menjadi dekat dengan beliau, puncaknya ketika PKI memberikan dukungan penuh tatkala Presiden Sukarno mengemukakan konsep yang kemudian dikenal dengan konsep Demokrasi Terpimpin, dengan alasan untuk menyelamatkan negara dari perpecahan karena banyak terjadi ketegangan-ketegangan politik pada masa pemerintahan kabinet Ali

¹⁰² *Ibid.* hlm 137

Sastroamijoyo II. PKI mendukung penuh konsep tersebut dan kemudian duduk dalam Kabinet Goto ng-Royong yang dibentuk oleh Presiden Sukarno walaupun banyak kalangan yang menentang.¹⁰³

Perkembangan pengaruh komunis di tingkat nasional pada awal 1960 an mendapat angin segar dari Presiden Sukarno yaitu dengan dikumandangkannya konsep Nasakom sebagai panduan politik di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah demi terciptanya keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang bersaing di Indonesia dan mencegah kemungkinan perebutan dominasi satu terhadap yang lain termasuk AD. Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia pada awal tahun 60 an semakin membuat PKI berada dalam posisi yang diuntungkan, sebab sedari awal partai ini dikenal sebagai kekuatan yang berpihak kepada petani miskin dan mengkampanyekan reformasi agraria.¹⁰⁴ Oleh karena konsep Nasakom pada masa itu sedang berada di atas angin, dengan Presiden Sukarno sebagai punggawanya membuat PKI berada dalam posisi terhormat di mata rakyat.¹⁰⁵

Walaupun pada masa demokrasi liberal PKI kurang mengalami perkembangan berarti, namun telah membuka jalan bagi PKI untuk lebih dekat dengan Presiden Sukarno yang kelak pada masa Demokrasi Terpimpin akan menjalin aliansi dengan PKI dan beliau akan menjadi tempat bernaungnya PKI. Dengan demikian, maka posisi PKI akan semakin kuat, dan TNI AD yang antipati terhadap PKI tidak dapat berbuat gegabah terhadap PKI, karena menentang PKI sama dengan menentang Presiden Sukarno.¹⁰⁶

¹⁰³ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 92

¹⁰⁴ R.A.F Paul Webb dan Steven Farram, *Di PKI Kan Tragedi 1965 dan Kaum Nasrani di Indonesia Timur*, Syarikat, Yogyakarta, 2005, hlm.85

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm 99

¹⁰⁶ *Ibid.* hlm 103

B. PKI Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada bulan Februari 1957, Presiden Sukarno memperkenalkan konsepsi baru yang diharapkan mampu mengubah situasi akibat dipakainya demokrasi parlementer di Indonesia. Konsepsi ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang menolak Kabinet Gotong-Royong yang dibentuk Presiden Sukarno karena PKI masuk di dalamnya dengan berbagai alasan. Namun, Presiden Sukarno tetap teguh pada pendiriannya untuk melaksanakan konsepsi tersebut. Keteguhan hati beliau untuk menjalankan konsepsi itu menjadi jelas ketika konstituante gagal melaksanakan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru dan akhirnya memunculkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹⁰⁷

Dengan Dekrit tersebut telah memperkenalkan suatu babak baru yang didasarkan pada keseimbangan kekuatan dengan titik kekuatan bertumpu pada Presiden Sukarno.¹⁰⁸ Hal tersebut berarti bahwa Presiden Sukarno menjadi pusat kekuatan di Indonesia dan peranan partai-partai politik menjadi berkurang.

Lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dengan menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan pembubaran konstituante, sebenarnya dimaksudkan untuk mengatasi segala kemelut politik yang terjadi di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Dekrit tersebut dikenal sebagai tonggak sejarah peralihan dari era Demokrasi Liberal ke era Demokrasi Terpimpin.¹⁰⁹ Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PKI berkembang makin pesat. Hal ini terutama adalah karena PKI mahir dalam memanfaatkan momentum perkembangan politik

¹⁰⁷ John D. Legge. *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Sinar Harapan. Jakarta. 1985. hlm. 351

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm 358

¹⁰⁹ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, CV Muliasari, Jakarta, 1991, hlm.52 -53

nasional serta mentransformasikan program partai ke dalam program pemerintah. PKI juga mempunyai seni tersendiri dalam menempatkan tokoh-tokoh pemikirnya atau tokoh-tokoh pemikir lain yang berhasil dipengaruhinya, dalam posisi formal dan proses konseptualisasi gagasan politik dan doktrin perjuangan seperti konsep-konsep manifesto politik (Manipol) dan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom).¹¹⁰

Sungguh jelas bahwa dengan Demokrasi Terpimpinnya, Presiden Sukarno ingin menjadi sentral kekuatan politik dan peran partai-partai politik menjadi berkurang. Hal tersebut nampak dalam penyusunan kabinet yang menunjukkan kurangnya peran partai, karena mereka yang duduk dalam kabinet diharapkan melepaskan diri dari kepartaian mereka sejak pelantikan. Dalam kabinet sebelumnya, menteri-menteri yang duduk menjabat adalah anggota-anggota partai. Oleh karena itu, kabinet ini dianggap sebagai kabinet non partai dan komposisinya menunjukkan semakin hilangnya pengaruh kepartaian.¹¹¹

Setelah Konstituante hasil pemilu tahun 1955 gagal menyusun undang-undang dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Sukarno selanjutnya meminta kepada Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung (DPA) agar isi pidato tersebut dirumuskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Yang memimpin panitia tersebut adalah D.N. Aidit, Ketua CC PKI. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk memasukkan program-program PKI ke dalam GBHN, yang kemudian

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.65

¹¹¹ Hendri Supriyatmon, Nasution. *Dwi Fungsi ABRI dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik*. Sebelas Maret University Press. Surakarta. 1994. hlm. 28

dikenal sebagai Manifesto Politik (Manipol) Republik Indonesia. D.N. Aidit berusaha memanfaatkan kedudukannya itu untuk merumuskan isi Manipol sesuai dengan tesis revolusi PKI, yaitu “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia” (MIRI), yang dirumuskan PKI pada tahun 1957, dua tahun sebelum Presiden Sukarno mengucapkan pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Meskipun upaya PKI untuk mendominasi isi Manipol sesuai dengan konsep MIRI, mendapat hambatan yang gigih dari tokoh-tokoh anti komunis di DPA. Namun, konsep Manipol yang akhirnya disetujui Presiden Sukarno tersebut memiliki kesamaan jiwa antara pokok-pokok masalah yang diuraikan dalam Manipol dan pokok-pokok masalah yang menjadi konsep MIRI.¹¹²

Usaha Presiden Sukarno dalam meletakkan posisi partai politik di bawah kontrolnya atau bila mungkin menghapuskannya, dilaksanakan dengan ketat. Untuk itu, maka beliau mengeluarkan Penpres Penyederhanaan Sistem Kepartaian, yang dalam salah satu isinya menyebutkan bahwa presiden bisa memerintahkan pemeriksaan dalam administrasi keuangan dan kehidupan partai serta presiden bisa menolak program tiap partai yang diprogramkan. Hal ini tentu saja membuat partai-partai semakin tidak berdaya karena sampai urusan yang bersifat intern partai pun wajib diketahui oleh Presiden Sukarno.¹¹³

Usaha Presiden Sukarno untuk mengurangi peran partai dalam pemerintahan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. UU tahun 1960 juga dijadikan alat oleh Presiden Sukarno untuk mengurangi peran partai-partai politik dalam pemerintahan, kecuali sepuluh partai yang dilindungi pemerintah termasuk

¹¹² *Ibid*, hlm. 47

¹¹³ *Ibid*, hlm. 54

PKI. Hal ini menyebabkan partai-partai lainnya semakin tunduk pada pemerintah dan semakin kecil peranannya. Namun dalam hal ini, PKI justru mengalami nasib yang berbeda dengan yang dialami oleh partai-partai politik lainnya.

Berbeda halnya dengan PKI, bila partai-partai lain relatif tidak punya suara lagi dalam penentuan nasib negara dalam demokrasi terpimpin, PKI setahap demi setahap mampu bangkit menjadi satu partai yang kuat dan patut dipertimbangkan. Sejak pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, PKI merupakan satu partai yang sakit parah dan tidak membahayakan serta tidak masuk perhitungan partai-partai lain. Organisasinya kacau, keanggotannya tercecer dan tidak beraturan, bahkan di masa Kabinet Sukiman tahun 1952 diadakan pembersihan, di mana anggota PKI yang mula-mula berjumlah 100.000 orang menyusut menjadi 7.910 orang anggota.¹¹⁴

Sejak itu kondisi PKI memang tidak menguntungkan bagi anggota-anggotanya. Namun kondisi itu berbalik ketika D.N. Aidit tampil sebagai pemimpin PKI, dan kehadiran dia adalah “nafas” baru bagi kebangkitan kembali PKI. PKI kemudian bangkit dan berkembang menjadi partai besar dan sangat diperhitungkan.

Perkembangan PKI yang semakin pesat itu nampak dalam penambahan jumlah anggota (massa) PKI yang meningkat drastis dari 7.910 orang menjadi 400 ribu orang, dan menjadi semakin kuat dengan bertambah menjadi 3,5 juta anggota. Dukungan massa yang begitu besar menjadi kekuatan tersendiri bagi PKI. Akibat dukungan PKI terhadap PNI, mengakibatkan PNI bertentangan

¹¹⁴, *Dari Madiun ke Lubang Buaya, Dari Lubang Buaya ke....*, Kursus Kader Katholik. Jakarta. 1967. hlm. 37

dengan Masyumi. Hal ini justru semakin menguntungkan PKI karena PKI menjadi semakin mudah untuk menyusup ke dalam partai itu. PKI pun semakin mempunyai kekuatan untuk menentang ataupun menyerang partai-partai yang anti komunis, seperti PSI dan Masyumi. Selain karena memang PKI mempunyai dukungan massa yang besar, PKI juga didukung penuh oleh pemerintah.

Dengan basis dukungan massa yang besar dan didukung propaganda pemimpin PKI yang cerdas bahkan cenderung licik, PKI berhasil “memikat” Presiden Sukarno. Sifat PKI yang revolusioner menjadi pertimbangan tersendiri bagi Sukarno. Dengan taktik yang cermat, PKI selalu mendukung segala kebijakan Sukarno. Dukungan penuh dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh PKI ini membuat hubungan PKI dan Presiden Sukarno semakin dekat. Presiden Sukarno sendiri melihat bahwa kehadiran PKI akan semakin memperkuat kedudukannya terutama dalam menghadapi TNI AD yang telah muncul sebagai kekuatan politik non partai setelah tahun 1957 karena keberhasilannya menumpas pemberontakan daerah. Oleh karena pertimbangan itulah Presiden Sukarno melakukan aliansi dengan PKI karena massa PKI yang begitu besar serta sifatnya yang revolusioner dapat menjadi “backing“ untuk menghadapi kemungkinan jika kekuatan AD akan mengancam kekuasaannya.

Siasat yang dijalankan PKI memang ampuh. Dengan melakukan aliansi dengan Presiden Sukarno, posisi PKI menjadi semakin kokoh. TNI AD tidak akan berani gegabah terhadap PKI yang berada dalam lindungan presiden. Sekilas mata memandang tampak bahwa presiden begitu “menganak-emaskan” PKI. Perlindungan Sukarno terhadap PKI serta kebijakan-kebijakan Sukarno yang semakin mempermudah ruang gerak PKI untuk berkembang semakin dimanfaatkan oleh PKI. Idealisme Sukarno yang ingin mempersatukan kekuatan

kekuatan nasionalis, agama serta komunis sangat membantu tumbuhnya PKI. PKI pun tumbuh menjadi satu kekuatan baru untuk menjadi pendukung Presiden Sukarno.¹¹⁵

PKI lincah membina hubungan dengan Sukarno secara berangsur-angsur memakai cara selalu mendukung dan memuji Bung Karno.¹¹⁶ Ini semua tentu saja untuk dapat merebut simpati serta perlindungan dari beliau. Posisi ini semakin sulit karena PKI yang menjadi musuh TNI AD justru berada dalam perlindungan presiden. Kecemasan Presiden Sukarno terhadap TNI AD bukannya tidak beralasan. TNI AD yang muncul sebagai kekuatan baru dianggap ancaman oleh Sukarno, ditambah sikap antipati TNI AD terhadap PKI semakin memperkuat kecurigaannya.¹¹⁷

Martial Law menjadi senjata AD untuk mengatur pemerintahan sekaligus perlahan-lahan menjadi senjata untuk menyerang PKI. Berbagai cara diupayakan untuk menyerang PKI, seperti menyensor setiap pidato yang akan dibacakan, pelarangan terbit surat kabar yang berafiliasi dengan PKI, mengirim intel penyusup ke dalam setiap pertemuan yang diadakan. Akan tetapi karena kepandaian PKI dalam mengidentifikasikan diri dengan Presiden Sukarno dan menjadikannya sebagai pelindung, PKI tetap selamat dari serangan TNI AD. Bagaimanapun juga, AD tidak dapat berbuat gegabah. PKI yang berada di bawah bayang-bayang Presiden Sukarno cukup aman, karena suatu tindakan pelarangan PKI akan berarti suatu tantangan langsung kepada presiden.¹¹⁸ Dengan demikian,

¹¹⁵ *Ibid*, hlm.36

¹¹⁶ A.H. Nasution. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Gunung Agung. Jakarta.1976. hlm. 27

¹¹⁷ *Ibid*, hlm.38

¹¹⁸ Ulf Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3ES. Jakarta. 1986. hlm. 256

semakin kokohlah posisi PKI di bawah kekuasaan Presiden Sukarno dengan demokrasi terpimpin yang dijelankannya.

Kekuatan lain di Indonesia adalah Sukarno. Ia tidak mempunyai satu partai tertentu, tetapi ia dapat mengembangkan suatu pola permainan politik sedemikian rupa sehingga ia terasa dibutuhkan oleh kekuatan politik dan sosial.¹¹⁹ Demokrasi terpimpin ciptaannya ia pakai sebagai alat untuk memusatkan kekuasaan. Secara berangsur-angsur mengkonsolidasikan posisi politiknya selaku kepala pemerintahan menurut UUD 1945, mempraktekkan secara nyata jabatan tertinggi serta penguasaan perang tertinggi, sehingga kekuasaan terpusat di tangannya.¹²⁰

Dalam menjalankan kekuasaannya, Presiden Sukarno tetaplah membutuhkan TNI AD dan PKI, terutama sebagai partner untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pusat ke daerah, karena baik TNI AD maupun PKI pengaruhnya sudah masuk ke pelosok-pelosok dan terorganisir dengan baik. PKI yang progresif dijadikan alat pengimbang kekuatan TNI AD, sedangkan Sukarno sebagai penengah. Sukarno sebagai penengah menjaga keseimbangan pengaruh antara kedua kekuatan itu.

Kenyataannya, sedikit demi sedikit Sukarno mulai condong ke kiri dan mulai mengurangi peran TNI AD. Hal ini disebabkan karena kekhawatirannya akan terjadi kup militer. PKI juga sanggup memenuhi kewajibannya mempertahankan agitasi politik presiden atau juga karena kecurigaan presiden terhadap TNI AD. Karena perwira-perwiranya menginginkan pemerintahan yang dipimpin atau tergantung pada TNI AD, sedang lawan-lawan politiknya, yaitu

¹¹⁹ G. Mudjanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 op.cit.* hlm 12

¹²⁰ Nasution. *Memenuhi Panggilan Tugas op.cit.* hlm. 1

Hatta dan Masyumi mungkin akan memegang peranan yang besar di dalamnya. Karenanya, presiden membutuhkan kawan yang dapat diandalkan, yaitu PKI.¹²¹

PKI semakin berada di atas angin ketika Presiden Sukarno membentuk Front Nasional. PKI semakin berani menantang TNI AD dengan mengatakan bahwa TNI AD tidak sungguh-sungguh menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. TNI AD menolak tuduhan tersebut dan berusaha membekukan berbagai kegiatan PKI atas dasar UU keadaan bahaya pada waktu itu. Tokoh PKI juga ditangkap dan media massa PKI juga dilarang terbit, bahkan kepada Presiden Sukarno pun telah diperingatkan agar berhati-hati pada loyalitas PKI. Namun, Presiden Sukarno tidak peduli bahkan sebaliknya, Presiden Sukarno memperingatkan TNI AD agar tidak bersikap *fobi* terhadap PKI. Peringatan itu dipertegas oleh Presiden Sukarno dalam pidato tanggal 17 Agustus 1960, yang berjudul “Laksana Malaikat Yang Menyerbu Dari Langit Jalannya Revolusi Kita”, yang di dalamnya Presiden Sukarno mengutuk orang-orang yang disebutnya komunisto-fobi. Dengan demikian, PKI makin lama makin mempunyai peluang untuk mengembangkan pengaruhnya.¹²²

PKI pun mulai merangkul golongan lain untuk memperoleh perimbangan kekuatan, yang mereka sebut sebagai *ofensif manipolis*. Sekedar untuk menegakkan eksistensinya, PKI mula-mula menyatakan menerima UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, dalam perkembangannya, PKI menampilkan interpretasinya sendiri dengan mengatakan bahwa Pancasila hanyalah sekedar alat pemersatu, bahkan Nyoto menyerang pernyataan golongan Islam bahwa Pancasila

¹²¹ G. Moeddjanto. *Demokrasi Terpimpin*. SPPS. IKIP Sanata Dharma. Yogyakarta. 1989. hlm. 12

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. *op.cit.* hlm. 31

adalah semangat toleransi yang bersumber pada kekuasaan Allah sebagai tulang punggung dari pokok-pokok Pancasila.¹²³

Tema Pancasila sebagai alat pemersatu pernah menimbulkan masalah yang terkenal dengan Heboh Pancasila, yang bermula dari ceramah Aidit di depan para peserta pendidikan kader revolusi bulan Oktober 1964. Ia mengatakan :

“...dan di sinilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu, sebab kalau sudah ‘satu’ semua....Pancasila ndak perlu lagi, sebab Pancasila alat pemersatu....Landasan ideal Pancasila yang lahir pada tahun 1945 adalah Nasakom, dan Pancasila merupakan falsafah persatuan dari Nasion Indonesia.”¹²⁴

Namun heboh itu tidak berlangsung lama setelah Presiden Sukarno memanggil semua parpol dan pihak yang terkait, dan mengajak semua kalangan untuk bersama-sama mendukung Pancasila. PKI pun selamat dan dapat meneruskan aksi-aksinya dengan aman. Posisi PKI makin kuat dengan dibentuknya Kabinet Dwikora tahun 1964, di mana di dalamnya duduk beberapa orang tokoh PKI dan hal itu disambut gembira oleh PKI.

Tahun 1963, PKI bertentangan dengan partai Murba karena salah satu anggota partai Murba menemukan dokumen CC PKI yang berisi program rahasia yang berjudul “Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini”, yang berisi rencana aksi untuk mewujudkan tujuan akhir PKI. Situasi politik pun semakin tegang. Namun PKI berhasil meyakinkan Sukarno, dan ini adalah awal kejatuhan partai Murba. Dengan propagandanya, PKI dan Soebandrio selaku PM I meminta kepada presiden Sukarno untuk membekukan partai Murba, sehingga pada tanggal 5 Januari 1965 keluarlah keputusan presiden mengenai pembekuan partai Murba.

¹²³ *Ibid.* hlm 32

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 33

Tampaklah di sini PKI berusaha menggilas semua lawan politiknya dengan berlindung pada Presiden Sukarno.

C. Situasi Politik Indonesia Pada Saat Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965

Di saat menjelang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 pasca Demokrasi Terpimpin, posisi PKI memang baik, karena Presiden Sukarno sangat melindungi PKI. PKI sendiri secara tidak langsung adalah salah satu kekuatan Presiden Sukarno, sehingga membuat TNI AD “antipati” terhadap PKI.

Meningkatnya suhu politik saat itu, jelas berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa pengganti Sukarno bila beliau wafat. Saat itu, hanya ada dua kandidat yang sering disebut-sebut, yaitu Letjen. A. Yani dan Jenderal A.H. Nasution. Di sisi lain, pihak komunis tidak menginginkan tampilnya pimpinan AD sebagai pengganti Sukarno, karena sebagai pengalaman konfrontasi tajam antara AD dan PKI.¹²⁵

Dalam keadaan tegang diliputi pertentangan politik antara PKI dengan TNI AD, terdengar berita bahwa Presiden Sukarno jatuh sakit. Setelah didapat kepastian dari hasil diagnosa tim ahli para dokter dari RRC yang ditemui Aidit, diketahui bahwa karena penyakitnya sangat parah, maka tidak lama lagi Sukarno akan meninggal dunia. Padahal satu-satunya tempat berlindung PKI hanyalah tinggal pada Sukarno. Maka, jika beliau meninggal sudah dapat dibayangkan bahwa TNI AD akan mengganyang PKI habis-habisan.¹²⁶

¹²⁵ Proyek Historiografi Center for Analysis. *Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2005. hlm. 4

¹²⁶ Todiruan Dydo. *op.cit.* hlm. 77 – 78

Suhu politik tahun 1965 semakin panas karena jatuh sakitnya Sukarno dan kecemasan PKI jika sewaktu-waktu TNI AD akan “mengganyang” mereka. Isu sakitnya Sukarno membuat “kocar-kacir” di kalangan PKI. D.N. Aidit selaku pimpinan PKI terbawa oleh bayangannya sendiri yang mengerikan. Maka untuk menyelamatkan PKI, Aidit berusaha meyakinkan kalangan CC PKI dengan suatu gagasan bahwa ada “Dewan Jenderal” di dalam Angkatan Darat yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Adapun Dewan Jenderal itu diduga disponsori oleh CIA, dan oleh karena itu, para Jenderal yang tergabung dalam dewan tersebut harus ditangkap untuk menyelamatkan presiden dan revolusi Indonesia.

Tetapi, benakah memang ada Dewan Jenderal, dan jika ada, apa tujuannya dan bagaimana hubungan-hubungannya dengan pihak luar negeri? Selain itu, siapakah yang telah menyampaikan informasi itu kepada perwira-perwira di sekitar Untung, dan demikian menghasut mereka untuk menangkap dan kemudian membunuh orang-orang yang dituduh menjadi anggota dewan itu?¹²⁷ Cerita tentang adanya Dewan Jenderal yang merencanakan untuk menggulingkan pemerintah telah diinjeksikan ke dalam pasar kabar angin di Jakarta sekitar bulan Maret 1965.¹²⁸

Apapun yang terjadi tentang isu adanya tokoh-tokoh Jenderal dalam TNI AD yang tergabung dalam Dewan Jenderal, yang akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965 yang bertepatan dengan HUT ABRI, hanyalah suatu alibi PKI untuk menyelamatkan diri dari situasi genting. Selain itu, tentu saja untuk mendiskreditkan TNI AD di mata Presiden Sukarno.

¹²⁷ Ulf Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945 – 1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3ES. Jakarta. hlm. 350

¹²⁸ *Ibid.* hlm. 350

Walaupun berita dan desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang bekerja sama dengan Nekolim akan melakukan kudeta sekalipun, nampaknya masuk akal. Akan tetapi, tidak dapat dibuktikan, dan malah sebaliknya, seperti terungkap kemudian bahwa desas-desus mengenai Dewan Jenderal sebagaimana dipersoalkan itu hanya merupakan *propaganda* dari PKI untuk menyudutkan posisi politik TNI AD.¹²⁹

Belum reda isu tentang adanya Dewan Jenderal di dalam tubuh TNI AD, kemudian menyusul isu tentang dokumen *Gilchrist* yang ditemukan oleh Pemuda Rakyat pada saat melakukan demonstrasi di Kedutaan Inggris. Intinya, dokumen tersebut merinci rencana kudeta yang akan dilakukan TNI AD pada saat Peringatan Hari ABRI. Sebelumnya, Soebandrio telah memperlihatkan sebuah dokumen kepada Presiden Sukarno yang kemudian dikenal dengan “Surat Gilchrist”. Dokumen itu berupa sebuah konsep telegram yang diketik dari Duta Besar Inggris, Gilchrist, kepada Kementerian Luar Negeri di London, menyiratkan bahwa semacam operasi yang sedang direncanakan oleh Dubes Inggris dan Dubes Amerika Serikat, dan bahwa TNI AD juga terlibat.¹³⁰ Walaupun ada kesangsian mengenai keotentikan surat tersebut itu, Presiden Sukarno segera memanggil semua Panglima Angkatan Bersenjata ke Istana.¹³¹

Dalam pertemuan tersebut, Letjen. A. Yani langsung mengatakan ketidakbenaran dokumen itu,¹³² ketika Presiden Sukarno menanyakan kebenaran isu Dewan Jenderal, Letjen. A. Yani mengatakan bahwa memang ada sebuah

¹²⁹ Yahya Muhaimin. *Perkembangan Politik Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945 – 1966*. Gadjah Mada University Press. 1982. hlm. 179

¹³⁰ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm. 351

¹³¹ *Ibid.* hlm. 352

¹³² Todiruan Dydo. *op.cit.* hlm. 78

badan yang sering diberi nama itu, akan tetapi nama sebenarnya adalah Dewan Jabatan dan Pangkatan Perwira Tertinggi (Wanjabti), dan bahwa fungsinya semata-mata untuk bermusyawarah mengenai soal kenaikan pangkat dan penugasan para Jenderal dan Kolonel Penuh.¹³³

Melihat tidak adanya bahan-bahan bukti tentang akan adanya suatu kudeta dari pihak Dewan Jenderal seperti yang dikatakan oleh Soebandrio dan Aidit dalam pernyataan-pernyataan mereka di muka umum, masuk akal kiranya untuk mengandaikan bahwa Untung dan pembantu-pembantunya tentu telah dihasut sebelum mereka melancarkan gerakan yang luar biasa itu. Sukarno sendiri cenderung untuk percaya karena memang beliau dikelilingi orang-orang PKI. Hal tersebut berpuncak pada meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965, melalui suatu *turning point* dalam perkembangan politik nasional Indonesia. Selama Republik Indonesia berdiri, kejadian ini adalah yang paling mengancam eksistensi dan keutuhan negara.¹³⁴ Namun paling tidak telah gugur enam Jenderal TNI AD dalam tragedi berdarah 1 Oktober 1965. Hanya yang masih menjadi tanda tanya besar adalah jika memang tujuan dari Gerakan 30 September adalah Jenderal-Jenderal besar TNI AD, mengapa justru Mayjen Soeharto tidak “di apa-apakan” dalam peristiwa tersebut?

2. Latar Belakang Sosial Ekonomi

Pada tahun 1959, Bangsa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan harapan agar segala urusan negara dan rakyat dilakukan

¹³³ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm. 352

¹³⁴ Yahya Muhaimin *op.cit.* hlm. 183

berdasarkan UUD tersebut. Namun ternyata harapan dan hasrat rakyat untuk menikmati kehidupan yang demokratis dan sejahtera belumlah terpenuhi. Pelaksanaan UUD 1945 yang tidak murni dan konsekuen sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan pula ketidakstabilan di bidang politik dan ekonomi.

Keadaan yang sungguh-sungguh membingungkan rakyat ini ditambah lagi dengan terjadinya konfrontasi dengan Malaysia sehingga menyebabkan kondisi perekonomian rakyat menjadi bertambah parah mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan hampir tidak terbeli oleh rakyat. Kabut penderitaan semakin menyelubungi kehidupan rakyat karena di samping adanya segolongan kecil (elite) rakyat yang hidup mewah berlebihan yaitu golongan yang mendapat angin dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang perekonomian. Perbedaan tingkatan hidup dari kedua golongan ini antara yang kaya dan yang miskin menjadi semakin besar.¹³⁵

Ketidakstabilan kondisi politik Indonesia ini berimbas pada terjadinya kesulitan ekonomi dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat kecil. Penderitaan rakyat ini semakin diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang semakin membumbung tinggi sehingga semakin menambah parah keterpurukan perekonomian bangsa Indonesia. Kesengsaraan ini terlebih dirasakan oleh rakyat miskin dan petani yang tinggal di pedesaan.¹³⁶

Kesejahteraan rakyat jauh merosot, antara lain karena laju inflasi yang mencapai 65%. Dalam suasana demikian, pada tanggal 13 Desember 1965 diumumkanlah keputusan pemerintah tentang kebijaksanaan di bidang ekonomi. Pokok isinya adalah tentang devaluasi nilai rupiah yaitu dari nilai Rp. 1000,00

¹³⁵ C.S.T Kansil, *Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 46

¹³⁶ *Ibid*, hlm.52

uang lama diturunkan menjadi Rp. 1,00 uang baru. Ketegangan mencapai puncaknya dengan ditetapkan kenaikan harga minyak bumi dan bahan bakar yang akibatnya sangat terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.¹³⁷

Sejak periode 1960-1961, keadaan neraca perdagangan Indonesia bukannya menampakkan suatu kemajuan, malah menunjukkan perkembangan yang lebih memburuk. Index biaya hidup menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat di mana dari tahun 1961 mengalami kenaikan 70%. Pada tahun 1962 dalam waktu tiga bulan atau kenaikan 225% bila dibandingkan dengan angka index tahun 1960. Meskipun pemerintah telah berusaha memperbanyak ekspor Indonesia, tetapi hal itu belum berhasil karena para eksportir masih selalu berorientasi pada barang eksportir tradisional Indonesia, seperti karet, kopra dan lain sebagainya.¹³⁸

Pada masa Demokrasi Terpimpin, sempat terjadi kekacauan ekonomi yang diakibatkan semakin meningkatnya inflasi. Maka dalam rangka mengendalikan inflasi, pada tanggal 25 Agustus 1959, mata uang rupiah di devaluasikan sebesar 75%, semua nilai uang kertas Rp. 500,00 dan Rp. 1000,00 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya, dan deposito-deposito bank yang besar jumlahnya dibekukan. Tindakan ini mengurangi jumlah pasokan uang dari Rp. 34 milyar menjadi Rp. 21 milyar dengan sekali pukul.¹³⁹

Kesukaran ekonomi belum teratasi pada saat RI mulai menggunakan kembali UUD 1945. Salah satu tindakan untuk menyehatkan keuangan negara yang dilanda inflasi ialah dengan pengebirian nilai rupiah yang diumumkan oleh

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 52

¹³⁸ Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VII*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hlm. 109-110

¹³⁹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2005, hlm.511

pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1959 hingga rupiah bernilai 10% saja dari nilai nominal. Akibatnya pendapatan masyarakat dari hasil pertanian dan peternakan menurun drastis.¹⁴⁰

Pada saat pengebirian nilai rupiah memang harga-harga barang menjadi murah, tetapi tidak terbeli oleh rakyat banyak karena tidak memiliki uang. Akan tetapi jumlah uang kemudian bertambah dengan cepat dan harga-harga barangpun membumbung dengan cepat pula. Peningkatan harga yang drastis ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penghasilan negara memang berkurang yang disertai dengan gangguan keamanan akibat pergolakan daerah menyebabkan ekspor menurun dan tidak segera pulih.
2. Pengambilalihan perusahaan Belanda nyaris menguntungkan kalau saja Indonesia mempunyai tenaga-tenaga manajemen yang cakap dan berpengalaman.
3. Indonesia pada tahun 1962 menjadi penyelenggara Asian Games IV, di mana penyelenggaraan ini memerlukan persiapan seperti pembangunan sarana pertandingan dan akomodasi yang memerlukan biaya yang besar, misalnya Kompleks Senayan dan Hotel Indonesia.
4. Presiden Sukarno makin senang mengadakan perjalanan ke luar negeri yang memakan biaya besar, yang tidak diimbangi pemasukan modal asing ke Indonesia yang diperlukan untuk membangun.
5. Modal asing memang tidak tertarik masuk ke Indonesia karena iklim politik Indonesia yang memang terlalu panas untuk masuknya modal asing.
6. RI sedang mengerahkan segala kekuatannya untuk membebaskan Irian Barat.¹⁴¹

¹⁴⁰ G.Moedjanto, *Indonesia Abad 20 Jilid 2*, op.cit,hlm.116

Strategi dasar ekonomi terpimpin yang ditempuh pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahap pertama berusaha menciptakan susunan ekonomi yang bersifat demokratis dan bersih, namun dalam prakteknya ekonomi terpimpin berubah menjadi sistem lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang-orang yang dekat dengan istana. Ekonomi diatur tanpa menghiraukan pengawasan efektif dari DPR, sedang hukum-hukum ekonomi tidak dipercaya. Prinsip anggaran belanja berimbang tak pernah dijalankan, begitu juga prinsip keseimbangan antara ekspor dan impor, antara arus uang dan arus barang serta antara persediaan dan kesempatan kerja dengan penambahan penduduk. Selain itu juga asas efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber ekonomi, perlunya asas investasi bagi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya asas keadilan tidak dilaksanakan.¹⁴²

Anggaran pendapatan dan belanja negara masih tetap merupakan sumber terbesar bagi timbulnya inflasi. Untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi ini, pemerintah membentuk Komando Tertinggi Ekonomi (KOTOE). Akan tetapi dengan adanya pengeluaran belanja negara yang jauh lebih besar daripada penerimaan, menyebabkan inflasi terus meningkat yang berakibat buruk bagi kehidupan dan perkembangan ekonomi serta sosial budaya. Ternyata KOTOE tidak berhasil mengatasi keadaan ini.¹⁴³

Sekali lagi pemerintah berusaha menjalankan perbaikan ekonomi dengan jalan mengeluarkan Deklarasi Ekonomi pada bulan Mei 1963, namun deklarasi ini gagal dan tidak terlaksana. Namun yang paling mencolok dalam Demokrasi

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.118

¹⁴² M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, *op.cit.* hlm 531

¹⁴³ *Ibid*, hlm.533

Terpimpin adalah penyelewengan-penyelewengan yang menyangkut pemberian *deferred payment* untuk Dana Revolusi yang mengakibatkan kacaunya kondisi keuangan, ditambah lagi dengan adanya proyek-proyek mercusuar yang membuat inflasi semakin melonjak curam ke atas.¹⁴⁴

Kondisi perekonomian masyarakat sangat buruk yang diakibatkan semakin lajunya tingkat inflasi, harga-harga barang kebutuhan hidup melonjak tajam sehingga berdampak pula pada anjloknya daya beli masyarakat. Namun yang paling berpengaruh adalah naiknya harga kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Nilai tukar rupiah di pasar bebas telah merosot tajam, di mana Satu Dollar yang beberapa hari sudah mencapai kurs Rp. 100,00 kemudian turun menjadi Rp. 92,00. Satu Dollar kurs kurang lebih Rp. 270,00.¹⁴⁵

Sebagai contoh melonjaknya harga beberapa jenis kebutuhan pokok masyarakat seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel contoh kenaikan harga beberapa jenis kebutuhan pokok tahun 1961

Nama Barang	Harga Sebelum Inflasi	Harga Sesudah Inflasi
Telur Ayam/butir	Rp. 3,00,-	Rp. 4,50,-
Beras kualitas sedang/lter	Rp. 5,00-	Rp. 12,00-
Gula/kg	Rp. 12,00-	Rp. 20,00-
Tepung Terigu/kg	Rp. 4,00-	Rp. 15,00-

¹⁴⁴ William h. Frederick, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, LP3ES, Jakarta, 1982, hlm. 387

¹⁴⁵ Rosihan Anwar, *Sebelum Prahra, Pergolakan Politik Indonesia 1961 -1965*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.119

Roti Tawar/potong	Rp. 40,00-	Rp. 60,00-
Beras kualitas baik/liter	Rp. _____	Rp. 40,00-

Melonjaknya harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, akibatnya masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin hari kehidupan rakyat semakin menderita. Sebagai contoh misalnya di daerah Garut-Tasikmalaya, rakyat sudah biasa mengambil akar umbi-umbian untuk dimakan, atau ubi yang masih muda lantas kemudian digali untuk dimakan. Daun singkong yang dulu tidak begitu digemari, kini sudah habis dilalap. Saking susahnyanya membeli beras, menyebabkan penyakit busung lapar melanda daerah Temanggung dan sekitarnya.¹⁴⁶

Kondisi perekonomian terus menunjukkan gejala memburuk. Pada tahun 1964 harga bahan makanan sehari-hari menunjukkan gejala peningkatan yang drastis. Harga sebutir telur yang sebulan sebelumnya sempat turun menjadi Rp. 25,00 per butirnya, kini harganya naik lagi menjadi Rp. 40,00 per butirnya. Sebutir jagung berharga Rp. 30,00, dan harga susu naik lagi menjadi Rp. 60,00 per setengah liternya. Harga roti naik menjadi Rp. 120,00 per bijinya, sedang harga beras berkisar antara Rp. 250,00-300,00 per liternya.¹⁴⁷ Pada tahun 1965 harga beras melonjak menjadi Rp. 450,00 per kilogram dan harga minyak tanah naik menjadi Rp. 200,00 per liternya.¹⁴⁸ Kondisi ini semakin diperburuk oleh penyaluran beras dan minyak yang tidak tertib dan tidak lancar, sehingga kadang kala sering terjadi kelangkaan barang.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 119

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 441

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 527

Keadaan keuangan negara pada tahun 1962 sangatlah memprihatinkan. Hal ini tampak pada data sebuah bank yang menyebutkan bahwa kedudukan devisa pada akhir tahun 1961 ialah minus 0,1 milyar rupiah, sehingga akibatnya sulit untuk melakukan pengimporan barang. Sedangkan peredaran uang pada waktu itu mencapai Rp. 70 milyar, sedangkan jumlah anggaran tahun 1962 ialah sekitar Rp. 98 milyar. Devisit diperkirakan antara Rp. 34 milyar hingga Rp. 40 milyar, akibatnya tekanan inflasi yang semakin bertambah.¹⁴⁹

Sarbini menerangkan bahwa volume uang di akhir tahun 1961 ada Rp. 64 milyar, bulan Mei 1962 ada Rp. 80 milyar dan akhir tahun 1962 diperkirakan berjumlah Rp. 130 milyar. Defisit anggaran negara diperkirakan berjumlah Rp. 37 milyar, akan tetapi sebenarnya adalah Rp. 59 milyar, sebab pengeluaran khusus sebesar Rp. 22,2 milyar telah diminta oleh presiden. Dalam keadaan seperti ini, keadaan devisa menjadi suram dan kering.¹⁵⁰

Dalam kondisi seperti inilah, rakyat miskin akan sangat mudah dipengaruhi oleh faham-faham komunis yang menjanjikan kehidupan yang layak dan kesejahteraan bagi rakyat miskin, jadi tidak mengherankan jika PKI dapat berkembang dengan pesat serta mempunyai jutaan massa pendukung yang sebagian besar adalah rakyat kecil. Kondisi kemiskinan ini pulalah yang salah satunya menimbulkan tuntutan supaya diadakan penurunan harga barang-barang seperti yang tercantum di dalam Tritura beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1965. Berangkat dari kondisi inilah, rakyat menuntut pemerintah agar segera melaksanakan pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 195

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 222

3. Latar Belakang Ideologi

Selain bidang sosial ekonomi dan politik, faktor ideologi juga secara tidak langsung turut mempengaruhi terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965. Seperti yang diketahui bahwa dalam hal ini terjadi pertentangan antara TNI-AD dengan PKI, di mana PKI adalah partai yang berfaham komunis dan sifatnya yang revolusioner, sedangkan TNI-AD adalah barisan pertahanan yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila. Karena itulah PKI sangat tidak disukai oleh TNI-AD. TNI-AD menganggap bahwa ideologi komunis sangatlah berbahaya dan patut diwaspadai karena ideologi tersebut sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila.

Sesuai dengan namanya, PKI adalah partai revolusioner yang berhaluan komunis radikal yang menggunakan azas Marxis hasil penafsiran Lenin (Marxisme-Leninisme) yang lebih dikenal dengan komunisme.¹⁵¹ Partai Komunis Indonesia (PKI) menganut faham Marxisme yang pertama kali datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I melalui seorang pemimpin buruh dari negeri Belanda yang bernama H.J.F.M Sneevliet. Ia adalah anggota Social Arbeider Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat.¹⁵²

Berdasarkan alasan ideologi nyata, maka golongan-golongan agama dianggap sebagai lawan PKI yang utama. Namun PKI memandang TNI-AD sebagai musuhnya yang terpenting, bukan hanya karena TNI-AD merupakan ancaman fisik bagi partai, akan tetapi juga disebabkan oleh alasan-alasan ideologi. Pendapat yang hidup dalam tubuh TNI-AD menganggap faham komunisme

¹⁵¹ Pinardi, *Lihat Peristiwa Coup Berdarah PKI September 1948*, op.cit, hlm. vii

¹⁵² Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, op.cit, hlm. 202-203

bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Komunisme melambangkan pertentangan kelas dan penumbangan setiap tata hidup yang non komunis, sedangkan Pancasila melambangkan kegotong-royongan serta toleransi. Dan salah satu dari lima sila Pancasila adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan komunis melambangkan atheisme.¹⁵³

Dengan sifatnya yang komunis tersebut, PKI berusaha menggalang kekuatan militer dan berusaha untuk menyebar luaskan paham komunisnya di Indonesia. Sejak awal masuknya, paham komunis ini telah ditentang oleh TNI khususnya AD. Namun melalui wadah PKI, ideologi komunis ini dapat terus berkembang. Apalagi setelah Presiden Sukarno secara terbuka berusaha melindungi dan mendukung paham tersebut karena sifat PKI yang revolusioner dianggap dapat menjadi salah satu kekuatan pendukung Presiden Sukarno, sehingga membuat PKI semakin dapat berkembang dengan mudah pasca kehancurannya setelah pemberontakan di Madiun. Walaupun dalam usahanya untuk terus berkembang, PKI terus mendapat tekanan dari TNI-AD, namun PKI dengan ideologi komunisnya dapat terus berkembang, salah satunya dengan menjadi pemenang ke empat dalam pemilu tahun 1955 dan sejak itu PKI sangat diperhitungkan karena memainkan peranan yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan pemerintahan terutama setelah PKI berhasil mendekati Presiden Sukarno.

TNI-AD berusaha menekan pengaruh ideologi komunis PKI dan berusaha menyelamatkan ideologi Pancasila, apalagi setelah PKI secara konstitusional telah diakui sebagai partai yang memiliki massa pendukung yang sangat besar dan

¹⁵³ Ismail Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, hlm. 2

mendapat perlindungan dari Presiden Sukarno. Pengaruh ideologi komunis ini sungguh-sungguh telah menjadi ancaman yang serius yang pada akhirnya kelak dapat meruntuhkan ideologi Pancasila. Ancaman ideologi komunis ini semakin kuat setelah Presiden Sukarno mengusulkan Nasakom(Nasional, Agama, Komunis), sehingga melalui Nasakom ini ideologi komunis akan semakin berkembang dan berada di atas angin. Kecemasan ini berpuncak pada pertentangan antara TNI-AD dengan PKI yang didukung oleh Presiden Sukarno, sehingga membuat hubungan antara Presiden Sukarno dengan TNI-AD menjadi kurang harmonis.

Dengan semakin berkembang dan besarnya pengaruh komunis yang diikuti dengan banyaknya massa PKI, semakin terancam pula ideologi Pancasila. PKI sendiri secara perlahan-lahan hampir saja menumbangkan ideologi Pancasila yang ditandai dengan drastisnya peningkatan jumlah massa PKI. Di sini pulalah kesalahan politik Presiden Sukarno, yaitu kegagalannya dalam mem-Pancasilakan PKI yang secara prinsipil memang tidak mungkin dilakukannya. Beliau mengorbankan Pancasila sejati untuk merangkul PKI dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan Pancasila itu sendiri. Hasilnya adalah Lubang Buaya.¹⁵⁴

¹⁵⁴ William H. Frederick, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan sesudah Revolusi*, op.cit hlm 401

BAB III

KETERLIBATAN TNI – AD, CIA, PKI DAN SOEHARTO PADA PERISTIWA 1 OKTOBER 1965

A. TNI – AD Penghalang Utama PKI

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya (bab II) bahwa lumpuhnya sistem politik pada masa Demokrasi Liberal 1950 – 1957 melalui SOB, telah menghadapkan PKI pada keadaan yang menyulitkan gerakannya, mengingat PKI yang justru dalam keadaan yang mendapat tekanan berat dari TNI AD belum berhasil memulihkan kekuatannya secara ideologis, fisik, dan politis semenjak peristiwa pemberontakan Madiun. Untuk melicinkan gerakannya, terutama sehubungan dengan tekanan dari TNI, PKI melakukan kerja sama politik dengan kekuatan politik dominan, yaitu dengan PNI dan kemudian Presiden Sukarno.¹⁵⁵

Lumpuhnya sistem parlementer telah meletakkan PKI pada keadaan tidak siap, baik secara ideologis maupun fisik. Dengan adanya di kalangan perwira tentara yang bergerak menentang dan hendak menyingkirkannya, PKI yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu, tidak mempunyai jalan lain kecuali menerima apa yang ditentukan Sukarno, bahkan memberikan dukungan yang lebih besar daripada sebelumnya.¹⁵⁶

Dalam masa demokrasi liberal, PKI berada dalam situasi sulit. Di samping PKI berusaha membangun dirinya dari puing-puing keterpurukan pasca

¹⁵⁵ Yahya Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945 – 1966*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1982. hlm. 133

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 134

pemberontakan di Madiun, PKI juga mendapat tekanan yang besar dari TNI AD yang sangat tidak menyukai PKI yang berfaham komunis. Dapat dikatakan bahwa PKI mengalami mati suri pasca pemberontakan Madiun. Di samping itu pula, PKI kehilangan pemimpin-pemimpinnya karena beberapa pemimpinnya seperti Aidit dan Alimin melarikan diri ke Moscow. Namun pada masa demokrasi liberal itu, mereka kembali ke Indonesia selain untuk membangun PKI yang sempat tercerai berai, juga untuk mengembalikan citra baik PKI yang hancur pasca pemberontakan PKI Madiun.

Membangun kembali PKI yang hancur lebur bukanlah pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan perjuangan yang besar. Masa demokrasi liberal adalah momentum yang tepat untuk Aidit dan Alimin untuk kembali ke Indonesia, karena pada masa itu, partai-partai dapat tumbuh dengan subur. Peran partai-partai sangat besar dalam pemerintahan, sedangkan peran militer dan presiden tidak begitu besar. Karena besarnya peran partai-partai pada masa demokrasi liberal menyebabkan persaingan dalam kabinet yang dibentuk pun menjadi semakin berwarna. Namun efek buruk dari sistem ini adalah sering terjadinya pergantian kabinet karena persaingan antar partai yang cukup ketat.

Kebangkitan kembali PKI mempunyai dampak yang cukup besar dalam perkembangan politik Indonesia selanjutnya. Dalam situasi sulit karena selalu ditentang oleh TNI AD, PKI mampu menancapkan eksistensinya sebagai partai yang patut diperhitungkan. Di bawah pimpinan Aidit yang pintar melakukan propaganda, PKI berkembang menjadi partai yang besar. Untuk semakin memudahkan jalannya, PKI berusaha menjalin kerja sama dengan mendekati Presiden Sukarno dan PNI yang merupakan salah satu partai besar pada waktu itu.

Dalam perkembangannya, PKI bangkit kembali secara meyakinkan dan menjadi partai terbesar sesudah pemilihan umum tahun 1955. Dari sekian banyak partai, memang PKI yang paling cerdik dalam menanggapi keadaan. PKI juga nampak sebagai partai yang paling unggul dalam berbagai hal, seperti organisasi yang rapi, disiplin yang baik, bersih tetapi juga cerdik (licik) dalam aksi-aksi yang bergaya revolusioner sosialis.¹⁵⁷

PKI juga pandai dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada, sehingga tidak mengherankan jika PKI akhirnya mampu menjadi partai besar dan mampu menempatkan dirinya dalam empat partai besar setelah PNI, Masyumi dan NU, dengan jutaan massa pendukung. Hal ini tampak pada tabel berikut :

Tabel Jumlah Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Tahun 1955

Partai	Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi
PNI	8.434.652	22,3	57
Masyumi	7.903.886	20,9	57
Nadhatul Ulama	6.955.141	18,4	45
PKI	6.176.914	16,4	39
PSII	1.091.160	2,9	8
Parkindo	1.003.325	2,6	8
Partai Katholik	770.740	2,0	6
PSI	753.191	2,0	5
IPKI	541.306	1,4	4
Perti	483.014	1,3	4
18 partai lainnya			24

Tampak pada tabel, PKI menempati urutan keempat dalam perolehan suara dalam pemilu tahun 1955. Sebagai partai yang baru bangkit dari keterpurukan, perolehan suara yang didapat PKI tergolong fantastis, sehingga dapat disejajarkan dengan tiga partai besar lainnya. Sebagian besar perolehan

¹⁵⁷ G. Moeddjianto. *Indonesia Abad Ke-20*, Jilid 2. *op.cit.* hlm. 136

suara PKI berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI terus memperkuat basis dukungannya.

PKI tampil unggul dalam pemilu tahun 1955 di mana PKI mampu masuk dalam empat partai besar setelah PNI, Masyumi dan NU. Menurut salah satu catatan, pada pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, PKI yang beranggotakan 500.000 orang mampu merebut 5.901.890 suara dalam Dewan Perwakilan Rakyat dari 35.445.974 suara yang ada, sedang untuk konstituante dapat merebut 6.176.914 suara dari 37.063.054 suara yang terkumpul. Menurut ukuran pada waktu itu, hal ini merupakan prestasi yang besar.¹⁵⁸

Situasi ekonomi negara yang kurang baik terutama akibat terjadinya krisis ekonomi, dimanfaatkan Aidit sebagai tunggangan untuk menambah dukungan massa. Kondisi rakyat yang miskin dan menderita adalah sasaran kecerdikan PKI. Petani dan rakyat yang hidup miskin dan menderita diajak bergabung dan dijanjikan kehidupan yang layak. Propaganda PKI semakin luas sehingga dukungan massa pun semakin banyak. Dengan demikian, otomatis PKI semakin kuat dan solid sehingga mampu mengantarkannya dalam salah satu dari empat partai besar Indonesia tahun 1955. Pemilu 1955 memperlihatkan kemampuan strategi PKI yang muncul sebagai pemenang nomor empat. Ini membuktikan upaya PKI melebarkan melalui penggalangan massa dari organisasi buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang mencakup sekitar 1,5 juta buruh dari berbagai organisasi buruh anggota SOBSI. Selain itu, PKI pun berhasil merebut Barisan Tani Indonesia (BTI) dari tangan PNI dan memanfaatkannya untuk menggalang massa tani, terutama di wilayah-wilayah perkebunan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri*, CV. Muliastari, Jakarta, 1991, hlm.52-53

¹⁵⁹ R.Z. Leirisa. *PRRI Permesta*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 1991. hlm. 12

Persaingan antar partai pun semakin ketat, dan pergantian kabinet pun semakin sering terjadi. Persaingan politik pun menjadi tidak sehat, sampai kemudian Sukarno memunculkan gagasan Demokrasi Terpimpin dan berusaha mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan di Indonesia. Sebaliknya, muncul berbagai upaya membendung masuknya pengaruh komunis dalam pemerintahan Indonesia, yang akhirnya menciptakan kondisi untuk timbulnya gerakan-gerakan daerah.¹⁶⁰

TNI AD sebagai basis kekuatan militer adalah salah satu kekuatan yang menentang masuknya pengaruh komunis di Indonesia. Kehadiran paham komunis dianggap sebagai ancaman yang potensial yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan bangsa dan merongrong ideologi Pancasila. TNI AD tidak menginginkan PKI kembali dan menjadi partai legal sehingga dapat terus berkembang dengan pesat. TNI AD pun mulai menunjukkan indikasi ingin menghancurkan PKI, sementara PKI sendiri menganggap TNI AD adalah saingan terberatnya dalam percaturan politik.

PKI di bawah pimpinan Aidit inilah yang menyusun strategi khusus PKI. Garis perjuangan ini kemudian diterbitkan untuk kepentingan kader-kader PKI dengan nama Masyarakat dan Revolusi Indonesia (MIRI). PKI berusaha memperkuat kedudukannya dengan cara menempuh dua cara legal, yaitu *pertama*, membentuk Front Nasional untuk bekerja sama dan mempengaruhi kekuatan politik lainnya di Indonesia, dan *kedua*, yaitu dengan merekrut massa pengikut yang luas. Kedua strategi ini dilaksanakan selama tahun 1950 hingga tahun 1960. Selain dengan melakukan aliansi dengan PNI untuk memperkuat dukungan, PKI

¹⁶⁰ *Ibid.* hlm. 12

juga menempuh taktik dengan mendekati dan merangkul Presiden Sukarno. Sejak 1952 itulah PKI mulai menegakkan semboyan “Hidup Bung Karno”, padahal sebelumnya mereka menganggap Sukarno sebagai komprador seperti Hatta dan para pemimpin bangsa lainnya.¹⁶¹

Keberhasilan PKI dalam pemilu 1955 juga tidak terlepas dari keberhasilan PKI dalam merangkul Presiden Sukarno. PKI selalu membantu dan mendukung Sukarno dalam setiap permasalahan politik. Kebetulan Sukarno memilih jalannya sendiri pasca demokrasi liberal, yaitu dengan mengusulkan konsep Demokrasi Terpimpin. Maka, sejak tahun 1953, hubungan PKI dengan Sukarno semakin erat saja, sekalipun harus diakui bahwa Sukarno bukanlah anggota PKI atau menyerah bulat-bulat kepada ideologi PKI. Namun dengan kedekatan hubungan ini, berangsur-angsur Sukarno mengambil alih retorika politik PKI, seperti misalnya istilah *revolusi* yang melahirkan istilah *revolusi belum selesai*. Pandangan politik internasional Sukarno semakin hari semakin sejajar dengan pandangan PKI, karena kedekatan Sukarno kepada PKI dan gagasannya membentuk Demokrasi Terpimpin, menyebabkan Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden tahun 1956.

Walaupun demikian, Sukarno tetap menjalin hubungan dengan PKI, dengan berbagai pertimbangan di antaranya sifat PKI yang revolusioner dan kekuatan massa PKI yang besar, dipandang dapat menjadi pendukung Sukarno bila mendapat ancaman dari Angkatan Darat. TNI AD agak bersilang pendapat dengan Presiden Sukarno, terutama karena sikap Sukarno yang melindungi PKI dan memberikan kesempatan-kesempatan bagi PKI untuk berkembang dan duduk

¹⁶¹ *Ibid.* hlm. 20

dalam pemerintahan yang pada akhirnya kelak dipandang dapat menghancurkan ideologi Pancasila.

Walaupun demikian, Presiden Sukarno tetap mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan yang kemudian memungkinkan terbentuknya Kabinet Kaki Empat, yaitu yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Walaupun keterlibatan dan keikutsertaan PKI ditentang oleh TNI AD dan partai-partai lain, namun Sukarno tetap mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan, dengan alasan PKI memiliki organisasi kuat dan revolusioner. Keberadaan PKI dalam politik Indonesia dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan TNI AD. Posisi PKI semakin kuat dan Presiden Sukarno melibatkan PKI dalam pengambilan kebijakan politik. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hubungan antara PKI dan TNI AD menjadi semakin memanas karena di saat TNI AD membutuhkan dukungan Sukarno, namun beliau lebih cenderung untuk membela PKI. Ketidakseimbangan yang diberikan oleh Sukarno kepada PKI dan TNI AD inilah yang kelak menjadi pemicu terjadinya perebutan kekuasaan.¹⁶²

PKI menganggap lawan utamanya adalah TNI AD. Pimpinan TNI AD pun menyadari, maka TNI AD tidak mengendorkan kewaspadaan dan tidak ragu-ragu menghadapi PKI, seperti yang dikatakan oleh Mayjen. Suprpto :

“TNI AD tidak pernah ragu-ragu menumpas golongan yang mau mendegradasikan ABRI sebagai alat pemerintah saja dan secara positif menyerukan kompetisi. ABRI tidak kenal istilah kiri atau kanan dan tidak kenal isme manapun kecuali ideologi negara.”¹⁶³

¹⁶² Harold Crouch. *Militer dan Politik Di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1986. hlm. 87

¹⁶³ Nugroho Notosusanto. *Konsensus Nasional 1966 – 1969*. Balai Pustaka. Jakarta. 1985. hlm. 17

Apa yang dilakukan oleh PKI selalu mendapat tantangan yang kuat dari TNI AD. Rencana PKI selalu digagalkan. Bagi PKI, TNI AD adalah penghalang utama yang harus dilawan, bila perlu disingkirkan.

B. Keterlibatan PKI Pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Tragedi berdarah yang terjadi pada tahun 1965 merupakan salah satu lembar paling hitam dalam sejarah modern Indonesia. Selain karena banyaknya warga bangsa ini yang telah menjadi korbannya, juga karena dahsyatnya dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang ditimbulkannya. Ironisnya, meskipun tragedi ini adalah sebuah peristiwa terbuka dan besar-besaran dan serta berlangsung dalam kurun waktu setidaknya beberapa bulan, ia masih menyimpan misteri. Dan karena adanya unsur misteri ini, tragedi 1 Oktober 1965 mendorong lahirnya banyak spekulasi, di samping tentu saja manipulasi dan distorsi.¹⁶⁴

Banyaknya spekulasi yang berkembang tentang tragedi 1965, mendorong banyak munculnya pendapat-pendapat yang diiringi oleh fakta-fakta baru seputar tragedi 1965. Peristiwa 1965 memang tidak dapat dilepaskan dari PKI dan TNI AD, dengan tidak mengesampingkan keterlibatan berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama, persaingan di antara keduanya sedikit banyak telah memicu terjadinya tragedi berdarah 1965.

Dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 ini, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan PKI seperti yang ditulis selama masa orde baru. Keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan begitu kompleks dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Jadi, dengan kekomplekan tersebut tidak dapat dilimpahkan kesalahan kepada satu pihak saja. Semua pihak yang terlibat dalam

¹⁶⁴ Baskara T. Wardaya. *op.cit.* hlm 163

Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut wajib bertanggung jawab. Tokoh-tokoh PKI, seperti Untung cs telah membayar atas tindakannya dalam kejadian tersebut, di mana keterlibatan Untung dalam hal ini sudah sangat jelas dalam peristiwa tersebut. TNI AD juga terlibat, selain tampak dalam pasukan Cakrabirawa yang melakukan penculikan terhadap Jenderal AD, juga terhadap sosok lain AD yang berdiri di belakang dan kemudian memanfaatkan peluang tersebut untuk merebut kekuasaan.

Ketika orang berbicara mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965, biasanya versi yang secara resmi dan umum berlaku adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 1965 melalui pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan jalan membunuh tokoh-tokoh tertinggi militer di Indonesia di Jakarta. Begitu kejamnya orang-orang PKI itu sehingga enam orang Jenderal dan seorang Kapten telah menjadi korban. Kekejaman itu berlanjut di Lubang Buaya, dengan jalan menyayat-nyayat tubuh korban, sementara sekelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerwani memotong alat-alat vital para jenderal itu sambil menari-nari di tengah pagi yang disebut “pesta harum bunga”. Mata dari sebagian korban juga dicungkil dengan alat khusus.¹⁶⁵

Versi pemerintah orde baru tersebut kini diragukan kebenarannya karena fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang dipaparkan oleh tim dokter yang melakukan otopsi terhadap jenazah-jenazah para jenderal, yang dikemukakan oleh salah satu dokter yang bernama *Liem Joe Thay*. Menurutnya tidak ada bekas penyiksaan pada tubuh dan penis korban. Keterangan Liem Joe Thay tersebut sangat sesuai dengan keterangan yang diungkapkan oleh salah satu pelaku utama

¹⁶⁵ *Ibid.* hlm 165

penculikan yaitu Serka Bungkus bahwa tidak ada penyiksaan terhadap para Jendral yang masih hidup di Lubang Buaya.

Menurut versi resmi pemerintah di atas, ditegaskan bahwa PKI sebagai pelaku tunggal dan sekaligus dalang dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut. Jadi, sudah selayaknya jika PKI dibasmi hingga ke akar-akarnya agar PKI tidak dapat berkembang karena PKI akan merebut kekuasaan pemerintahan serta mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Banyak kejanggalan-kejanggalan dari peristiwa tersebut. Jika dikatakan bahwa PKI (sebagai partai) yang melakukan pemberontakan, tentu tidak akan dapat terbendung karena PKI memiliki massa pendukung yang sangat besar jumlahnya. Jadi, jika pun dikatakan PKI terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, itu hanya dilakukan oleh *oknum-oknum PKI bukan PKI sebagai partai*. Hal ini diperkuat oleh kesaksian Sudisman yang mengatakan bahwa yang terlibat adalah tokoh-tokoh PKI, bukan PKI sebagai partai.

Dari kesaksian-kesaksian para pelaku Gestapu, hasil wawancara dalam buku "*Saksi Para Pelaku Gestapu*", tampak bahwa Soeharto dengan sengaja membesar-besarkan berita tentang penyakit yang diderita Sukarno, untuk membuat posisi PKI terjepit. Presiden Sukarno adalah satu-satunya tempat berlindung bagi PKI. Jadi, jika Sukarno sampai meninggal sudah dapat dipastikan bahwa TNI AD akan mengganyang PKI habis-habisan. Soeharto berharap agar PKI yang terlebih dahulu memukul TNI AD, dan kemudian ia akan memukul balik dengan alasan menumpas PKI hingga ke akar-akarnya.

Siasat yang dijalankan oleh Soeharto memang berjalan dengan mulus. Jalan yang dirintisnya untuk sampai pada puncak kekuasaan semakin terbuka lebar. Di satu sisi, saingan-saingan terberatnya dalam Angkatan Darat telah tewas dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, sedangkan ia yakin dapat menumpas PKI karena dukungan rakyat ada padanya, sedangkan rencana-rencana untuk menjatuhkan Sukarno dilakukan dengan “merangkak” melalui jalur “pemaksaan” konstitusional namun terkesan legal.

Jadi, sesungguhnya dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, PKI dan Pasukan Cakarabirawa hanyalah sebagai kambing hitam. Pasukan Cakarabirawa hanya bertugas menjemput para Jenderal untuk dihadapkan pada presiden agar dimintai keterangannya sehubungan dengan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah.¹⁶⁶ Tugas Cakarabirawa hanyalah menjemput paksa para Jenderal AD lalu membawanya ke Lubang Buaya dan kemudian dihadapkan pada Letkol. Untung, sedangkan peristiwa pembunuhan terhadap Jenderal yang masih hidup justru dilakukan oleh pasukan teritorial dan tanpa sepengetahuan Cakarabirawa. Hal itu sejalan dengan kesaksian dari salah satu pelaku Gestapu, yaitu Serka. Bungkus, bahwa pasukan Cakarabirawa sesungguhnya telah tertipu dan tokoh-tokoh berdiri di belakang layarlah yang mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut.¹⁶⁷

Seperti yang diketahui, bahwa PKI adalah organisasi sipil, sementara itu tokoh-tokoh kunci dalam gerakan yang menamakan diri sebagai “Gerakan Tiga Puluh September” itu, yaitu Letkol. Untung, Kolonel Abdul Latief, dan Brigjen.

¹⁶⁶ Harold Crouch. *op.cit.* hlm 93

¹⁶⁷ *Ibid.* hlm. 96

Soepardjo adalah justru personil-personil militer, khususnya dari kesatuan TNI Angkatan Darat. Sementara AD sendiri sejak pemilu 1955 telah semakin sengit berlawanan dengan PKI dikarenakan tingginya perolehan suara PKI. Perolehan suara partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), yaitu partai politik yang dipelopori oleh Angkatan Darat amat kecil suaranya.¹⁶⁸ Pertentangan PKI dengan TNI AD ini kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk menenyapkan PKI dan saingan politiknya, terutama sesama rekan dalam Angkatan Darat.

Jika dikaji ulang, bahwa sasaran gerakan adalah tersebut adalah posisi penting dalam Angkatan Bersenjata di Indonesia dan selain para Jendral, posisi Pangkostrad (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat) yang pada waktu itu dijabat oleh Mayjen. Soeharto juga cukup penting. Jika memang demikian, kemungkinan besar Soeharto juga menjadi korban dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut. Namun dalam kenyataannya, Soeharto tidak di apa-apakan. Ini menimbulkan dugaan bahwa antara Soeharto dan pelaku-pelaku gerakan sudah ada koordinasi dan sikap saling pengertian, sehingga semakin memperkuat indikasi bahwa Soeharto sendiri adalah bagian dari pelak Peristiwa 1 Oktober 1965 itu.¹⁶⁹

Dalam kesaksian Kol. A. Latief, menyatakan bahwa sebelum diadakan penangkapan para Jenderal tanggal 30 September 1965, malam itu dia telah melapor terlebih dahulu kepada Soeharto di rumah sakit yang sedang menangani anaknya yang sakit karena ketumpahan sup panas, bahwa akan terjadi penangkapan terhadap para Jenderal AD untuk dihadapkan kepada Presiden Sukarno. Jadi, sesungguhnya Soeharto sudah mengetahui bahwa akan terjadi

¹⁶⁸ Baskara T. Wardaya. *Op.cit.* hlm. 166

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm 172

peristiwa 1 Oktober 1965, hanya ia diam dan menanti peluang yang tepat untuk melancarkan rencananya sendiri. Kesaksian A. Latief ini sangat bertentangan dengan keterangan Soeharto, bahwa A. Latief berniat untuk membunuhnya sewaktu di rumah sakit pada malam hari saat dia menunggu anaknya, Tommy yang dirawat di rumah sakit karena ketumpahan sup panas.

Namun usaha Latief untuk membunuh Soeharto tidak terlaksana karena saat itu ia sedang berada di rumah sakit. Namun keterangan itu ditentang oleh Kol. A. Latief. Kesaksian-kesaksian para pelaku Gestapu seakan-akan ingin menunjukkan bahwa Soehartolah orang yang harus bertanggung jawab karena mempunyai andil yang besar dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. PKI dan pasukan AD yang terlibat hanyalah alat, sehingga dengan demikian ada yang dapat dijadikan kambing hitam. Soeharto sendiri sebagai orang yang berperanan penting tetap aman, bahkan menyerang balik rekan-rekannya sendiri dalam kup Gestapu dan ia tampil sebagai pahlawan. Namun, kesaksian-kesaksian para pelaku dan saksi Gestapu tidak sanggup menyembunyikan kebohongan Soeharto sehingga satu persatu fakta mulai terbongkar.

Menyusul tragedi Peristiwa 1 Oktober 1965, Kol. Latief sempat menjadi buronan bersama Untung dan Kapt. Inf. Suradi. Mereka melarikan diri ke arah selatan sampai di desa Cipayung. Setelah menanamkan senjatanya ke dalam tanah, pada tanggal 4 Oktober 1965 mereka kembali ke Jakarta untuk menemui Presiden Sukarno melalui Brigjen. Supardjo hingga kemudian tertangkap, dimasukkan dalam penjara sebagai tahanan politik dan disidangkan berkali-kali.

Semula Latief dijatuhi hukuman mati, namun keputusan Mahkamah Militer Agung tahun 1982 mengganti vonis mati tersebut dengan penjara seumur

hidup. Tahun 1983, Latief resmi menjadi tahanan politik di LP Cipinang. Latief lalu memohon agar hukuman seumur hidup diubah menjadi hukuman terbatas. Soeharto melalui Keppres 156/1950/RIS menambah hukuman Latief menjadi lima tahun lagi hingga 18 Januari 1988. Namun, setelah batas waktu itu terlewati, Latief tidak kunjung dibebaskan. Pada tanggal 17 Agustus 1994, ia bersama Marsekal Omar Dhani, Soebandrio, Pol. Sutanto mengajukan grasi kepada Presiden Soeharto. Berbeda dengan ketiga orang yang disebut terakhir, Latief tidak mendapatkan grasi tersebut. Akhirnya pada era pemerintahan Presiden Habibie, Latief mendapatkan kebebasannya bersama-sama beberapa tapol PKI lainnya.¹⁷⁰

Serka Bungkus adalah salah satu pelaku Gestapu yang masih hidup dan dibebaskan pada tanggal 26 Maret 1999, setelah dipenjara selama 33 tahun. Ia adalah yang bertugas menjemput Mayjen. M.T. Haryono pada subuh berdarah itu. Keterangan yang diberikan Serka. Bungkus tentang proses penjemputan terhadap M.T. Haryono hampir serupa dengan kesaksian yang disampaikan oleh Satrio Bimo (putera Brigjen. Hario Kecik, yang rumahnya berdekatan dengan rumah M.T. Haryono), di mana dia menyaksikan sendiri penculikan terhadap M.T. Haryono. Selain Satrio Bimo, juga keterangan dari Rianto Nurhadi (putera M.T. Haryono) yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ayahnya diculik.¹⁷¹ Menurut keduanya pasukan Cakrabirawa lah yang menculik dan membunuh M.T. Haryono, lalu memasukkannya ke dalam truk. Serka. Bungkus sendiri

¹⁷⁰ Proyek Historiografi Center for Information Analysis. *Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Pelaku Para Sejarah*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2005. hlm. 4

¹⁷¹ Pengakuan para saksi dan pelaku sejarah G30S 1965, Pewawancara Surya Lesmana. *Saksi dan Pelaku Gestapu*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2005. hlm. 39

mengatakan bahwa Cakrabirawa hanya ditugaskan untuk menjemput para Jenderal AD untuk dihadapkan pada Presiden Sukarno.¹⁷²

Mengenai sampai terbunuhnya tiga Jenderal, hanya dikarenakan situasi panik, sehingga Jenderal tersebut sampai terbunuh. Selain itu juga dikarenakan dalam operasi tersebut telah disusupi oleh Syam Kamaruzaman yang mendekati Letkol. Untung, sehingga tercetuslah perintah “*tangkap dan hadapkan, hidup atau mati*”. Pasukan Cakrabirawa hanya bertugas menjemput, sedangkan sampai terbunuhnya para Jenderal, itu sudah di luar kekuasaan pasukan Cakrabirawa. Keberadaan Syam ibarat “hantu” yang bisa menyusup ke mana-mana, sehingga banyak orang yakin bahwa Syam adalah agen ganda. Dia bukan cuma bekerja untuk PKI, tetapi juga bertugas sebagai spionase untuk kepentingan-kepentingan lain.¹⁷³

Seorang mantan pejabat di lingkungan Departemen Kehakiman RI, yang identitasnya dirahasiakan bertutur soal keyakinannya bahwa Syam adalah agen rahasia KGB sekaligus CIA. Sumber yang lain meyakini, Syam juga orang sipil yang menjadi informan tentara.¹⁷⁴ Syam sendiri akhirnya tertangkap dan dipenjara. Namun walaupun dipenjara, Syam mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut John Blumeng Kewas, Syam sudah lama berhubungan dengan orang-orang tertentu, dengan kalangan ABRI tertentu, khususnya pra dan pasca G 30 S, terutama dia erat hubungannya dengan Soeharto.¹⁷⁵ Kedekatan Syam (juga Untung dan Latief) dengan Soeharto, membuat orang menduga-duga soal keterlibatan Soeharto dalam operasi ini.¹⁷⁶

¹⁷² *Ibid.*, hlm 43

¹⁷³ *Ibid.*, hlm 55

¹⁷⁴ Proyek Historiografi Center for Information Analysis. *Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah.* *op.cit.* hlm.32

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm. 36

¹⁷⁶ *Ibid.* hlm. 44

C. Keterlibatan TNI-AD Pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Tidak dapat dipungkiri bahwa TNI-AD berkaitan erat dengan Peristiwa 1 Oktober 1965 karena TNI-AD diduga terlibat di dalamnya walaupun dalam kenyataannya TNI-AD adalah salah satu pihak yang diuntungkan dengan kejadian tersebut karena TNI-AD kemudian muncul sebagai figur kekuatan baru pasca terjadinya peristiwa tersebut. Dalam Tragedi G 30 S, kita tidak dapat memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar karena begitu kompleksnya keterlibatan berbagai pihak dalam kejadian tersebut. Tokoh-tokoh PKI seperti Untung, Latief dan Aidit dikatakan terlibat karena Untung lah yang memimpin gerakan tersebut. Walau demikian, TNI-AD juga ikut “berperan” terutama melalui pasukan Pasopati di mana di dalamnya terdiri dari satuan-satuan militer Batalyon I Resimen Cakrabirawa, Batalyon 454 Divisi Diponegoro, Batalyon 530 Divisi Brawijaya, Pasukan Gerak Cepat AURI, Brigade Infanteri I Jakarta Raya serta didukung oleh Pasukan Cakrabirawa yang notabene tergolong dalam militer AD.

Selain itu, tokoh-tokoh pelaku Gestapu seperti Untung, Latief, Supardjo dan Abdul Arief juga berasal dari kalangan militer. Jadi dapat dikatakan bahwa setidaknya TNI-AD juga ikut berperan dalam Tragedi Berdarah itu. Dalam hal ini salah satu pelaku utama Gestapu yaitu Serka Bungkus memandang bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 tidak dapat dipisahkan dari militer itu sendiri. Sebagai pelaku sejarah, Serka. Bungkus tetap berkeyakinan bahwa Peristiwa 1 Oktober 1965 dilakukan secara internal oleh militer, yakni prajurit yang tidak menyukai politik yang dilakukan oleh atasannya. Menurut logika Bungkus, kalau gerakan itu benar-benar dilakukan oleh PKI, maka Jakarta akan hangus.¹⁷⁷ Dalam usahanya untuk meluruskan sejarah, Serka. Bungkus mengatakan :

¹⁷⁷ *Ibid.* hlm. 28

“Bahkan saya berfikir untuk mengurangi dosa-dosa saya selama ini, saya akan berusaha meluruskan sejarah peristiwa 30 September itu. Saya memang difitnah, tapi mau bagaimana, saya terikat oleh perintah. Saya tidak bisa apa-apa, dan itu memang sudah merupakan kewajiban seorang prajurit yang dibebankan kepada saya.”¹⁷⁸

Dalam kesaksiannya, Serka Bungkus tetap berkeyakinan bahwa terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah persoalan intern AD. Hal penting yang dapat digaris bawahi adalah waktu penembakan para jenderal masih hidup. Menurut Bungkus, para jenderal itu dieksekusi tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 08.30 atau setengah sembilan pagi, di mana para Jenderal yang masih hidup itu diperlakukan dengan sopan dan dipapah hingga ke tepi sumur, baru kemudian ditembak.

Sedangkan setelah para Jenderal dikumpulkan di Lubang Buaya, sama sekali tidak ada penyiksaan dan para Jenderal yang masih hidup ditembak jatuh ke dalam lubang oleh Pasukan Teritorial, *bukan Cakarabirawa*. Ini sangat sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Liem Joe Thay (Prof. Dr. Arief Budianto), salah satu dokter yang melakukan otopsi terhadap jenazah-jenazah para Jenderal korban dari terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965. Menurutnya, secara umum kondisi mayat memang sudah busuk dan semua mayat masih berpakaian lengkap seperti yang dipakainya terakhir kali. Pada jenazah Ahmad. Yani, bola matanya sudah copot, namun bukan karena dicongkel, tetapi karena ketika dimasukkan ke dalam sumur, kepalanya masuk terlebih dahulu dan di dalam sumur itu terdapat air sehingga kepalanya terendam. Pada saat otopsi yang berlangsung malam hari itu, Soeharto juga datang dengan menggunakan pakaian tempur (*battle dress*) dan RSPAD dijaga ketat oleh Pasukan Kostrad. Soeharto memerintahkan agar otopsi tidak perlu dilakukan secara lengkap.¹⁷⁹

¹⁷⁸ *Ibid.* hlm 27

¹⁷⁹ *Ibid.* hlm 32

Dalam melakukan otopsi itu, Liem Joe Thay mengatakan :

“Di luar kami mendengar berita-berita yang menyeramkan soal kondisi penis korban, karena itu kami melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi tentang itu. Tetapi, apa yang kami temukan malah kondom di kantung salah satu korban yang bukan Jenderal. Ada juga korban yang ditemukan tidak disunat. Kami periksa penis-penis para korban dengan sangat teliti. Jangankan terpotong, bahkan luka iris saja juga sama sekali tidak ada. Kami periksa benar itu, dan saya berani berkata benar. Itu faktanya.”¹⁸⁰

Selanjutnya Liem Joe Thay mengatakan bahwa penyiksaan seperti yang diberitakan oleh Soeharto bahwa terjadi penyiksaan terhadap para Jenderal (tampak juga dalam film G 30 S/PKI) itu sama sekali fitnah. Ini sudah jelas kebohongan yang direkayasa oleh penguasa rezim orde baru. Fakta yang ada bahwa para korban meninggal karena luka tembakan, seperti yang ditemukan saat otopsi berlangsung. Namun, hasil otopsi itu tidak berpengaruh terhadap strategi Soeharto dan pengikutnya untuk mengkooptasi media. Media massa tetap saja dengan gencar memberitakan bahwa sebelum meninggal, para korban disiksa secara biadab.¹⁸¹

Hari-hari berikutnya tampak jelas media massa cetak di tanah air berada dalam genggamannya Soeharto. Berita-berita penganiayaan para Jenderal di Lubang Buaya tentu saja merupakan konsumsi pers yang paling disukai. Hal ini tentu menguntungkan Soeharto, karena media massa dijadikan pembentuk opini publik, kemudian ia tinggal mendesak Sukarno ketika terjebak dalam *ambiguitas* (sikap mendua). Soeharto tidak segan-segan mengambil inisiatif sendiri dan menyingkirkan Sukarno.¹⁸²

¹⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 56

¹⁸¹ Proyek Historiografi Center for Information Analysis. *op.cit.* hlm. 90

¹⁸² *Ibid.* hlm. 114 – 115

Keterangan dari Letkol. Heru Atmojo, perwira intelijen AU yang diduga terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, bahwa dirinya baru mengetahui peristiwa itu pada pagi harinya ketika diajak oleh Jenderal Supardjo untuk menemui Presiden Sukarno untuk melaporkan tentang kasus penculikan para Jenderal tersebut. Kolonel A. Latief sebagai salah satu pelaku Gestapu mengatakan :

“Dua hari sebelum G 30 S, pada tanggal 28 September 1965, saya datang ke rumah Pak Harto. Di sana ada ibu Tien, mertuanya, semuanya sedang berkumpul. Lalu saya salami satu per satu. Saya tanyakan pada Pak Harto soal Dewan Jenderal, dan Pak Harto bilang bahwa ia akan mencari informasinya. Setelah itu, saya pulang ke rumah.”¹⁸³

Sedangkan pada malam menjelang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, Jenderal Supardjo dan Letkol. Untung datang ke rumah A. Latief untuk menyuruhnya memberitahukan rencana penculikan itu kepada Jenderal Soeharto. Dalam hal ini Kolonel A. Latief mengatakan :

“Saya disuruh memberitahu Soeharto tentang rencana menghadapkan Jenderal Jenderal kepada presiden Sukarno. Malam itu Soeharto sedang ada di RSPAD Gatot Subroto karena Tommy, anaknya sedang dirawat karena ketumpahan sup panas. Banyak tamu yang membesuk. Di antara kerumunan itu, saya nyelip untuk memberitahu Pak Harto soal rencana itu. Beliau Cuma manggut-manggut. Kami melapor ke Pak Harto karena kami menganggap beliau loyal pada Presiden Sukarno.”¹⁸⁴

Jadi, pada malam terjadinya peristiwa tersebut, sesungguhnya Soeharto sudah mengetahui terlebih dahulu. Namun ia sengaja membiarkan, kemudian setelah peristiwa itu meletus lalu dimanfaatkannya untuk menyerang balik pelaku pelaku kup yang notabene adalah rekan-rekannya sendiri. Kol. A. Latief sendiri bersama Jend. Supardjo siap bertanggung jawab dengan melapor ke Istana, namun Presiden Sukarno tidak ada di Istana, sehingga mereka menyusul ke Halim

¹⁸³ *Ibid.* hlm. 81

¹⁸⁴ *Ibid.* hlm 87

Perdanakusuma dan menemui presiden di sana. Pada saat itulah, pasukan anak buah Soeharto yang dipimpin oleh Sarwo Edhie datang dan langsung menangkap mereka. Demikian juga dengan Pasukan I Cakrabirawa yang langsung ditangkap pagi hari 1 Oktober 1965 kemudian langsung dipenjara.

Kesaksian serupa disampaikan oleh Kapten Sukarbi, pimpinan pasukan yang pada tanggal 1 Oktober 1965 menduduki tiga sisi Medan Merdeka, di sekitar Lapangan Monas. Ia adalah Wakil Komandan Batalyon (Wa Dan Yon) 530 / Barawijaya. Pada sekitar akhir September, Kapten Sukarbi mendapat tugas dari Suharto melalui radiogram untuk memimpin pasukan dan berangkat ke Jakarta untuk merayakan hari ABRI, 5 Oktober 1965. Namun sesampainya di Jakarta, tiba-tiba pasukannya secara misterius ditempatkan di sekitar Monas, sedangkan komandannya, Bambang Supeno bersama perwira lain berada di Halim. Dalam hal ini, Sukarbi bertutur :

“Mengingat kedudukan kami dekat Makostrad, maka pasukan kami pun sering keluar masuk Makostrad untuk ke kamar kecil. Karena tidak ada teguran dari Kostrad, berarti Kostrad tahu bahwa pasukan kami ada di sana. Jadi, tidak betul kalau ada pasukan liar di sekitar Monas. Bukan liar, karena Kostrad sudah tahu kedudukan kami.”¹⁸⁵

Dengan demikian, keberangkatan Kapten Sukarbi sudah tampak direncanakan oleh Soeharto, karena menurutnya ada pasukan liar di sekitar Monas. Menurut Sukarbi, Soeharto sudah tahu bahwa akan terjadi peristiwa G 30 S dari Kol. A. Latief. Akibat dari Sukarbi mengenal baik Kol. A. Latief dan karena laporannya tentang apa yang diketahui tentang Gerakan 30 September tersebut. Sukarbi ditangkap dan dipenjara pada tahun 1970.¹⁸⁶

¹⁸⁵ Proyek Historiografi Center for Information Analysis. *op.cit.* hlm. 60

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm 94

Keterangan dari Mayjen. Mursyid, Deputi I Panglima AD, semakin menguatkan keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Menurutnya, peristiwa tersebut hanyalah sebuah rekayasa orang yang berkepentingan agar Sukarno dicopot, namun dengan sedikit mengaitkannya dengan kepentingan pihak luar seperti Amerika. Pasukan Cakrabirawa sesungguhnya hanyalah diperalat untuk menjemput para Jenderal, di bawah rekayasa orang lain yang mempunyai kepentingan. Pasukan Cakrabirawa yang dikomandoi oleh Untung, sedangkan Untung sangat dekat dengan Soeharto. Untung sebagai Komandan Batalyon Cakrabirawa ditempatkan oleh Soeharto. Selain itu, Untung dan Latief adalah bawahan Soeharto ketika waktu berada di Jawa Tengah.¹⁸⁷

Kesaksian Mayjen. Mursyid diperkuat oleh Kol. Wisnu Jayengminardo, di mana menurutnya yang melakukan penculikan adalah orang yang *berbaju hijau*, maksudnya adalah tentara di bawah komando seseorang yang diduga adalah Soeharto. Selain itu, keterangan dari Mayjen. R., Pranoto Reksosamodra juga memperkuat tuduhan tentang kelicikan Soeharto dalam meraih kekuasaan. Ny. Supeni (tokoh PNI) tanpa sepengetahuannya, namanya dimasukkan ke dalam Anggota Dewan Revolusi. Ia mengatakan bahwa “Soeharto memang pintar”.¹⁸⁸ Untuk itu, agar masalah ini menjadi tuntas dan sejarah menjadi lurus, Ny. Supeni mengatakan :

“Mestinya yang bertanggung jawab adalah Soeharto. Memang kalau diurut ke atas presidenlah yang harus bertanggung jawab. Tapi, sebelum proses kok Soeharto tidak tahu siapa yang membunuh para Pahlawan Revolusi itu.”¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Ibid.* hlm. 114

¹⁸⁸ *Ibid.* hlm. 171

¹⁸⁹ *Ibid.* hlm. 174

Soebandrio yang dipenjara selama puluhan tahun akibat diduga terlibat G 30 S, mengatakan :

“Saatnya mengungkap dusta Soeharto. Darahku mendidih mendengar G 30 S / PKI. Terlalu banyak luka mengingat peristiwa 30 tahun silam itu. Emosiku sering tak terkontrol ketika membicarakan bagaimana suksesnya Soeharto menjalankan skenario G 30 S / PKI. Inilah alasan utama mengapa aku lebih banyak diam. Istriku, Sri Koesdyantinah memang sering kali mengingatkanku agar tak usah melayani pertanyaan-pertanyaan seputar G 30 S / PKI.”¹⁹⁰

selanjutnya, Soebandrio mengatakan :

“Strategi lain yang sukses dibesar-besarkan Soeharto adalah ketika Bung Karno sakit keras di awal Agustus 1965. Soeharto sukses membangun opini seakan-akan PKI yang selama ini berhubungan mesra dengan Bung Karno khawatir pimpinan nasional akan jatuh ke tangan TNI AD. Aidit dikabarkan mendatangkan dokter ahli dari RRC. Padahal aku yang ketika itu Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Luar Negeri tahu persis bahwa itu hanya rekayasa Soeharto. Aku dan Wakil Perdana Menteri II Laimena, kan dokter dan tahu persis bahwa Bung Karno hanya masuk angin biasa. Soeharto tampaknya ingin memancing provokasi agar PKI duluan memukul TNI AD.”¹⁹¹

Dari berbagai kesaksian, tampak bahwa Soeharto mempunyai andil yang sangat besar dalam tragedi 1 Oktober 1965, karena semua kesaksian pelaku Gestapu memberatkan dirinya. Dalam hal ini, PKI bisa saja terlibat, namun bukan PKI sebagai partai, namun PKI sebagai individu/oknum-oknum, dan oknum-oknum tersebut ternyata adalah rekan-rekan Soeharto, sedangkan Angkatan Darat jelas terlibat terutama Pasukan Cakrabirawa yang bertugas menjemput para Jenderal. Sesungguhnya, tugas Cakrabirawa hanya menjemput, namun situasi panik karena ada perlawanan, menyebabkan tiga Jenderal berhasil ditangkap dalam keadaan mati. Kematian inipun karena disusupi Syam Kamaruzaman. Dalam hal ini, Cakrabirawa hanya diperalat, dan tokoh-tokoh yang memberi

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 202

¹⁹¹ *Ibid.* hlm. 203

komandolah yang harus bertanggung jawab terutama Untung, dan mungkin juga Soeharto, karena Untung sendiri adalah rekan Soeharto, dan Soeharto sendiri sudah mengetahui bahwa akan terjadi penculikan. Namun ia diam saja dan sengaja membiarkan kup 1 Oktober 1965 itu terjadi. Namun secara umum, Angkatan Darat secara tidak langsung terlibat karena dalam Pasukan Pasopati terdiri dari kesatuan-kesatuan batalyon Angkatan Darat.

D. Keterlibatan CIA Dalam Peristiwa 1 Oktober 1965

Terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 telah menyeret berbagai pihak untuk terlibat dalam tragedi berdarah tersebut. Berbagai pihak ikut terseret sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut, baik TNI AD, oknum-oknum PKI, dan bahkan keterlibatan Amerika Serikat. Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada, menunjukkan bahwa secara tidak langsung Amerika Serikat melalui CIA terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965 dan pembantaian massal terhadap orang-orang PKI antara tahun 1965 – 1966.

Dalam kaitannya dengan pembunuhan massal yang berlangsung sejak akhir 1965 sampai awal 1966, keterlibatan Amerika tampaknya sulit dipungkiri. Challis menyebut kembali apa yang pernah ditulis oleh Kathy Kadane di koran *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990 serta koran *Washington Post* edisi 21 Mei 1990, yaitu perihal tindakan CIA menyerahkan suatu daftar kepada pihak AD yang berisi nama orang komunis yang harus dibunuh. Sebagaimana sudah banyak diketahui, terdapat dugaan kuat bahwa agen-agen CIA di Jakarta memberikan

daftar sekitar 5000 orang yang dituduh sebagai pengurus atau anggota PKI yang harus *disingkirkan*.¹⁹²

Markas CIA di AS menyangkal mentah-mentah keterlibatannya dalam penyusunan daftar itu. Tetapi, penyangkalan itu kini diragukan karena dua orang yang waktu itu bekerja di Kedubes AS di Jakarta, yaitu Joseph Lazarsky (Wakil Ketua Cabang CIA di Jakarta) dan Edward Masters (Direktur Bidang Politik Kedubes) menyanggah keterangan tersebut, dengan menyatakan bahwa CIA memang terlibat. Robert Martins, bekas anggota Staf Bidang Politik Kedubes waktu itu, pada 1990 mengakui adanya daftar tersebut. Menurutnya, daftar tersebut merupakan bantuan yang amat berguna bagi AD. Robert Martins mengatakan :

“Mereka (TNI AD, red) mungkin membunuh banyak orang dan tangan saya mungkin berlumuran darah, tetapi toh tidak semuanya jelek. Ada momen di mana seseorang harus mengambil tindakan tegas pada saat-saat yang menentukan.”¹⁹³

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa setidaknya pihak Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta mengetahui bahwa CIA terlibat. Hal ini didukung dengan keterangan seorang bekas agen CIA lain, yaitu Ralph McGehee yang memperkuat tuduhan keterlibatan organisasi intelijen Amerika Serikat yang tampak dalam dua karangan yang terbit di majalah *The Nation* edisi 11 April 1981 dan 24 September 1990. Dalam peristiwa berdarah 1 Oktober 1965, Amerika Serikat melalui CIA diduga kuat ikut bermain di dalamnya dengan bekerja sama dengan salah satu *klik* di dalam tubuh Angkatan Darat. Amerika Serikat dalam hal ini menyokong penuh bagi Angkatan Darat, seperti diketahui bahwa tahun 1965,

¹⁹² Wardaya T. Baskara. *op.cit.* hlm. 155

¹⁹³ *Ibid.* hlm. 156

Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya memerangi komunis, dan pada saat peristiwa 1 Oktober 1965 itu meletus, Amerika Serikat sedang menghadapi Perang Vietnam.

Jauh sebelum G 30 S meletus, keterlibatan Amerika Serikat dalam politik internal Indonesia sebenarnya sudah dimulai tak lama setelah Indonesia merdeka. Keterlibatan Amerika ini dimulai ketika Indonesia dan Belanda sedang melakukan berbagai bentuk negoisasi berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan serta penetapan batas-batas wilayah negara baru Indonesia. Dalam hal ini, Amerika di bawah pemerintahan presiden Harry Truman (1945 – 1953) mendukung Belanda untuk kembali menduduki kepulauan Indonesia. Hal ini dilakukan Amerika karena Amerika memiliki berbagai kepentingan di Indonesia, di antaranya :

1. Ketakutan Amerika akan menyebarnya pengaruh komunis Uni Soviet di wilayah-wilayah Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, maka diharapkan pengaruh komunis tersebut dapat dicegah penyebarannya di Asia Tenggara khususnya Indonesia.
2. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat penting bagi perekonomian Belanda. Hasil-hasil bumi Indonesia, seperti minyak, emas, timah, karet, bauksit, dan kopra, adalah komoditas yang sangat penting bagi perekonomiannya yang telah porak poranda akibat Perang Dunia II. Seberapa besar pun bantuan Amerika yang dikucurkan kepada Belanda belum sanggup untuk mengembalikan perekonomiannya. Dengan alasan itulah Amerika mendukung Belanda untuk

kembali menguasai Indonesia, dengan harapan Belanda dapat membangun kembali perekonomiannya.

3. Amerika memiliki kepentingan perekonomian di Indonesia, terutama karena Amerika mempunyai perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya di Sumatera.

Dengan keberadaan Belanda di Indonesia, dapat menjamin keberadaan perusahaan-perusahaan milik Amerika.

4. Amerika membutuhkan dukungan Belanda dalam Perang Dunia II, dan sebagai imbalannya Amerika mendukung Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

5. Belanda membutuhkan bantuan Amerika untuk membangun kembali negaranya yang luluh lantak dalam Perang Dunia II. Untuk itulah Amerika sangat dibutuhkan untuk membantu Belanda dalam menguasai kembali daerah-daerah bekas jajahannya.

Faktor-faktor di atas semakin memperkuat keterlibatan Amerika dalam urusan internal Indonesia. Tampak jelas bahwa Amerika Serikat mendukung Belanda untuk menguasai Indonesia sehingga hubungan Indonesia -Amerika menjadi tidak baik kala itu. Namun hubungan sikap Amerika terhadap Indonesia mulai berubah setelah tahun 1948, di mana Indonesia berhasil menumpas pemberontakan PKI Madiun. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memerangi komunisme, di mana komunis sangat ditentang keras oleh Amerika. Namun hubungan ini kembali memburuk sehingga campur tangan Amerika terhadap Indonesia menjadi semakin dalam terutama oleh sikap Presiden Sukarno yang mulai melindungi komunis di Indonesia.

Keterlibatan Amerika ini semakin dipertajam dengan tindakan Presiden Sukarno, yaitu keluarnya Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sikap Sukarno yang seakan-akan melindungi PKI dan membiarkan PKI tumbuh dan berkembang di Indonesia, membuat campur tangan Amerika di Indonesia menjadi semakin dalam. Selain mempunyai kepentingan ekonomi, Amerika juga mempunyai kepentingan politik, yaitu memerangi komunisme, dan Amerika tidak menginginkan pengaruh komunis memasuki Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Terdorong oleh keinginan untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis di Indonesia, Presiden Eisenhower di AS mulai menerapkan *Containment Policy* atau kebijakan membendung komunisme yang dulu dimulai oleh Presiden Truman. Berhubung kebijakan macam itu menuntut kerahasiaan, Presiden Eisenhower dan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles banyak bergantung pada CIA. Kebetulan pada waktu itu CIA dikepalai oleh Allen Dulles yang adalah saudara kandung dari Menlu J.F. Dulles. Di bawah kepemimpinan Allen Dulles, CIA menjadi institusi penting yang amat menentukan berbagai kebijakan AS terhadap Indonesia.¹⁹⁴

Pada pertengahan tahun 1957, Presiden Eisenhower menjadi was-was ketika melihat bahwa pemerintah Indonesia semakin lama semakin cenderung *ke kiri-kirian*. Presiden Eisenhower dan sejumlah pembantunya termasuk dua bersaudara Dulles khawatir bahwa Presiden Sukarno dan Angkatan Bersenjata Indonesia sedang membiarkan diri dikuasai oleh kaum komunis. Presiden Sukarno yang berkali-kali menekankan pentingnya kebijakan non-blok, serta pesatnya peningkatan PKI membuat Washington semakin gelisah.¹⁹⁵

¹⁹⁴ *Ibid.* hlm. 87

¹⁹⁵ *Ibid.* hlm. 89 – 90

Keterlibatan CIA sudah tampak sejauh sebelum G 30 S terjadi. Tahun 1958, Amerika pernah membantu Pemberontakan Dewan Revolusi di Sumatera Utara yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dikarenakan adanya ketidakpuasan di antara sejumlah perwira AD sehubungan dengan masalah mutasi dan pengangkatan para perwira AD. Pemerintah AS mendukung pemberontakan itu dengan memandang bahwa hal tersebut adalah kesempatan untuk menggeser orientasi komunis di Indonesia ke arah non-komunis. Untuk itu, Amerika ingin menghancurkan PKI, memperlemah kekuatan AD, dan bila perlu menurunkan Presiden Sukarno. Untuk itu, Amerika memberikan bantuan militer kepada pemberontak. Presiden Sukarno mengetahui keterlibatan Amerika ini, dan beliau mengecam tindakan Amerika. Presiden Sukarno menggugat campur tangan Amerika dengan mengatakan :

“Kalau ada pihak luar yang ingin menjadikan Indonesia seperti Korea kedua atau Vietnam kedua, maka akan pecahlah Perang Dunia III.”¹⁹⁶

Presiden Sukarno sebagai pemimpin dunia ketiga sehubungan dengan sifat netral tidak memihak salah satu blok dalam perang dingin menjelang tahun 1965, menjadi semakin dekat dengan pihak komunis di Indonesia. Kedekatan ini menyebabkan Sukarno menjadi target *number one* dari badan dinas rahasia Amerika Serikat, yaitu CIA. AS yang ketika itu sedang menghadapi perang Vietnam, tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Menurut David T. Thomson, terdapat enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat dalam menghadapi situasi yang memanas di Indonesia, yaitu *pertama*, membiarkan saja (lepas tangan); *kedua*, membujuk Sukarno agar merubah kebijakan; *ketiga*,

¹⁹⁶ *Ibid.* hlm. 94

menyingkirkan Sukarno; *keempat*, mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan; *kelima*, merusak kekuatan PKI; dan *keenam*, merencanakan kehancuran PKI dan sekaligus kejatuhan Sukarno. Dari keenam skenario yang dipersiapkan, ternyata skenario yang terakhir yang dianggap paling tepat dan paling menguntungkan untuk dilaksanakan.¹⁹⁷ Skenario yang dirancang untuk menjatuhkan Sukarno karena mendukung ideologi komunis yang sangat ditakuti AS sekaligus melenyapkan PKI yang ditakuti juga dapat menjadi sumber merajalelanya komunis di Indonesia.

Sebuah telegram CIA pada tahun 1965, menunjukkan bahwa paling tidak sebagian dari para Jenderal memang telah mempersiapkan diri untuk meraih kekuasaan, namun tanpa mencederai Sukarno dan tanpa ingin menurunkannya sebagai kepala negara konstitusional. Adapun sebagian dari telegram tersebut berbunyi :

*“With the eye to post-Sukarno era strong sentiment existed among segment top military command for take over prior demise Sukarno [...] There was no, repeat no, sentiment among any of military leaders to move against Sukarno however, while they might present with fait accompli, coup would be handled in such a way as to preserve Sukarno’s leadership.”*¹⁹⁸ (Dengan satu sudut pandang tentang masa setelah Sukarno, pada saat terjadi pertentangan di antara beberapa bagian dalam tampuk militer terutama tentang pengambilalihan dan penyerahan kekuasaan setelah Sukarno meninggal [.....] tidak di sana, tidak mengulang, namun sentimen di antara beberapa pimpinan atau tokoh militer, untuk bergerak menentang Sukarno, dengan demikian pada suatu saat mereka akan menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan perebutan kekuasaan untuk menggulingkan kepemimpinan Sukarno)

Dengan adanya telegram maupun dokumen-dokumen seperti itu, semakin menambah gencarnya spekulasi tentang peranan CIA dalam mempersiapkan kup

¹⁹⁷ Asul Warman Adam. *Pelurusan Sejarah Indonesia. op.cit.* hlm. 189

¹⁹⁸ Lambert J. Giebels. *op.cit.* hlm. 157

Gestapu. Semakin jelas keterlibatan Amerika Serikat dalam kup berdarah 1 Oktober 1965.

Keterlibatan CIA dalam politik di Indonesia untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno dan PKI telah dimulai sebelum terjadinya kup Gestapu. Berbagai pemberontakan daerah tertentu didalangi atau setidaknya didukung oleh Amerika melalui CIA. Peristiwa-peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Sukarno pun diindikasikan terkait erat dengan keterlibatan CIA. Rencana pembunuhan terhadap Presiden Sukarno baru terbuka pada tahun 1975, ketika apa yang disebut sebagai *Komisi Church* dalam sebuah komisi senat yang diketuai Senator Frank Church untuk menyelidiki operasi-operasi rahasia CIA di luar negeri. Mendengarkan kesaksian berkaitan dengan kegiatan rahasia yang dilakukan oleh agen dinas rahasia tersebut di negara-negara Asia. Dalam hal tersebut, para pejabat CIA telah mengusulkan rencana untuk membunuh seorang pemimpin Asia yang oleh Church disebut sebagai rencana untuk membunuh Presiden Sukarno. Rencana tersebut telah sampai pada tahap penunjukan seorang agen yang akan melaksanakan tugas pembunuhan tersebut. Rencana tersebut terlihat dalam sebuah laporan yang berbunyi demikian :

“...selain rencana-rencana rahasia yang telah dipaparkan dalam laporan ini, komisi juga menemukan sejumlah petunjuk bahwa CIA pernah berencana untuk membunuh presiden Indonesia, Sukarno...Mantan Wakil Direktur Bidang Perencanaan (CIA) Richard Bissel memberikan kesaksian bahwa pembunuhan atas Sukarno ‘pernah dipertimbangkan oleh CIA’, tetapi bahwa rencana itu tidak pernah lebih jauh daripada menentukan seorang aset yang diperkirakan akan direkrut untuk melaksanakan pembunuhan itu. Persenjataan dikirim kepada para pemberontak di Indonesia, namun menurut Bissel, senjata-senjata itu tidak dimaksudkan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sukarno.”¹⁹⁹

¹⁹⁹ *Ibid.* hlm. 101 – 102

Laporan itu berkaitan erat jika dihubungkan dengan terjadinya peristiwa Cikini tanggal 30 November 1957, saat terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno pada saat itu beliau sedang meninggalkan sebuah sekolah di Bilangan Cikini Jakarta, tiba-tiba sejumlah granat dilemparkan ke arahnya. Sukarno sendiri selamat, tetapi ada sepuluh orang tewas dan 45 anak sekolah terluka. Pada waktu itu justru CIA langsung mengeluarkan propaganda bahwa orang-orang komunislah yang melakukan percobaan pembunuhan tersebut.

Usaha-usaha CIA untuk menghancurkan komunis dan menjatuhkan Sukarno tidak hanya berhenti sampai di situ. Pada tahun 1955, CIA memberikan bantuan dana yang besar pada Masyumi untuk mengalahkan PKI dan PNI dalam pemilu 1955. Namun dalam kenyataannya, Masyumi kalah suara dalam pemilu tersebut. Usaha CIA dilanjutkan dengan membantu persenjataan maupun dana dalam berbagai pemberontakan daerah untuk menentang pemerintah, seperti pemberontakan di Sumatera dan pemberontakan PRRI/Permesta.²⁰⁰

Sementara itu, Dubes AS di Indonesia John Allison cenderung tidak memperdulikan perkembangan PKI dan dekat dengan Sukarno. Selain itu, Allison juga menentang keterlibatan Amerika dalam urusan internal Indonesia. Sikap Allison dan perkembangan PKI yang sangat luar biasa, membuat Gedung Putih menjadi gelisah. Ketidak-tegasan sikap Allison tersebut berujung pada pemberhentian Allison sebagai Dubes AS di Indonesia dan digantikan oleh Howard P. Jones, di mana penunjukkan tersebut sesuai dengan keinginan para agen CIA, karena Jones dinilai loyal pada CIA. Melalui Jones serta laporan Staf

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 91

CIA, Gedung Putih terus memantau perkembangan politik di Indonesia, terutama PKI.

Dalam pemberontakan-pemberontakan daerah yang dimotori Amerika, berbagai macam bantuan disalurkan seperti senjata, kapal selam milik AL Amerika, pelatihan militer, bahkan dilengkapi dengan Angkatan Darat AS. Namun pemberontakan daerah tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemberontakan-pemberontakan daerah tersebut berhasil dipadamkan oleh kekuatan TNI. Dari pemberontakan-pemberontakan daerah seperti di Sumatera, PRRI/Permesta, Maluku, Sukarno mencurigai adanya pihak ketiga. Untuk itu, Presiden Sukarno pernah mengatakan :

“Seringkali ada pihak ketiga yang campur tangan untuk menyelesaikan suatu konflik, tetapi ketika pihak ketiga itu mulai mengebom kita, itu namanya bukan campur tangan. Pada hari Minggu di bulan April 1958, misalnya pesawat-pesawat pemberontak melancarkan serangan berdarah di atas Pulau Kristen Ambon dan salah satu bomnya langsung mengenai sebuah gereja. Gedung gereja hancur dan semua orang di dalamnya tewas. Pesawat-pesawat itu juga menenggelamkan sebuah kapal milik Indonesia yang sedang berlabuh dan menewaskan seluruh penumpangnya. Dalam serangan tunggal itu, ada sekitar 700-an orang yang menjadi korban. Jumlah mereka yang tewas tidak dapat dihitung.”²⁰¹

Kecurigaan Sukarno akan keterlibatan Amerika dalam berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia akhirnya terbukti. Sebuah pesawat pemberontak jatuh pada saat melakukan pengeboman atas wilayah Ambon pada 18 Mei 1958. Peristiwa itu terjadi selang beberapa hari pasca pengeboman atas gereja di Ambon. Dalam insiden jatuhnya pesawat tersebut, pilot dan ko-pilotnya selamat dan tertangkap pihak RI, dan pilot tersebut adalah salah satu agen CIA. Dengan tertangkapnya pilot yang sekaligus agen CIA tersebut, maka pihak Amerika di

²⁰¹ *Ibid.* hlm. 119 – 120

Washington tidak dapat lagi menyangkal keterlibatannya dalam berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan CIA pun gagal total. Namun niat AS untuk memadamkan pengaruh komunis di Indonesia tidak akan berhenti dengan kegagalan itu. Pemantauan terhadap Indonesia terus dilakukan dan menanti saat yang tepat untuk kembali menghancurkan komunis dan menjatuhkan Presiden Sukarno.

Yang jelas, kisah tentang keterlibatan rahasia Amerika dalam perpolitikan di Indonesia tidak berakhir dengan selesainya pemberontakan di daerah dan pembalikan kebijakan AS terhadap Indonesia pada 1958. Pada periode-periode selanjutnya, dukungan Amerika terhadap militer Indonesia terus meningkat. Tujuannya adalah untuk menghabisi PKI, membatasi kekuasaan Presiden Sukarno, dan mengubah orientasi pemerintah Indonesia agar menjadi lebih pro-Barat.²⁰² Dengan terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965 dan kemudian Angkatan Darat berhasil mengambil alih pemerintahan Indonesia, memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Amerika. Dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, menyebabkan PKI ditumpas hingga ke akar-akarnya oleh TNI AD, sekaligus menjatuhkan kekuasaan Sukarno dan TNI AD tampil sebagai penyelamat dengan Soeharto sebagai *“figure head”* nya.

Memang tidak mudah untuk menemukan *the smoking gun* dari keterlibatan CIA dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Selain karena banyak faktor-faktor pokok dibalik Peristiwa 1 Oktober 1965, peristiwa tersebut juga terkait dengan konflik internal di tubuh AD juga karena belum semua dokumen yang berkaitan dengan Tragedi'65 dideklasifikasi. Meskipun demikian, sejumlah dokumen resmi mendukung dugaan akan keterlibatan AS khususnya CIA. Di perpustakaan

Lyndon B. Johnson di Texas, dapat ditemukan sejumlah dokumen yang menunjukkan bahwa Amerika mengikuti dari dekat setiap jengkal perkembangan yang ada di Indonesia pada saat-saat kritis itu.²⁰³

Namun jika dilihat keterlibatan Amerika dalam berbagai pemberontakan yang terjadi sebelum peristiwa 1 Oktober 1965 dan peristiwa-peristiwa pasca 1 Oktober 1965, seperti pembantaian massal terhadap orang-orang PKI, menunjukkan betapa besarnya keterlibatan Amerika melalui CIA di dalamnya. Jadi, tidak mengherankan jika dalam kup Gestapu 1 Oktober 1965, keterlibatan Amerika kembali dikaitkan karena peristiwa tersebut adalah rantai penghubung (*missing link*) antara keterlibatan Amerika dalam pemberontakan daerah sebelum dan pasca kup Gestapu 1965.

D. Keterlibatan Soeharto Dalam Peristiwa 1 Oktober 1965

Meletusnya Peristiwa 1 Oktober 1965 merupakan *turning point* dalam perkembangan politik nasional Indonesia. Selama Republik Indonesia berdiri, kejadian ini adalah yang paling mengancam eksistensi dan keutuhan negara.²⁰⁴ Tragedi ini telah menorehkan lembaran paling hitam dalam perjalanan sejarah Indonesia, mengingat betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari Peristiwa 1 Oktober 1965 ini tidak hanya bagi PKI yang konon mendalangi kup tersebut, namun juga bagi rakyat sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak-pihak yang terlibat, dan kup berdarah itu ibarat benang kusut yang sulit untuk diluruskan. Fakta-fakta lama yang ditampilkan oleh rezim orde baru seakan-akan menunjukkan bahwa PKI lah satu-satunya dalang utama yang wajib memikul dosa

²⁰² *Ibid.* hlm. 139

²⁰³ *Ibid.* hlm. 158

²⁰⁴ Yahya A. Muhaimin. *op.cit.* hlm. 183

atas gugurnya enam perwira tinggi Angkatan Darat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.²⁰⁵

Buku putih yang diterbitkan pemerintah orde baru seolah-olah adalah penyelamat bagi kesalahan-kesalahan dalam keterlibatan Angkatan Darat dalam tragedi berdarah tersebut maupun pembantaian massal pasca tragedi itu. Benang-benang kusut yang sengaja diciptakan oleh pemerintah orde baru sehubungan dengan peristiwa tersebut, sedikit demi sedikit mulai diluruskan terutama setelah Soeharto lengser dari kursi kekuasaan yang selama kurun waktu 30 tahun berhasil dipertahankannya.

Secara tidak langsung, lengsernya Soeharto dari kursi kekuasaannya adalah buah dari karma yang harus ditanggungnya. Kekuatan massa yang dikerahkannya pada waktu menggeser Sukarno, kini terjadi pada dirinya sendiri. Motif sejarah yang sama kembali terulang, dan kini menimpa dirinya. Seiring dengan itu, terkuaklah fakta-fakta baru yang meluruskan sejarah yang mana selama puluhan tahun tersimpan rapi. PKI yang selama ini dikatakan sebagai dalang utama dalam tragedi berdarah tersebut kembali diragukan.

Banyaknya fakta-fakta yang terbungkam selama orde baru, seolah-olah membenarkan sejarah yang selama ini telah dibelokkan demi kepentingan penguasa. Jika pun benar PKI terlibat, namun bukanlah PKI sebagai partai secara keseluruhan, namun hanya oknum-oknum tertentu, dan jika diteliti kembali, oknum-oknum tersebut adalah bagian dari kalangan militer Angkatan Darat sendiri. Terlepas dari PKI sendiri, Angkatan Darat juga berperan besar dalam kup berdarah tersebut. Hal ini yang menyebabkan muncul dugaan bahwa terjadinya

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 196

Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah puncak dari konflik intern Angkatan Darat itu sendiri.

Sebelum malam 30 September 1965, Mayjen. Soeharto “bukan apa-apa”. Dia hanya diberi jabatan sebagai pimpinan Kostrad, kesatuan yang waktu itu tidak terlalu bergengsi. Menurut dugaan banyak orang, karir militer Soeharto akan berhenti di sana, mengingat di tubuh AD ada banyak tokoh yang lebih senior dan memiliki kredibilitas tinggi di mata Sukarno. Jadi, dengan terjadinya tragedi Peristiwa 1 Oktober 1965 merupakan *blessing in disguised* bagi karir Soeharto.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, Soeharto mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus, yaitu *pertama*, tersingkirnya pimpinan teras AD yang berarti semakin melejitkan namanya ke posisi puncak. Dengan kata lain, Soeharto tidak memiliki saingan lagi untuk menguasai AD; *kedua*, yaitu melemahnya kepemimpinan Sukarno karena kehadirannya di Halim Perdanakusuma sehingga menimbulkan dugaan bahwa beliau terlibat dalam peristiwa tersebut; *ketiga*, dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 sekaligus juga melemahkan posisi kelompok-kelompok loyalis yang ada di belakang Sukarno, termasuk Angkatan Udara. Tentu saja ini peluang bagi AD, khususnya Soeharto untuk mengendalikan situasi sembari perlahan-lahan mendesak Presiden Sukarno ke posisi yang sulit; *keempat*, dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 telah menempatkan Soeharto sebagai *public figure* yang baru.

Ibarat seorang *cowboy* yang memerangi gerombolan penjahat, tindakan-tindakan Soeharto selalu dalam *timing* yang tepat. Pengangkatan jenazah para

jenderal di bawah liputan luas media massa yang juga berhasil dalam kontrolnya, membantunya memperkuat *main stream* di mana dia sendiri berada di depan.²⁰⁶

Jika dilihat kembali bahwa penculikan perwira tinggi Angkatan Darat itu dilaksanakan kelompok militer yang berintikan kesatuan-kesatuan dari Batalyon I Resimen Cakrabirawa, Natalyon 454 Divisi Diponegoro, Batalyon 530 Divisi Brawijaya, Pasukan Gerak Cepat AURI, dan Brigade Infanteri I Jakarta Raya, yang kesemuanya bergabung dalam satu unit yang memakai nama Pasukan Pasopati dengan Komandan Lettu. Abdul Arif.²⁰⁷

Sebagian besar adalah tentara Angkatan Darat yang secara tidak langsung bahwa dalam tragedi berdarah 1 Oktober, TNI AD memainkan peranan yang cukup besar. Adapun pihak yang paling diuntungkan dalam peristiwa tersebut, yaitu Angkatan Darat yang kemudian tampil paling menonjol sebagai penyelamat bangsa, dengan Soeharto sebagai *figure head* nya. Dengan meletusnya peristiwa 1 Oktober 1965 ini, secara tidak langsung menjadi jembatan bagi Soeharto untuk sampai pada kursi presiden dengan mendiskreditkan Sukarno.²⁰⁸

Dalam kaitannya dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, amat jelas bahwa Soeharto memposisikan diri sebagai Jenderal yang anti komunis. Namun hal ini justru semakin mempertegas kemisteriusan dirinya. Sikapnya terhadap kelompok komunis pasca terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 mencerminkan bahwa Soeharto adalah sosok yang anti komunis dan merupakan Jenderal yang berhaluan kanan. Logika seperti ini bertentangan dengan fakta bahwa Soeharto tidak termasuk dalam daftar Jenderal yang akan dicitrak oleh pelaku Peristiwa 1 Oktober 1965, yang notabene merupakan Jenderal-Jenderal yang anti PKI. Dengan tidak dicantumkannya Soeharto dalam daftar Jenderal AD yang akan diculik, maka minimal Soeharto tidak dianggap memusuhi PKI. Ini juga berkaitan

²⁰⁶ Proyek Historiografi Center for Information Analysis. *op.cit.* hlm. 127 – 128

²⁰⁷ *Ibid.* hlm. 184 – 185

²⁰⁸ *Ibid.* hlm 67

dengan hubungan personalnya yang erat dengan militer yang berhaluan kiri yang kemudian menjadi pelaku utama operasional gerakan.²⁰⁹

Keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 juga tampak pada kehadiran batalion-batalion Angkatan Darat ke Jakarta yang pada mulanya didatangkan ke Jakarta untuk menghadiri peringatan hari ABRI tanggal 5 Oktober 1965. Dalam kenyataannya batalion-batalion tersebut seperti batalion 545 Divisi Diponegoro, Batalion 530 Divisi Brawijaya tersebut kemudian bergabung dalam satu unit yang memakai nama pasukan Pasopati dengan komandan Lettu Abdul Arif.²¹⁰

Hal tersebut tampak pada tanggal 21 September 1965 di mana Pangkostrad Mayjen Soeharto mengirim radiogram kepada Yon 530/Brawijaya, Yon 545/Diponegoro dan Yon 328/Siliwangi agar segera datang ke Jakarta untuk mengikuti HUT ABRI ke-20 tanggal 5 Oktober 1965, selain pasukan-pasukan tersebut kemudian tergabung dalam pasukan yang menculik para jenderal AD, salah satu pasukan yang dipimpin oleh serka Bungkus dengan Wan Da Yon nya Supardjo, malah dituding sebagai pasukan liar yang berkeliaran di sekitar monas pada malam kejadian.²¹¹

Ketangkasan Soeharto dalam meredam aksi komplotan pelaku Peristiwa 1 Oktober 1965 memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi (isteri ketiga Sukarno), yang mengatakan :

“Sepertinya dia (Suharto, red) sudah tahu semua, seakan-akan telah direncanakan...Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi

²⁰⁹ *Ibid.* hlm. 75

²¹⁰ *Ibid.* hlm. 127-128

²¹¹ Eros Djarot dkk, *Siapa Sebenarnya Soeharto Fakta dan Kesaksian Pelaku G 30S/PKI*, Media Kita, Jakarta, 2006, hlm.103.

pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G 30 S, ia tak mungkin bisa melakukannya.²¹²

Peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto sebagaimana kita ketahui tidak berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan percobaan kudeta 1 Oktober 1965 dan diakhiri dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen. Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (*Who were the real Plotters of the Coup Againsts Presiden Soekarno*) sebagai kudeta merangkak. Saskia menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup kedua, sedangkan Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, yaitu *pertama*, gerakan tiga puluh September yang merupakan “kudeta gadungan”. *Kedua* tindakan balasan, yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal dan *ketiga* pengikisan sisa-sisa kekuatan Sukarno.²¹³

Teori yang dikemukakan oleh Peter Dale-Scott tampaknya lebih mendekati kebenaran jika dilihat dari sepak terjang Soeharto dalam mencapai tampuk kekuasaan. Berbagai cara licik pun ditempuh asalkan apa yang menjadi cita-citanya tercapai, termasuk “mengorbankan” sesama rekannya dalam Angkatan Darat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Keterangan salah satu pelaku utama dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 yaitu A. Latief yang mengatakan bahwa sekitar pukul 23.00 tanggal 30 September 1965, dia melapor kepada Soeharto yang sedang menunggu puteranya yang sedang sakit karena ketumpahan sup panas di RSPAD.²¹⁴ Keterangan yang disampaikan A. Latief dibantah oleh Soeharto. Menurutnya, malam itu Latief berjalan mondar-mandir di depan *zaal*

²¹² *Ibid.* hlm. 76

²¹³ Asvi Warman Adam. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. op.cit.* hlm. 12

²¹⁴ P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm. 80

tempat Tommy di rawat dengan niat ingin membunuhnya, namun niat itu diurungkan karena banyak orang di rumah sakit.

Keterangan yang diberikan Latief sesuai dengan apa yang ditulis oleh Saskia bahwa :

”Besarnya kemungkinan Jenderal Soeharto...sudah mengetahui sebelumnya tentang akan terjadinya kup...Tetapi barangkali agak terlalu jauh ditarik kesimpulan bahwa ia telah mendalangi kup pertama, yang mengharuskan mengatur pembunuhan terhadap rekan-rekannya. Namun ketika akhirnya Soeharto bertindak, ia melakukannya dengan cepat dan tegas...sejak saat itu...ia telah memulai dengan siasatnya untuk menggulingkan Sukarno sambil memaksakan diri sendiri ke atas tampuk kekuasaan. Ia pasti menyadari bahwa yang diperlukannya bukan sekedar pameran kekuatan militer...Adanya para perempuan di Lubang Buaya itulah yang digunakan sebagai amunisi oleh Soeharto demi transisi mental yang diangankannya itu. Dengan itu bukan hanya perempuan yang berhimpun di sana akan dimusnahkannya dengan segala daya, tetapi juga kaum komunis dapat dijatuhkannya sama sekali. Sementara itu, Sukarno yang menunjukkan dukungannya pada PKI dapat dipertontonkan oleh sebagian pemimpin yang tak becus. Kegagalan Sukarno melindungi PKI dapat dilihat sebagai isyarat pudarnya wahyu kekuasaan dan ketiadadayaan, sehingga sudah pasti Sukarno akan bisa dilenyapkan dari percaturan politik.”²¹⁵

Dalam percaturan politik, Soeharto termasuk pintar dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk merealisasikan tujuan pribadi dengan dalih demi keselamatan negara. Walaupun dalam kenyataannya bahwa apa yang dilakukan Soeharto adalah demi keselamatan negara, namun hal tersebut telah *ditunggangi* oleh kepentingan pribadi untuk merebut tampuk kekuasaan dengan cara-cara yang “terkesan” konstitusional.

Dalam usahanya menggulingkan Sukarno dan menumpas PKI hingga ke akar-akarnya, semuanya itu terkesan konstitusional dengan mengatasnamakan rakyat dan demi keselamatan negara. Ketidakmampuan Sukarno dalam mengatasi

²¹⁵ Asvi Warman Adam. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. op.cit.* hlm. 13 – 14

terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 dan kecenderungannya melindungi PKI, dijadikan senjata ampuh oleh Soeharto untuk menyerang balik Sukarno, sehingga memaksa presiden Sukarno untuk lengser dari kursi Kepresidenan RI, setelah sebelumnya Soeharto merampas perlahan-lahan kekuasaan darinya melalui Supersemar. Di dalam ketidakberdayaan Sukarno itulah Soeharto semakin gencar menyerang Sukarno dengan fakta-fakta dan keburukan Sukarno, sehingga sedikit demi sedikit kewibawaan Sukarno hilang, bahkan beliau tidak sanggup lagi untuk melindungi dirinya sendiri.

Jika dilihat perjalanan karir Soeharto, tampak bahwa dalam setiap usahanya untuk naik ke jabatan tertentu pasti selalu ada yang dikorbankan. Soeharto berhasil menggantikan A. Yani sebagai Panglima dalam pembebasan Irian Barat, sehingga ia berhasil diangkat menjadi Pangkostrad tanggal 1 Mei 1963. Dengan jabatan dan kekuasaan yang cukup tinggi, dia mulai berani menyusun rencana untuk mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan pertikaian antara PKI dan TNI AD.

Setelah Presiden Sukarno lengser dari kekuasaannya, pelaku-pelaku Gestapu yang masih hidup yang selama kekuasaan Soeharto, mereka dipenjarakan selama puluhan tahun karena terlibat maupun diduga terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965. Selama itu pula para saksi dan pelaku yang mengetahui dengan jelas tentang tragedi Gestapu tersebut terbungkam. Dalam tragedi Gestapu di mana berdasarkan keterangan-keterangan para pelaku bahwa Soeharto terlibat bahkan Soeharto juga diduga sebagai juru kunci dalam tragedi berdarah tersebut yang mengakibatkan tewasnya enam perwira tinggi AD. Kecurigaan ini beralasan jika melihat sepak terjang Soeharto dalam membasmi PKI dalam pembantaian massal pasca Peristiwa 1 Oktober 1965, merekayasa Supersemar, dan pada

puncaknya menggulingkan Presiden Sukarno. Kesaksian-kesaksian para pelaku Gestapu itu seakan-akan ingin menuntut keadilan, ingin menuntut kebenaran, dan ingin menunjukkan bahwa dengan mengesampingkan Sukarno, sesungguhnya Soeharto lah yang harus bertanggung jawab atas tragedi berdarah tersebut.

Jika diperhatikan periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966, tampak perkembangan peristiwa yang demikian cepat dan luar biasa. Soeharto adalah seorang ahli strategi yang handal, tetapi ia bukan seorang *grandmaster* yang mampu menghitung 10–15 langkah ke depan di papan catur. Ia lebih banyak beruntung karena piawai memanfaatkan kesempatan. Bisa saja periode enam bulan setelah peristiwa 1 Oktober 1965 itu disebut Kudeta Merangkak, tetapi ini adalah sebuah drama tanpa sutradara dan skenario yang ketat. Soeharto bukan dalang melainkan pemain yang mampu berimprovisasi.²¹⁶

²¹⁶ Asvi Warman Adam. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. op.cit.* hlm. 14 – 15

BAB IV

DAMPAK PERISTIWA 1 OKTOBER 1965

BAGI RAKYAT INDONESIA

A. Dampak Politik Peristiwa 1 Oktober 1965

1. Munculnya Tritura dan Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Pasca terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, kondisi politik Indonesia memang belum stabil meskipun peristiwa yang konon didalangi PKI telah berhasil ditumpas oleh TNI AD di bawah pimpinan Soeharto. Namun situasi politik belum pulih seperti sedia kala. Dapat dikatakan bahwa terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah awal babak baru dalam perebutan “kekuasaan” yang dilakukan oleh Soeharto. Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, munculnya Tritura, dan lahirnya Supersemar adalah satu rangkaian yang telah tersusun rapi yang dilakukan Soeharto dalam usahanya untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno.

Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Sukarno kepada Soeharto tanggal 11 Maret 1966 yang kemudian dikenal dengan Supersemar bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Gerakan 30 September merupakan satu rangkaian dengan Supersemar.²¹⁷ Rangkaian yang telah ditata rapi oleh Soeharto tersebut merupakan “Kudeta Bertahap” yang dilakukan oleh Soeharto yang pada puncaknya berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno.²¹⁸

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 2

²¹⁸ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, op.cit,hlm.67

Pasca terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, kondisi politik Indonesia menjadi kacau, karena banyak terjadi demonstrasi-demonstrasi yang menuntut dibubarkannya PKI. Pikiran rakyat telah dipengaruhi oleh Soeharto bahwa PKI adalah dalang dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, sehingga membuat situasi negara menjadi buruk. Demonstrasi-demonstrasi yang menuntut dibubarkannya PKI tidak hanya terjadi di Jakarta saja melainkan juga terjadi di daerah, misalnya di Yogyakarta.

Dalam keadaan negara yang sedang krisis ekonomi dan keadaan politik yang keruh serta rakyat menunggu keputusan presiden atas terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, maka mulai munculah kesatuan-kesatuan aksi, antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan KAPPI yang terus melakukan demonstrasi. Maka dari itu, dengan dipelopori KAMI dimulailah aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dengan jaket kuningnya pada tanggal 10 Januari 1966 yang melanda hampir hampir seluruh jalanan di ibu kota selama kurang lebih 60 hari, di mana di dalam tuntutan mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat.²¹⁹ Gerakan demonstrasi KAMI/KAPPI tersebut sampai pada puncaknya dengan rumusan tuntutan yang kemudian dikenal dengan Tritura.²²⁰ Tritura itu teretus pada tanggal 10 Januari 1966, yang berisi tuntutan : *pertama*, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya; *kedua*, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI; dan *ketiga*, perbaikan ekonomi dan penurunan harga.²²¹ Sangat jelas bahwa rakyat Indonesia menginginkan adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik

²¹⁹ P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm. 98

²²⁰ Todiruan Dydo. *op.cit.* hlm. 84 – 85

²²¹ Tuk Setyohadi. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa ke Masa* Rajawali Corporation. Bogor. 2002. hlm. 113

dengan membubarkan PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI serta melakukan perbaikan ekonomi.

Inilah gerakan yang terus terang menentang kebijaksanaan Presiden Sukarno dan secara sembunyi-sembunyi didukung oleh Mayjen. Soeharto dan Jenderal Nasution. Namun secara resmi Mayjen. Soeharto masih dipercaya oleh Presiden Sukarno, sedangkan Jenderal Nasution perlahan-lahan disingkirkan dari pemerintahan.²²² Dengan demikian, Mayjen. Soeharto secara politis dapat diterima oleh Presiden Sukarno dan oleh lawan politiknya termasuk KAMI, meskipun sebenarnya dia mempunyai tujuan sendiri yang diperjuangkan. Meskipun secara lahiriah mendukung Sukarno, Soeharto diam-diam memerintahkan Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad untuk melindungi mahasiswa yang berdemonstrasi dari serangan Cakrabirawa.²²³

Untuk mengatasi kemelut politik yang terus memanas, Presiden Sukarno melakukan *reshuffle* kabinet Dwikora pada tanggal 21 Februari 1966 dan kabinet yang baru dibentuk tersebut diberi nama “Kabinet Seratus Menteri”. Ternyata dalam formasi kabinet tersebut masih muncul nama-nama yang diidentifikasi massa sebagai orang-orang PKI. Para mahasiswa menyebut kabinet tersebut sebagai “Kabinet Gestapu”. Maka, pada saat diadakan pelantikan kabinet tersebut, terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan Pasukan Cakrabirawa yang menyebabkan seorang mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak oleh Resimen Cakrabirawa. Selain Arif Rahman Hakim yang meninggal dalam demonstrasi menuntut Tritura, ada dua korban lain yang bernasib sama dengannya yang terjadi di Yogyakarta. Kedua orang tersebut

²²² P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm. 96

²²³ *Ibid.* hlm. 96

adalah *pertama*, Aris Munandar, 12 tahun, pelajar SMP VI Muhammadiyah, beralamat di Ambarwinangun, Kasihan, Bantul. Yang *kedua*, adalah Margono, 20 tahun, pelajar SPG Muhammadiyah I, beralamat di Moyudan, Sleman. Keduanya tewas dalam demonstrasi di Jalan Jagang Kauman.²²⁴

Margono meninggal karena tembakan di dadanya, sedangkan Aris Munandar meninggal dalam kondisi kepala pecah akibat pukulan benda keras. Pemakaman keduanya bertepatan dengan ketika Presiden Sukarno meninggalkan Sidang Paripurna kabinet yang kemudian memunculkan Supersemar.²²⁵ Dapat dikatakan bahwa Arif Rahman Hakim, Margono, dan Aris Munandar adalah tumbal Supersemar.

Sementara itu untuk menghadiri *reshuffle* kabinet, banyak menteri yang dijemput di rumahnya dengan helikopter, hanya kabarnya cuma Frans Seda yang lancar-lancar saja mengendarai mobilnya dari rumah ke istana, lantaran massa telah mengenalnya sebagai bukan orang PKI.²²⁶ Keadaan menjadi gawat keesokan harinya pada tanggal 2 Februari 1966, di mana Presiden Sukarno sebagai Panglima Komando Ganyang Malaysia membubarkan KAMI.²²⁷ Pada tanggal 11 Maret 1966, kabinet mengadakan sidang paripurna yang bertujuan mencari jalan keluar dari krisis yang memuncak.²²⁸ Selain itu, Presiden Sukarno juga berpidato untuk menegaskan kembali komitmennya pada Marxisme, dan menuntut menteri-menterinya agar mereka setia sepenuhnya kepadanya atau mengundurkan diri. Pada waktu yang bersamaan, Kemal Idris dan Sarwo Edhie telah menyiapkan tiga

²²⁴ Padamulia Lubis. *op.cit.* hlm. 46

²²⁵ *Ibid.* hlm. 48

²²⁶ Todiruan Dydo. *op.cit.* hlm. 86

²²⁷ P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm. 100

²²⁸ P.J. Suwarno. *ibid.* hlm. 101

kompi pasukan RPKAD dan Kostrad di seberang Istana. Pasukan-pasukan itu telah melepaskan semua tanda pengenal mereka. Kehadiran mereka rupa-rupanya hanya sekedar simbolis saja untuk *mengisyaratkan* kepada para mahasiswa dan tokoh-tokoh partai politik yang membangkang, bahwa angkatan darat sudah siap untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam perjuangan menentang presiden.²²⁹

Pasukan RPKAD dan Kostrad ini menyampaikan surat lewat intel Cakrabirawa kepada Brigjen. Sabur, yang isinya laporan pendek bahwa ada usaha menculik presiden dan para menteri. Presiden Sukarno merasa panik dan khawatir, kemudian meninggalkan sidang dan segera terbang dengan menggunakan helikopter menuju Istana Bogor dengan disertai Chaerul Saleh dan Soebandrio. Sidang ditutup oleh Waperdam II Dr. J. Laimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil.²³⁰

Melihat situasi seperti ini, satu pertanyaan penting yang perlu diajukan di sini adalah sejauh mana hubungan Soeharto dengan Kemal Idris dan Sarwo Edhie, serta sejauh mana Soeharto mengetahui “demonstrasi” RPKAD itu. Ketidakhadiran Soeharto pada sidang kabinet tersebut dengan alasan sakit yang tidak berarti, mungkin dapat menjadi pertanyaan, apakah Soeharto sudah mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh Kemal Idris dan Sarwo Edhie itu. Tetapi jika dilihat kembali ketika Soeharto memerintahkan Kemal Idris (Kepala Staf Kostrad) untuk melindungi mahasiswa yang berdemonstrasi dari serangan Cakrabirawa, dapat dilihat bahwa Kemal Idris sangat patuh pada

²²⁹ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm. 406

²³⁰ P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm. 101 – 102

perintah Soeharto. Jadi, dugaan terkuat adalah bahwa Soeharto ada dibalik insiden “pasukan tak dikenal” yang mengepung Istana sehingga Presiden Sukarno terpaksa “kabur” ke Istana Bogor.

Kekhawatiran dan kepanikan Presiden Sukarno adalah keuntungan bagi Soeharto. Seandainya Sukarno diberi waktu untuk ketenangan berfikir dan kepercayaan pada diri sendiri, Soeharto akan disalahkan atas gerakan pasukan RPKAD itu, dan hal tersebut bisa membahayakan posisi dan kebijaksanaannya. Sebaliknya, selama Sukarno masih dalam keadaan bingung dan ketakutan, maka Sukarno bisa dipaksa untuk memberikan konsesi yang penting.²³¹ Dengan kepergian presiden ke Istana Bogor inilah yang kemudian memunculkan peristiwa yang sangat kontroversial, yaitu lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Sukarno kepada Soeharto tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Supersemar, mengandung arti yang sangat penting dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia, terutama penting bagi TNI AD dalam hubungannya dengan legitimasi peranan politik yang dimainkannya. Surat perintah itu pula yang kemudian mengakhiri *showdown* antara Presiden Sukarno yang sejak 1959 telah menjadi figur politik yang dominan melawan Angkatan Darat.²³²

Terbitnya Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto telah memberikan wewenang kekuasaan kepada Soeharto untuk memegang kekuasaan dalam memulihkan stabilitas keamanan dalam negeri. Yang masih menjadi

²³¹ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm. 407 – 408

²³² Yahya Muhaimin. *Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia 1945 – 1966*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1982. hlm. 211

pertentangan saat ini adalah mengenai proses penyerahan kekuasaan melalui Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto. Yang masih menjadi pertanyaan, apakah Supersemar itu diserahkan oleh Presiden Sukarno kepada Soeharto dengan suka rela untuk memulihkan stabilitas keamanan, ataukah dengan *paksaan dan todongan senjata*, tidak dapat dijawab hanya dengan menggunakan keterangan dari satu pihak, melainkan harus mendengar dari dua pihak yang berhubungan dengan masalah ini.

Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, kontroversi tentang Supersemar makin menjadi-jadi. Kontroversi *pertama*, yaitu tentang proses penyusunan dan penyerahan surat tersebut yang terkesan tidak wajar. Kontroversi *kedua*, yaitu tentang siapa pengetik Supersemar, dan yang *ketiga*, yaitu yang disampaikan oleh Ben Anderson tentang pengakuan seorang tentara berpangkat rendah yang waktu itu bertugas di Istana Bogor bahwa mungkin saja surat perintah yang asli itu dihilangkan, karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat. Jadi, jika dipertahankan tentu sangat lucu karena surat kepresidenan ditulis dengan kertas kop MBAD. Jadi, surat itu “dihilangkan bukan karena isi, tetapi karena kop suratnya.”²³³

Untuk menguak kebenaran dari proses penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto, perlu diteliti kembali terutama dengan melihat kesaksian-kesaksian para tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa 11 Maret 1966. Kesaksian *pertama*, yaitu pengakuan Sukardjo Wilarjito (mantan anggota Cakrabirawa Letnan Dua) yang telah ditahan oleh pemerintah Soeharto selama

²³³ Asvi Warman Adam. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Ombak. Yogyakarta. hlm. 8 – 10

sebelas tahun tanpa pengadilan. Menurutnya, Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Sukarno sehingga penugasan itu diberikan dalam keadaan terpaksa.²³⁴ Kesaksian Sukardjo didukung oleh Kaswadi (77 tahun) dan Serka (Purn) Rian Ismail yang kini bermukim di Klaten, Jawa Tengah. Mereka melihat bahwa yang datang ke Istana Bogor berjumlah empat orang, bukan tiga orang seperti yang diketahui selama ini, bahkan Kuswadi berkata bahwa :

“Pada waktu itu, 11 Maret 1966, saya, melihat Panggabean ada di Istana Bogor. Saat itu sekitar pukul 01.00 WIB dini hari. Panggabean datang mengendarai mobil Jip dan berpakaian dinas militer, kemudian ia berjalan masuk ke Istana Bogor.”²³⁵

Selanjutnya, menurut Sukardjo saat dia melapor kepada Presiden Sukarno, keempat Jenderal tersebut, yakni Amir Mahmud, Basuki Rahmad, Mohammad Yusuf, dan Panggabean sudah masuk di ruang kerja presiden.²³⁶ Karena saat itu sudah larut malam, Sukarno keluar dari kamar tidur dan menemui empat Jenderal tersebut, kemudian Sukarno langsung disodori map dan menandatangani surat di dalamnya di bawah “todongan” pistol Basuki Rahmad dan Panggabean yang siap ditembakkan. Dalam keadaan demikian, Sukarno terpaksa menandatangani surat tersebut dengan mengatakan bahwa jika keamanan sudah stabil, mandat tersebut harus segera dikembalikan padanya lagi. Peristiwa itu hanya berlangsung sekitar 15 menit, dan sesaat setelah itu Wilardjito menghilang karena ditangkap oleh tentara tak dikenal dan dimasukkan dalam rumah tahanan militer.

Kesaksian *kedua*, yaitu oleh Jenderal M. Yusuf. Pada tanggal 4 September 1998. Ia mengatakan bahwa yang menemui Sukarno tanggal 11 Maret 1966 hanya

²³⁴ *Ibid.* hlm. 52

²³⁵ *Ibid.* hlm. 52 – 53

²³⁶ P.J. Suwarno. *op.cit.* hlm. 105

tiga Jenderal, dan mereka di sana hanya sampai pukul 20.30 WIB. Tidak ditanyakan wartawan, berapa lama ketiga Jenderal itu di Istana Bogor dan apa yang dibicarakan. Kalau betul mereka pulang pukul 20.30 WIB, berarti pembicaraan berlangsung alot. Menanggapi sanggahan M. Yusuf tersebut, Sukardjo tetap pada pengakuannya, bahkan bersedia melakukan *sumpah pocong* di pengadilan.²³⁷

Kesaksian *ketiga*, yaitu keterangan yang diberikan oleh Ibu Hartini Sukarno ketika dia diwawancarai oleh Bambang Noorsena pada tanggal 7 Juli 2000 di Jakarta. Ia mengatakan bahwa tiga orang Jenderal tersebut “menodong” Bung Karno untuk menandatangani surat perintah yang telah dirancang oleh Soeharto, tapi dia tidak terus menandatangani, namun masuk kamar selama tiga jam. Ketika keluar dari kamar, Bung Karno akhirnya menandatangani surat perintah tersebut.²³⁸

Kesaksian *keempat*, yaitu oleh Amir Mahmud. Menurutnya, mereka bertiga datang ke Istana Bogor pada siang hari saat presiden Sukarno tidur. Setelah bangun dari tidur, terjadi pembicaraan mengenai situasi yang terjadi hari itu. Kemudian sebagai solusinya menurut Amir Mahmud, Presiden Sukarno harus segera memberi perintah kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan negara yang genting. Kemudian dirumuskanlah suatu surat perintah pada saat itu juga, lalu diketik oleh Jend. Sabur, dan ditandatangani oleh Presiden Sukarno, kemudian surat itu diserahkan kepada Soeharto di Jakarta.²³⁹

²³⁷ Asvi Warman Adam. *op.cit* hlm. 53

²³⁸ P.J. Suwarno. *op.cit*. hlm. 107

²³⁹ *Ibid*, hlm 108

Kesaksian *kelima*, yaitu oleh Soebandrio. Menurutnya, menjelang petang Istana Bogor didatangi oleh tiga Jenderal dan diterima oleh Sukarno, kemudian terlibat pembicaraan serius. Ketika Soebandrio dan dua rekannya dipanggil masuk, Soebandrio disuruh membaca surat tersebut oleh Sukarno. Sukarno meminta persetujuan darinya untuk menandatangani surat tersebut. Namun dengan tekanan dari tiga Jenderal itu, Sukarno pun menandatangani surat tersebut, dan Soebandrio tidak dapat berbuat apa-apa walaupun awalnya dia sempat ragu-ragu.²⁴⁰

Kesaksian *keenam*, yaitu dari Mochtar Lubis yang mendengar kabar dari kawan-kawannya yang bekerja di RRI bahwa malam hari Jum'at, Letjen. Soeharto mengirim Mayjen. Amir Mahmud, Andi Yusuf, dan Basuki Rahmad ke Bogor membawa konsep surat penyerahan kekuasaan kepadanya. Mula-mula Soebandrio mencoba menghalang-halangi agar Presiden Sukarno tidak menandatangani, tetapi akhirnya presiden mau juga menandatangani.²⁴¹

Dari beberapa kesaksian tentang proses penyerahan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Letjen. Soeharto melalui Supersemar tersebut, memang masih menjadi "kontroversi". Namun jika diamati lebih teliti, ada kemiripan antara kesaksian Mochtar Lubis, Hartini Sukarno, dan Soebandrio, yang mengatakan bahwa peristiwa pemaksaan terhadap Sukarno tersebut terjadi pada malam hari, sedangkan menurut Sukardjo dan Kaswadi, peristiwa itu terjadi pada pukul 01.00 WIB dini hari. Pembantahan terhadap kesaksian di atas diutarakan oleh Amir Mahmud dan A. Yusuf, yang mengatakan bahwa kedatangan mereka

²⁴⁰ *Ibid*, hlm 107

²⁴¹ *Ibid*. hlm. 106

hingga perumusan dan pengetikan Supersemar dilakukan sore hingga menjelang malam. Supersemar itupun ditandatangani oleh Presiden Sukarno tanpa ada paksaan.

Dari kesaksian-kesaksian di atas, dapat dianalisis menjadi beberapa kemungkinan yang dapat dijadikan benang merah untuk semakin memperjelas masalah penyerahan Supersemar tersebut, yaitu bahwa kedatangan Jenderal Jenderal suruhan Soeharto ke Istana Bogor tidak hanya satu kali melainkan “*lebih dari satu kali*”. Kedatangan mereka bisa terjadi dua kali dalam sehari. Dikatakan dua kali, yaitu berdasarkan kesaksian Amir Mahmud, bahwa dia bersama dua Jenderal lainnya datang ke Istana Bogor pada siang hari, sedangkan menurut Soebandrio, Hartini Sukarno, dan didukung Mochtar Lubis, ketiga Jenderal tersebut datang pada malam hari. Dugaan bahwa Jenderal-Jenderal tersebut datang sebanyak dua kali karena didukung kesaksian Sukardjo Wilardjito, Kaswadi, dan Rian Ismail yang mengatakan bahwa ketiga Jenderal itu datang ke Istana pada malam pukul 01.00 WIB (subuh) disertai Jend. Panggabean. Jadi, jumlah Jenderal yang datang ada empat Jenderal.

Kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi mengingat Supersemar masih tetap menjadi *misteri* hingga saat ini. Kemungkinan Jenderal-Jenderal suruhan Soeharto itu datang ke Istana Bogor lebih dari satu kali, juga dimungkinkan mengingat jarak antara Jakarta–Bogor tidaklah terlalu jauh jika ditempuh dengan mengendarai mobil. Setelah Supersemar itu ditandatangani oleh Presiden Sukarno, kemudian naskah tersebut langsung diserahkan kepada Soeharto di Jakarta.

Dengan bekal Supersemar itu, Soeharto segera memerintahkan kepada Panggabean untuk membuat konsep keputusan tentang pembubaran PKI yang akan disiarkan melalui siaran RRI pada kesempatan esok harinya.²⁴² Namun menurut Asvi Warman Adam, berdasarkan buku *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, dimuat pula penuturan Sudharmono bahwa ia menerima telepon dari Mayjen. Sutjipto sekitar pukul 22.00 WIB. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga atas perintah Soeharto. Beberapa jam kemudian, tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 WIB, datanglah sekretaris MBAD Brigjen. Budiono membawa dokumen yang disebut Supersemar.²⁴³ Dengan bekal Supersemar itulah kemudian digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI sehingga dengan demikian secara perlahan-lahan presiden Sukarno kehilangan kekuasaannya namun sebaliknya kekuasaan Soeharto semakin kuat.

2. Pembantaian Massal Terhadap Orang-Orang PKI Tahun 1965

Tahun 1965 – 1966 merupakan tahun yang sengaja dilupakan dalam sejarah Orde Baru. Rezim Orde Baru hanya membenarkan satu versi mengenai Peristiwa 1 Oktober 1965. Pembantaian yang terjadi sesudah percobaan kudeta yang gagal itu hanya tinggal sebagai trauma bagi orang-orang yang kebetulan mengalaminya.²⁴⁴ Rezim Orde Baru memang hanya membenarkan satu versi mengenai peristiwa tersebut, yaitu versi buku resmi pemerintah yang dikenal dengan Buku Putih. Banyak kebenaran yang ditutup-tutupi demi kelangsungan pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Soeharto. Dalam pembelajaran

²⁴² *Ibid.* hlm. 113

²⁴³ Asvi Warman Adam. *op.cit.* hlm. 53 – 54

²⁴⁴ Asvi Warman Adam. *Soeharto..... op.cit.* hlm. 29

sejarah di sekolah-sekolah, hanya dibenarkan satu versi tentang Peristiwa Berdarah 1 Oktober 1965, yaitu versi Buku Putih-nya pemerintah.

Yang selalu dibahas adalah tentang Peristiwa 1 Oktober 1965 yang di dalangi oleh PKI, dan Soeharto tampil sebagai pahlawan dengan berhasil menumpas pemberontakan dan menyelamatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu tentu saja versi Soeharto dalam menjamin kelangsungan kekuasaannya, tanpa sedikitpun menyinggung peristiwa-peristiwa lain yang terjadi sesudahnya sebagai dampak dari Peristiwa 1 Oktober 1965.

Tragedi yang terjadi pada tahun 1965 tidak hanya tragedi penculikan dan pembunuhan terhadap enam Jenderal besar TNI AD saja, namun ada tragedi lain yang lebih dahsyat, yakni dibunuhnya ratusan ribu hingga jutaan warga masyarakat Indonesia beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan para petinggi militer tersebut.²⁴⁵ Pembalasan dendam atas kematian para Jenderal menyebabkan terjadinya sebuah *pembantaian massal* terhadap orang-orang PKI di Kepulauan Indonesia, yang untuk kawasan Asia hanya dikalahkan oleh pembantaian Pol Pot di Kamboja.²⁴⁶ Pembantaian massal dengan alasan pembalasan dendam terhadap PKI yang telah melakukan kup pada tanggal 1 Oktober 1965, ternyata tidak hanya dilakukan terhadap PKI dan orang-orang yang diduga PKI, namun warga sipil juga turut menjadi korban dalam pembantaian massal tersebut. Tidak tanggung-tanggung, jumlah korban akibat pembantaian yang *membabi buta* tersebut diperkirakan mencapai 500.000 hingga 2 juta orang penduduk Indonesia.

²⁴⁵ Baskara T. Wardaya. *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 Hingga G30S*. Galang Press. Yogyakarta. 2006. hlm. 146

²⁴⁶ Lambert J. Giebels. *Pembantaian Yang Ditutup-Tutupi Persitiwa Fatal Di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2005. hlm. 172

Langkah pertama yang dilakukan Soeharto sebagai pucuk pimpina AD, dengan berbekal Supersemar adalah mengamankan seluruh daerah, tidak saja di Jawa bahkan sampai ke Sumatera. Kemudian tindakan berikutnya adalah mengejar dan menahan anggota-anggota PKI serta antek-anteknya dengan disertai pembunuhan-pembunuhan yang sangat mengerikan.²⁴⁷

Pembantaian massal yang dilakukan di bawah komando Soeharto ini tidak hanya membunuh pelaku Gestapu, namun juga orang-orang yang diduga terkait erat dengan PKI. Mereka dibunuh di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kebanyakan dari mereka yang dibunuh adalah rakyat biasa yang kemungkinan besar tidak ada sangkut paut langsung dengan operasi militer yang dilakukan oleh Letkol. Untung dan kawan-kawan di Jakarta. Dalam jumlah besar, mereka dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan.

Sementara itu, banyak yang lolos dari eksekusi ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Sejumlah tokoh militer dan politik yang diduga terkait dengan operasi militer 1 Oktober 1965 itu memang diadili oleh suatu Mahkamah Khusus, tetapi sejauh mana pengadilan itu bersikap adil masih merupakan tanda tanya. Jumlah yang dibunuh sedemikian besar, bisa jadi merupakan pembunuhan warga sipil terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini.²⁴⁸

Jumlah korban pembantaian massal yang berlangsung sejak Oktober 1965 hingga April 1966 tersebut tidak mudah diketahui dengan persis. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian, terutama di Jawa, Sumatera, dan Bali yang tidak diketahui dengan persis. Namun berdasarkan 39

²⁴⁷ Muhammad Rusli Karim, *Peranan ABRI Dalam Politik*, op.cit.40

²⁴⁸ Baskara T. Wardaya. *op.cit.* hlm. 146 – 148

artikel yang dikumpulkan Robert Cribb, jumlah korban berkisar dari 78.000 sampai 2 juta jiwa, yang bila dijumlah dan dibagi 39, maka akan didapat angka rata-rata 430.590 jiwa.²⁴⁹ Jika dilihat, maka dari berbagai pelanggaran HAM dalam sejarah Indonesia, maka pembantaian massal tahun 1965 merupakan yang paling besar, paling tidak dari segi jumlah korban.

Pembantaian massal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yang sederhana, yaitu berupa pisau, golok, dan senjata api. Orang-orang yang dibunuh pun tidak dibawa jauh sebelum dibantai, karena biasanya mereka dibunuh di dekat rumahnya sendiri. Pembantaian tersebut tidak hanya terjadi di Jawa, Sumatera, dan Bali, namun juga terjadi di Flores. Pembantaian terhadap orang-orang PKI dan yang diduga PKI ini dilakukan secara sistematis dengan pola bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini dapat dilihat bahwa pembantaian massal yang terjadi di berbagai daerah ini tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ini menandakan bahwa pembantaian massal ini memang sudah direncanakan dan ada sosok lain yang menjadi dalang dibalik pembantaian massal tersebut.

Secara teoritis, tampaknya tidak terlalu sulit untuk menemukan dalang dalam peristiwa pembantaian massal tersebut. Sukarno jelas bukan dalangnya, karena tak ada tanda dia pernah berfikir membunuh secara massal rakyatnya sendiri. Letkol. Untung juga pasti bukan, karena pasca gagalnya kup 1 Oktober 1965, ia telah melarikan diri. Dengan demikian, tinggal sedikit kemungkinan siapa dalang yang mengkoordinir pembantaian massal ini.

Dalam kaitannya dengan pembantaian massal tersebut, keterlibatan Amerika tampaknya sulit dipungkiri. Challis menyebut kembali apa yang pernah ditulis oleh Kathy Kadane di koran *San Fransisco Examiner*, 20 Mei 1990, serta

²⁴⁹Asvi Warman Adam. *Soeharto....op.cit.* hlm. 33 – 34

koran *Washington Post* edisi 21 Mei 1990, yakni perihal tindakan CIA menyerahkan suatu daftar kepada pihak AD yang berisi nama “orang-orang komunis” yang harus dibunuh. Sebagaimana sudah banyak diketahui, terdapat dugaan kuat bahwa agen-agen CIA di Jakarta memberikan daftar sekitar 5000 orang pengurus atau anggota PKI yang harus disingkirkan.²⁵⁰

Walaupun CIA menyangkal hal tersebut, namun dua orang yang waktu itu bekerja di Kedubes AS di Jakarta, yaitu Joseph Lazarsky dan Edward Masters menyatakan bahwa CIA memang terlibat. Hal ini semakin diperkuat oleh keterangan Robert Martins, bekas anggota Staf Bidang Politik Kedubes AS di Jakarta pada tahun 1990, mengakui bahwa memang ada daftar tersebut. Maka, ketika pada 22 Oktober 1965, saat pembunuhan massal mulai terjadi di Jawa Tengah, sejumlah Staf Gedung Putih tak kuasa menyembunyikan kegembiraannya atas apa yang sedang terjadi di Indonesia.²⁵¹ Dari uraian di atas, semakin kuatlah dugaan bahwa Amerika memang terlibat dalam tragedi pembantaian massal 1965-1966 di Indonesia.

Pembantaian massal yang berlangsung di Kepulauan Indonesia dari bulan Oktober 1965–April 1966, jauh melebihi kekejaman masa pemberontakan Madiun. Di Aceh, orang-orang Islam Ortodoks memburu sesama penduduk yang komunis. Di Sumatera Utara, orang-orang Kristen lah yang memburu para komunis, sedangkan di pedalaman Jawa, jenazah-jenazah menumpuk di pintu-pintu air pengairan sawah. Bulan Desember 1965, gelombang amarah itu menyeberang dari Jawa Timur ke Bali. Di sana aksi-aksi pembunuhan dipimpin

²⁵⁰ Baskara T. Wardaya. *op.cit.* hlm. 155 – 156

²⁵¹ *Ibid.* hlm. 159

oleh para pemuda PNI. Jumlah korban di pulau ini sangat besar. Geoffrey Robinson dalam studinya *‘The Dark Side of Paradise’*, menghitung bahwa 5 persen penduduk Bali meninggal dalam tragedi pembunuhan massal ini.²⁵² Sebagaimana diketahui bahwa Bali adalah salah satu basis kekuatan yang mendukung Presiden Sukarno.

Selain di Bali, juga terjadi pembunuhan-pembunuhan di Flores. Pembunuhan itu dilakukan oleh para militer Jawa yang sudah tidak terkendalikan lagi. Mereka membentuk pasukan-pasukan milisi yang terdiri dari golongan-golongan Islam Ortodoks yang tinggal di Flores, serta di pulau-pulau sekitarnya, dan orang-orang Katholik pun ikut-ikutan melakukan hal yang sama.. Dalam memburu orang komunis, mereka bergerak dari sisi barat ke sisi timur pulau.

Terlepas dari pembunuhan massal yang terjadi sehingga memakan banyak korban masyarakat yang tidak bersalah, kejadian “memilukan” juga dialami orang-orang yang selamat. Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam organisasi PKI ataupun tidak terlibat langsung, namun mendukung PKI. Beberapa tokoh yang menjadi korban ketidakadilan ini mengalami penderitaan panjang karena dipenjarakan tanpa proses peradilan yang jelas.

Diantara orang-orang yang dimaksud di atas sebut saja di antaranya, *Zubaidi Hassan* selama bertahun-tahun dipenjarakan tanpa proses peradilan. Nasib serupa dialami seorang putra Bali bernama *Dewa Ngurah Djenawi*, karena kesetiaan pengabdiaannya pada Sukarno, ia pun dipaksa mendekam di dalam penjara selama sepuluh tahun. Ibu *Kusnah* juga yang tidak tahu apa-apa harus

²⁵²Lambert J. Giebels. *op.cit.* hlm. 173 – 174

mendekam selama sebelas tahun dan berpisah dengan ketigabelas anaknya. Kisah sedih lainnya dialami oleh *Ratih*, mahasiswi kedokteran yang dituduh sebagai anggota Pemuda Rakyat, hanya karena di bukunya tertulis huruf “PR” (Pekerjaan Rumah) sehingga kemudian dipenjara. Ia pun harus berpisah dengan ayahnya yang juga dituduh sebagai anggota PKI, dan baru bisa “bertemu kembali” dengan ayahnya dalam wujud tulang belulang setelah sekian tahun kemudian. Demikian juga dengan kasus gadis bernama *Siti* yang ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun hanya karena menolak untuk dijadikan isteri seorang aparat. Dengan demikian, semakin jelas bahwa dalam melaksanakan niatnya untuk membasmi PKI, kalangan militer bertindak sewenang-wenang.²⁵³

3. Pembuangan Tahanan Politik PKI ke Pulau Buru

Korban-korban keganasan militer dalam usaha menumpas PKI, selain dipenjara di wilayah Jawa, juga ditangkap dan dibuang di tempat lain sebagai Tahanan Politik (Tapol). Tempat tersebut adalah Pulau Buru. Pulau Buru adalah sebuah pulau yang mempunyai luas sekitar 9.599 kilometer persegi. Pulau ini termasuk dalam lingkungan Kabupaten Maluku Tengah, di mana 2/3 bentangan alamnya berupa pegunungan dan perbukitan yang sangat tinggi dan curam. Pada tahun 1969 diperkirakan Pulau Buru telah dihuni sekitar 7.005 orang penduduk. Namun sejak pertengahan tahun 1969, pulau ini dijadikan sebagai tempat pemasyarakatan tahanan politik (tapol) yang diduga terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 ataupun orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari PKI. Oleh

²⁵³ Baskara T. Wardaya, *op.cit*, hlm.107

karena itu, di daerah pedalaman pulau yang tadinya masih merupakan hutan belantara, oleh pemerintah dibangun tiga tempat penampungan sekitar 25.000 orang tahanan politik.²⁵⁴ Dengan kondisi alam yang curam serta terpencil, tidak memungkinkan bagi para tahanan politik tersebut untuk dapat melarikan diri.

Pulau itu dipergunakan dari tahun 1969–1979 dan ditempati oleh kurang lebih 25.000 Tapol. Tapol-tapol tersebut ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru tanpa proses pengadilan, karena mereka dianggap bersalah tetapi tidak terdapat cukup bukti.²⁵⁵

Begitu besar dan panjangnya dampak dari Peristiwa 1 Oktober 1965 bagi warga sipil yang tidak berdosa. Walaupun sejumlah besar orang Indonesia ikut bersalah dalam pembunuhan sesama bangsanya, namun tanggung jawab utama mungkin terletak pada Soeharto. Ia dengan sengaja menggunakan pemakaman para Jenderal yang dibunuh sebagai pemicu perburuan orang-orang komunis yang berimbas pada penderitaan rakyat yang tidak berdosa. Ia menyuruh pasukan pasukan komando di bawah pimpinan Sarwo Edhie untuk membersihkan Jawa Tengah dari orang-orang komunis dan ia tidak melarang Sarwo Edhie untuk menghasut penduduk sipil untuk membantu militer dalam melakukan pembunuhan. Presiden Sukarno juga bertanggung jawab karena dinilai “lamban” dalam menghukum para pelaku kup 1 Oktober 1965, bahkan membela beberapa di antaranya secara pribadi. Hal tersebut dinilai juga memicu terjadinya rentetan peristiwa selanjutnya, seperti pembantaian massal tahun 1965–1966.

²⁵⁴ Hassan Sathily, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1973, hlm. 230

²⁵⁵ Harold Crouch. *Militer dan Politik DI Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1986. hlm. 47

4. Jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno dan Naiknya Soeharto Sebagai Presiden RI

Peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto seperti diketahui tidaklah berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan percobaan Kudeta 1 Oktober 1965, dan diakhiri dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) 1966 yang secara *de facto* memberikan kekuasaan kepada Mayjen. Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 yang disebut oleh Y. Pohan (*Who Were The Real Plotters of The Coup Againsts Presiden Soekarno*, 1998) sebagai kudeta merangkak.²⁵⁶

Selain itu, pendapat lain datang dari Peter Dale Scott yang menilai peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 adalah sebagai kudeta tiga tahap. Tahap *pertama*, yaitu gerakan tiga puluh September yang merupakan “kudeta gadungan”; *kedua*, yaitu tindakan balasan dengan melakukan pembantaian terhadap anggota-anggota PKI secara massal walaupun dalam pelaksanaannya pembantaian massal tersebut juga menimpa warga sipil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PKI maupun organisasi-organisasi yang dibentuk PKI; *ketiga*, yaitu usaha yang dilakukan oleh Soeharto untuk mengikis habis sisa-sisa kekuatan Sukarno hingga akhirnya Soeharto dapat menguasai tampuk pemerintahan.

Sedangkan menurut saksi hidup Soebandrio, dia menyimpulkan bahwa rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui empat tahap. Tahap *pertama*, yaitu menyingkirkan saingannya di Angkatan Darat, seperti Ahmad Yani dan lain-lain.

²⁵⁶ Asvi Warman Adam. *Pelurusan.....op.cit.* hlm. 228

Tahap *kedua*, yaitu membubarkan PKI yang merupakan saingan terberat tentara sampai saat itu. Tahap *ketiga*, yaitu melemahkan kekuatan pendukung Sukarno dengan menangkap 15 menteri yang Sukarno, termasuk Soebandrio. Tahap *keempat*, yaitu mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno.²⁵⁷

Cara yang ditempuh Soeharto untuk menggulingkan Sukarno tampak sangat hati-hati dan terkesan rapi. Cara Soeharto yang begitu hati-hati dengan mengambil alih kekuasaan justru membuat tidak sabar golongan radikal yang ingin mengakhiri era kekuasaan Sukarno dengan segera. Sikap Presiden Sukarno yang tetap menolak ketetapan-ketetapan MPRS dan kebijaksanaan yang dijabarkan dari ketetapan itu, menyebabkan Nasution dan Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali menarik kesimpulan bahwa presiden tidak mau menyesuaikan diri dengan kondisi yang memerlukan kebijaksanaan baru. Amanatnya pada Hari Proklamasi menyebabkan mereka sampai pada batas kesabaran dalam upaya mempertahankan Sukarno dalam jabatan presiden.²⁵⁸

Di luar perhitungan Sukarno, Soeharto beserta pengikutnya dengan diam-diam mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi pertentangan yang tak terelakkan lagi dengan Sukarno. Untuk itu, siasat yang dilakukan Soeharto adalah dengan semakin memperkokoh posisinya dalam Angkatan Bersenjata, sehingga dengan demikian ia akan dengan mudah melakukan indoktrinasi terhadap ABRI khususnya Angkatan Darat.

Angkatan Darat harus dapat diyakinkan agar mau mendukung segala tindakan dan kebijaksanaannya. Untuk itu, Soeharto mengadakan Seminar Angkatan Darat untuk meninjau kembali doktrin pertahanan Angkatan Darat, Tri

²⁵⁷ *Ibid*, hlm 241

²⁵⁸ Ulf Sundhaussen. *op.cit.* hlm. 422

Ubaya Cakti, dipilih sebagai sarana untuk membentuk kembali sikap politik Angkatan Darat, terutama sehubungan dengan sikap politik Presiden Sukarno. Upaya Soeharto untuk memperkuat keyakinan dan dukungan terhadapnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Soeharto juga menginstruksikan agar diadakan lagi seminar pada bulan November, yang dihadiri oleh perwira-perwira dari semua angkatan untuk “mengikat” ketiga Angkatan Bersenjata lainnya kepada sikap yang sama.²⁵⁹

Walaupun sedemikian gencarnya Soeharto mempengaruhi semua kalangan tentara, namun di dalam tubuh ABRI sendiri masih terdapat golongan-golongan yang menolak Soeharto dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Presiden Sukarno. Beberapa kekuatan di Kepolisian, Korps Marinir, dan Angkatan Laut tetap menyatakan dukungan mereka kepada Sukarno. Hal ini akan membahayakan Soeharto (beserta orde barunya), sehingga menuntut Soeharto untuk bertindak lebih hati-hati dalam persiapannya menggulingkan Sukarno.

Strategi yang ditempuh Soeharto dalam usaha menggulingkan Sukarno, dilakukannya dengan sopan dan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan keraguan mengenai legalitas dan konstitusionalnya. Sementara itu, pendukung orde baru di bawah pimpinannya yang terus menuntut agar Sukarno ditangkap dan diadili dalam keterlibatannya dengan Peristiwa 1 Oktober 1965, merupakan salah satu strategi yang dijalankannya untuk terus menekan Sukarno. Strategi yang dijalankan Soeharto ini semata-mata bertujuan untuk meyakinkan orang-orang yang masih sangsi, baik di kalangan militer maupun kalangan sipil. Menghancurkan citra Sukarno di kalangan pendukung-pendukungnya yang masih setia kepadanya dan mempengaruhi kekuatan-kekuatan yang tetap setia

²⁵⁹ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, op.cit, hlm 76

mendukung Sukarno, kebijaksanaan serta tindakan politiknya sebelum dan sesudah Peristiwa 1 Oktober 1965.²⁶⁰

Sementara itu, demonstrasi-demonstrasi mahasiswa seperti KAMI dan KASI yang di bawah kendali orde baru terus memanas dan merobek-robek gambar Presiden Sukarno. Mereka menuntut agar Sukarno dipecat sebagai presiden kemudian segera diadili. Sementara itu, semakin banyak organisasi yang menyatakan tidak percaya lagi kepada Presiden Sukarno. Serangkaian demonstrasi mahasiswa yang dimulai tanggal 28 September, menuntut agar Sukarno ditangkap dan diadili di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa atau yang biasa disingkat Mahmilub.²⁶¹

Segala usaha mendiskreditkan Presiden Sukarno dan merusak citra baiknya di mata masyarakat merupakan salah satu propaganda yang dilakukan Soeharto untuk menjatuhkan Sukarno dan “menyingkirkan” pendukung-pendukung yang masih berdiri di belakang dan orang kepercayaan Sukarno, satu per satu ditangkap dan diadili di hadapan Mahmilub. Tokoh-tokoh seperti Soebandrio diadili atas tuduhan kudeta 1 Oktober 1965. Demikian pula dengan Untung dan Njono yang disidangkan dengan kasus yang sama. Maka, ketika Soebandrio dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, posisi Presiden Sukarno semakin goyah. Kenyataan bahwa pembantu politiknya yang paling dekat telah dijatuhi hukuman karena dianggap terlibat dalam pembunuhan atas ke enam Jenderal, sedikit banyak telah menimbulkan dugaan-dugaan tentang perannya sendiri dalam Peristiwa Gestapu itu. Selain itu, hukuman yang

²⁶⁰ Harold Crouch, *Militer Dan Politik di Indonesia*, Sinar harapan, Jakarta, hlm 87

²⁶¹ Dhaniel Dhakidae, *Cendekiawan Dalam Kekuasaan Orde Baru*, Gramedia, Jkarta, hlm.87

dijatuhkan atas diri Soebandrio merupakan bukti yang jelas bahwa kekuasaan Sukarno telah merosot secara drastis.²⁶²

Keterpurukan Sukarno semakin diperparah lagi oleh keterangan Omar Dhani di hadapan Mahmilub, yang mengatakan bahwa Sukarno sudah tahu terlebih dahulu sebelum Peristiwa 1 Oktober 1965 itu terjadi. Kesaksian Omar Dhani ditentang habis-habisan oleh Sukarno dalam pernyataan tertulisnya kepada Mahmilub, bahwa terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 itu sungguh-sungguh di luar dugaannya. Selain tudingan Omar Dhani, Sukarno mendapatkan pembelaan dari Brifjen. Supardjo ketika diadili. Menurutnya, Sukarno tidak tahu bahwa akan terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965 itu.²⁶³

Tak dapat dipungkiri bahwa usaha yang dilakukan Soeharto untuk menggulingkan Sukarno memang tertata rapi, sehingga tidak meninggalkan bekas di mata rakyat dan hukum. Sidang-sidang Mahmilub atas pendukung-pendukung Sukarno merupakan senjata yang ampuh untuk mengikis habis kekuatan politik Sukarno. Maka secara perlahan-lahan dan dengan sendirinya kekuatan Sukarno akan lemah dan hilang sehingga citranya sebagai presiden akan semakin buruk di mata rakyatnya sendiri.

Pada tanggal 22 Oktober 1966, Sukarno mendapat perintah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melengkapi pidato *Nawaksaranya* pada bulan Juni, karena dianggap kurang lengkap sehubungan dengan perannya dalam kup Gestapu. Sukarno memenuhi perintah tersebut dengan sebuah keterangan tertulis yang diserahkan ke majelis pada tanggal 10 Januari 1967.

²⁶² *Ibid.* hlm. 429

²⁶³ Lembaga Analisis Informasi (LAI), *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Sukarno - Soeharto*, *op.cit.*, hlm 70

Dalam salah satu poin laporan Nawaksara Sukarno, berbunyi :

Kenapa saya saja yang diminta pertanggung jawaban atas terjadinya G 30 S atau yang saya namakan Gestok itu? Tidakkah misalnya Menko Hankam (waktu itu) juga bertanggung jawab?

Sehubungan dengan ini, saya bertanya :

Siapakah yang bertanggung jawab atas usaha pembunuhan Presiden/Pangti dengan penggranatan hebat di Cikini?

Siapa yang bertanggung jawab atas usaha membunuh saya dalam “Peristiwa Idul Adha”?

Siapa yang bertanggung jawab atas pemberondongan dari pesawat udara kepada saya oleh Maukar?

Siapa yang bertanggung jawab atas penggranatan kepada saya di Makassar?

Siapa yang bertanggung jawab atas pencegahan bersenjata kepada saya di dekat gedung Stanvac?

Siapa yang bertanggung jawab atas pencegahan bersenjata kepada saya di Selatan Cisalak?

Dan lain-lain, dan lain-lain.

Syukur alhamdulillah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan! Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh! Dan mungkin akan saudara namakan satu “Tragedi Nasional” pula. Tetapi, sekali lagi saya bertanya. Kalau saya disuruh bertanggung jawab atas terjadinya G 30 S, maka saya bertanya: siapa yang harus dimintai pertanggung jawaban atas usaha pembunuhan kepada Presiden/Pangti dalam tujuh peristiwa yang saya sebutkan di atas itu?

Kalau bicara tentang “kebenaran dan keadilan”, maka saya pun minta “kebenaran dan keadilan”!²⁶⁴

Presiden menyatakan dalam suratnya kepada MPRS bahwa ia sudah cukup sering mengutuk Gestok (Gestapu) dan menurut kesimpulan Sukarno terjadinya Gestapu diakibatkan oleh tiga hal : *pertama*, kesalahan-kesalahan dari pihak PKI; *kedua*, karena ulah kekuatan-kekuatan Nekolim; dan *ketiga*, karena tingkah laku beberapa orang gila. Selain itu, Sukarno juga menuding Ketua MPRS, Jenderal Nasution. Mengapa mantan Menteri Koordinasi Pertahanan dan Keamanan tidak dimintai pertanggung jawaban untuk perannya dalam Gestapu. Selain itu, Sukarno

²⁶⁴ Asvi Warman Adam. *Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965 Pelengkap Nawaksara*. Ombak. Yogyakarta. 2005. hlm. 117

juga menambahkan bahwa sebaiknya juga diteliti siapa dalang dibalik beberapa kali kejadian percobaan pembunuhan atas dirinya.²⁶⁵

Pada akhir bulan Januari 1967, DPRS mengajukan mosi kepada MPRS untuk menindak Sukarno dengan tegas bahwa Sukarno harus diturunkan dan diseret ke meja pengadilan. Selanjutnya, akan diadakan rapat lagi di bulan Maret 1967 atas desakan banyak pihak. Pada tanggal 19 Februari 1967, Soeharto muncul di rumah Sukarno bersama beberapa stafnya. Mereka menyodorkan kepada Presiden Sukarno sepucuk surat untuk ditandatangani, yang berisi pernyataan bahwa ia (Sukarno) menyerahkan semua wewenangnya sebagai presiden.²⁶⁶

Menghadapi tekanan yang datang bertubi-tubi, Sukarno kehilangan tempatnya berpegang. Sutjipto yang telah banyak dibantunya justru membela Soeharto. *Dalam keterpurukan dan keputusasaannya, Sukarno menangis*, dan menurut keterangan Sultan, Sukarno mengeluh karena tidak menyangka bahwa Sutjipto akan berbalik menentangnya. Akhirnya, Sukarno menyerahkan semua wewenang kepresidenan kepada Soeharto, namun tetap mempertahankan statusnya sebagai presiden.²⁶⁷

Skenario “pemaksaan” penyerahan kekuasaan ini berlangsung dalam Sidang Pleno MPRS tanggal 8 Maret 1967. Situasi keamanan menjadi genting. Dalam sidang tersebut dan dihadapan majelis, Soeharto dengan tegas mempersalahkan Sukarno karena menolak pembubaran PKI, bahkan cenderung membela beberapa tokoh PKI. Soeharto juga mengecam Sukarno karena konsep Nasakom yang dipertahankannya. Para pemimpin KAMI pun menuntut agar Presiden Sukarno dipecat. Sutjipto pun berbalik menyerang dan menyalahkan

²⁶⁵ Lambert J. Giebels. *op.cit.* hlm. 216 – 217

²⁶⁶ *Ibid.* hlm. 219

Sukarno dengan mengatakan Sukarno adalah “seorang Machiavelis yang menyesuaikan semua hukum dengan nafsunya”.²⁶⁸

Melalui sidang ini, tercapailah apa yang diinginkan Soeharto. Sukarno tidak diturunkan tetapi wewenang kepresidenannya dicopot. Dengan demikian, Soeharto pun resmi menjadi pejabat presiden sekaligus pemimpin pemerintahan dan Panglima Angkatan Bersenjata. Walaupun demikian, pejabat presiden harus tetap melapor kepada presiden atas segala kebijakan yang diambil.

Pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS mencapai kesimpulan bahwa Sukarno sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan UUD dan Ketetapan MPRS. Oleh sebab itu, MPRS mencabut kembali mandatnya sebagai Presiden RI dan melarangnya melakukan berbagai aktivitas politik sampai dilangsungkannya pemilihan umum. Kemudian MPRS menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden dengan masa jabatan sampai MPR hasil pemilihan dapat mengangkat presiden baru secara formal.²⁶⁹

Setelah Soeharto menjadi pejabat presiden, dan Sukarno dicabut mandatnya oleh MPRS, Sukarno kemudian dipindahkan ke Istana Bogor dalam karantina politik. Sampai akhir hayatnya, kehidupan Sukarno sangat menderita. Dalam perjalanan waktu, kondisi kesehatannya semakin memburuk dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1970, Sukarno meninggal tepat setelah dua hari peringatan Ulang Tahunnya yang ke-69. Berakhirlah kekuasaan Sukarno dengan cara yang sangat tragis, yang diwarnai dengan pemaksaan pemindahan kekuasaan dan pengkhianatan. Sebagai seorang yang memperjuangkan kemerdekaan, yang

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 237

²⁶⁸ Asvi Warman Adam, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, op.cit, hlm. 87

²⁶⁹ *Ibid*, hlm. 91

“menciptakan” Pancasila untuk Indonesia dan yang memproklamkan kemerdekaan negaranya, nasib yang dialaminya sangatlah tragis untuk seorang tokoh sekaliber Sukarno. Dengan berakhirnya era Sukarno, Soeharto pun terpilih sebagai presiden pada pemilu selanjutnya. Dengan demikian, era orde baru pun dimulai.

B. Dampak Sosial Dari Peristiwa 1 Oktober 1965

Peristiwa 1 Oktober 1965 selain membawa dampak politik seperti lahirnya Supersemar, pembantaian massal, pembuangan para tahanan yang diduga terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 dan kejatuhan Presiden Sukarno sehingga menyebabkan naiknya Soeharto, juga membawa dampak sosial terutama bagi orang-orang yang dituduh terlibat PKI ataupun terkait dengan peristiwa tersebut. Nasib orang-orang yang diduga terkait dengan PKI pun selain ditangkap dan dipenjarakan masih banyak yang kemudian diasingkan ke Pulau Buru selama sekian puluh tahun tanpa proses pengadilan dan diputus kehidupannya dari dunia normal.

Contoh yang paling nyata adalah dampak yang dialami oleh para tahanan politik (Tapol) di Pulau Buru. Di samping mengalami perlakuan kasar secara fisik, para tahanan itu sebetulnya telah mengalami, *Pertama*, perampasan berangkai atas segala hak miliknya. Contohnya, pakaian mereka meskipun tidak diambil seluruhnya tetapi diganti dengan pakaian seragam dengan cap kode-kode tertentu sehingga para tahanan politik ini dapat dengan mudah dikenali. *Kedua*, perampasan dalam kehidupan seksual, bahwa hubungan antar lawan jenis tidak

dimungkinkan sehingga *homoseksualitas* tidak dapat dicegah. Orang-orang buangan itu telah diputus dunianya dari dunia normal yang dihuni oleh laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, perampasan kemandirian sebagai pribadi atau individu. Struktur kehidupan sehari-hari mereka berwatak otoriter yang diawali dengan bunyi pukulan lonceng, diiringi dengan teriakan aba-aba dan dipenuhi dengan aturan-aturan antara yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.²⁷⁰

Para tahanan politik itu, dari yang paling muda dari yang paling muda berumur 14 tahun hingga yang paling tua 75 tahun diwajibkan mandi telanjang bersama-sama seperti anak balita. Hal inilah yang menyebabkan kasus homoseksualitas semakin meningkat terjadi di Pulau Buru. Dari yang tidak tamat Sekolah Dasar sampai kepada profesor hanya punya satu kata hafalan yaitu “siap,pak!”²⁷¹

Penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang diduga terlibat PKI ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Setelah di bebaskan tanpa diadili, mereka masih diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka wajib lapor ke Kodim/Koramil dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan inisial ET (eks tapol) yang menyebabkan kegiatan mereka senantiasa diawasi. Mereka ini tidak boleh dipilih dalam Pemilu dan mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua bahkan kelas kambing. Terhadap anak-anak mereka pun diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diskriminatif yaitu tidak boleh bekerja sebagai pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan berbagai jabatan strategis lainnya.

Dampak sosial tersebut dialami dalam jangka waktu yang cukup panjang baik oleh orang-orang yang diduga terlibat PKI maupun terhadap keturunan

²⁷⁰ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, op.cit, hlm. 36-37

²⁷¹ *Ibid*, hlm.38

orang-orang yang diduga sebagai PKI dan ormas-ormasnya. Peristiwa 1 Oktober 1965 hanya meninggalkan trauma bagi keluarga korban Peristiwa 1 Oktober 1965 yang menyaksikan langsung bagaimana suami, ayah dan anak mereka diculik ataupun dibunuh dengan kejam oleh pelaku peristiwa tersebut . Trauma itu tidak akan pernah pupus dan akan tetap teringat serta meninggalkan luka yang dalam, walaupun peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu.

Bila anak-anak dari Pahlawan Revolusi ini memiliki trauma, hal serupa juga dialami oleh anak-anak korban PKI atau orang-orang yang dituduh komunis meskipun bukan berideologi komunis. Namun penderitaan mereka lebih parah lagi, karena kepada mereka dilekatkan stigma yang buruk selama masa orde baru. Bahkan sebagian masih berlanjut hingga saat ini. Bagi keluarga korban Pahlawan Revolusi maupun jutaan anak-anak orang-orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa tersebut, semuanya mengalami trauma yang sangat dalam. Namun untuk kelompok korban yang terakhir ini, trauma itu juga bercampur dengan stigma yang sangat menyakitkan. Dengan demikian sudah saatnya semua dampak sosial dari tragedi kemanusiaan 1965 itu diakhiri. Betapapun kecil namun hal ini tentu akan membawa efek yang positif bagi rekonsiliasi nasional yang kita dambakan. Hanya dengan ini kita dapat berdamai dengan masa lalu.

3. Dampak Ekonomi Dari Peristiwa 1 Oktober 1965

Selain memiliki dampak politik dan sosial, Peristiwa 1 Oktober 1965 juga berdampak besar pada sektor perekonomian bangsa. Kondisi perekonomian negara yang buruk akibat inflasi yang terjadi, secara tidak langsung turut memicu terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 tersebut. Kondisi perekonomian yang

memburuk, menyebabkan rakyat semakin hidup menderita. Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin memuncaknya tingkat inflasi sehingga menyebabkan harga-harga barang semakin melambung tinggi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga berimbas pada menurunnya jumlah produksi barang yang berujung pada semakin memburuknya perekonomian bangsa. Dengan demikian secara otomatis kehidupan rakyat semakin menderita. Aspirasi inilah yang kemudian salah satunya termuat di dalam Tritura, yaitu tuntutan rakyat agar Pemerintah segera menurunkan harga serta melakukan perbaikan ekonomi.

Kondisi perekonomian negara yang semakin memburuk pasca terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, secara tidak langsung disebabkan oleh kondisi politik negara yang tidak stabil. Dalam kondisi politik yang tidak aman, sangatlah tidak dimungkinkan bagi investor asing untuk berani menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia. Perkembangan sektor ekonomi juga tidak menggembirakan, hal ini terlihat pada tahun 1960, di mana anggaran belanja negara mengalami defisit sebesar Rp. 6,9 milyar. Pada tahun 1965 defisit itu bertambah menjadi Rp. 1.591,6 milyar dan pada tahun 1966 membengkak menjadi Rp. 20.000 milyar.²⁷²

Hal tersebut disebabkan karena 45 % anggaran belanja negara dipergunakan untuk keperluan militer. Apabila antara Desember 1962 dan Desember 1963 tercatat inflasi sebesar 109%, maka antara Juni 1965 dan Juni 1966 inflasi tersebut membengkak menjadi 1320%. Dalam kondisi yang demikian akan sangat sulit bagi bangsa manapun untuk dapat melakukan fungsi

²⁷² CST.Kansil, *Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm.63

dalam serta fungsi luar negerinya dengan baik. Kondisi ekonomi tidak dapat ditutup oleh manufer politik.²⁷³

Pada bulan Januari 1966, index kehidupan rakyat meloncat drastis dari 36.347 pada bulan Desember 1965, saat dilakukannya perubahan di bidang moneter oleh Waperdam III Chaerul Saleh, menjadi 56.020. Volume uang beredar demikian besarnya sehingga nilai uang merosot yang kemudian berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Kalau pada akhir tahun 1955 uang yang beredar sejumlah Rp.12 milyar dan tahun 1960 menjadi Rp.48 milyar, maka pada akhir tahun 1965 telah menjadi Rp.2.714 milyar. Sedangkan pada awal tahun 1966 diperkirakan telah mencapai Rp.5.000 milyar. Hal ini menyebabkan para demonstran turun ke jalan mengundang militer untuk segera bertindak mengatasi situasi ekonomi yang semakin kritis.²⁷⁴

Dari uraian di atas, tampak bahwa tingkat inflasi dan defisit yang dialami bangsa ini semakin meningkat sehingga berimbas pada kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pemerintah terlalu terfokus pada pemulihan bidang politik yang kacau sejak awal-awal tahun 1960 an, di mana banyak terjadi pertentangan/ pertikaian maupun persaingan politik dalam pemerintahan terutama antara TNI-AD dan PKI yang didukung oleh Presiden Sukarno.²⁷⁵

Sebagai akibatnya sektor ekonomi menjadi kurang diperhatikan dan sebagian besar anggaran belanja negara terfokus untuk kebutuhan militer. Untuk itulah, pada awal berdirinya orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto,

²⁷³ *Ibid*, hlm.65

²⁷⁴ Rosihan Anwar, *Sebelum Prahara Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 76

²⁷⁵ *Ibid*, hlm 88

pembangunan lebih ditekankan pada pemulihan bidang ekonomi yang sempat merosot dan diperparah dengan terjadinya Peristiwa Oktober 1965.²⁷⁶

Orde Baru lebih menitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi sebagai bentuk pemulihan dari kemerosotan perekonomian dengan menyeimbangkan kemampuan dan kekuatan industri yang maju dengan didukung oleh kekuatan dan kemampuan bidang pertanian yang tangguh. Dengan demikian diharapkan struktur ekonomi yang seimbang dapat tercapai melalui pelaksanaan serangkaian Repelita yaitu *Repelita pertama* yang menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. *Repelita kedua* menekankan pada pengolahan bahan mentah menjadi baha baku. *Repelita ketiga* lebih difokuskan pada swasembaa pangan dan peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sedang *Repelita keempat* memfokuskan pada peningkatan industri mesin- mesin dan alat-alat berat.²⁷⁷

Dengan meningkatkan perkembangan bidang industri dan pertanian secara bertahap seperti tersebut di atas, maka diharapkan akan terpenuhilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah struktur ekonomi yang seimbang yaitu struktur ekonomi dengan bertitik berat pada kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat, setelah dilampaui pembangunan lima tahun yang kelima atau yang keenam yang akan menjadi landasan bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

²⁷⁶ M.C.Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, hlm 77

²⁷⁷ *Ibid*, hlm 81

4. Dampak Ideologi Dari Peristiwa 1 Oktober 1965.

Secara tidak langsung Peristiwa 1 Oktober 1965 membawa dampak yang besar pada bidang ideologi khususnya pasca keluarnya Supersemar dari presiden Sukarno kepada Soeharto karena dengan berbekal Supersemar tersebut Soeharto membubarkan PKI. Dampak dari Peristiwa 1 Oktober 1965 setelah keluarnya Supersemar tersebut dalam bidang ideologi yang paling nyata adalah hancurnya ideologi komunis seiring dengan lenyapnya PKI, salah satu kekuatan politik yang efektif dalam tiga bulan terakhir tahun 1965, mengakibatkan yang tinggal hanyalah presiden dan kepemimpinan AD sebagai dua pusat kekuasaan yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan politik yang lebih kecil.²⁷⁸ Hancurnya ideologi komunis ini diiringi dengan terjadinya pembantaian besar-besaran secara massal terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut maupun terlibat dalam organisasi komunis. Pembantaian tersebut tidak hanya terjadi di Jawa namun sampai merembet hingga ke luar pulau Jawa.

Operasi pemulihan keamanan dan ketertiban yang dilancarkan oleh pemerintah telah berhasil mengungkap dan menumpas jaringan-jaringan PKI. Terhadap para anggota PKI dan simpatisannya yang diduga terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 telah dilakukan tindakan hukum. Dari pengalaman penumpasan PKI sejak tahun 1926 harus diwaspadai adanya kemungkinan sisa-sisa jaringan yang belum terungkap. Oleh karena itu, dibubarkannya PKI dan dilarangnya paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan ketetapan MPRS nomor XXV/MPRS/1966, serta dikembalikannya Pancasila sesuai dengan

²⁷⁸ G.Moedjanto, dkk, *Sejarah Indonesia dan Dunia*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, hlm.96

pengertiannya yang benar, belumlah menjamin bahwa negara kita sudah bebas dari faham komunisme.²⁷⁹

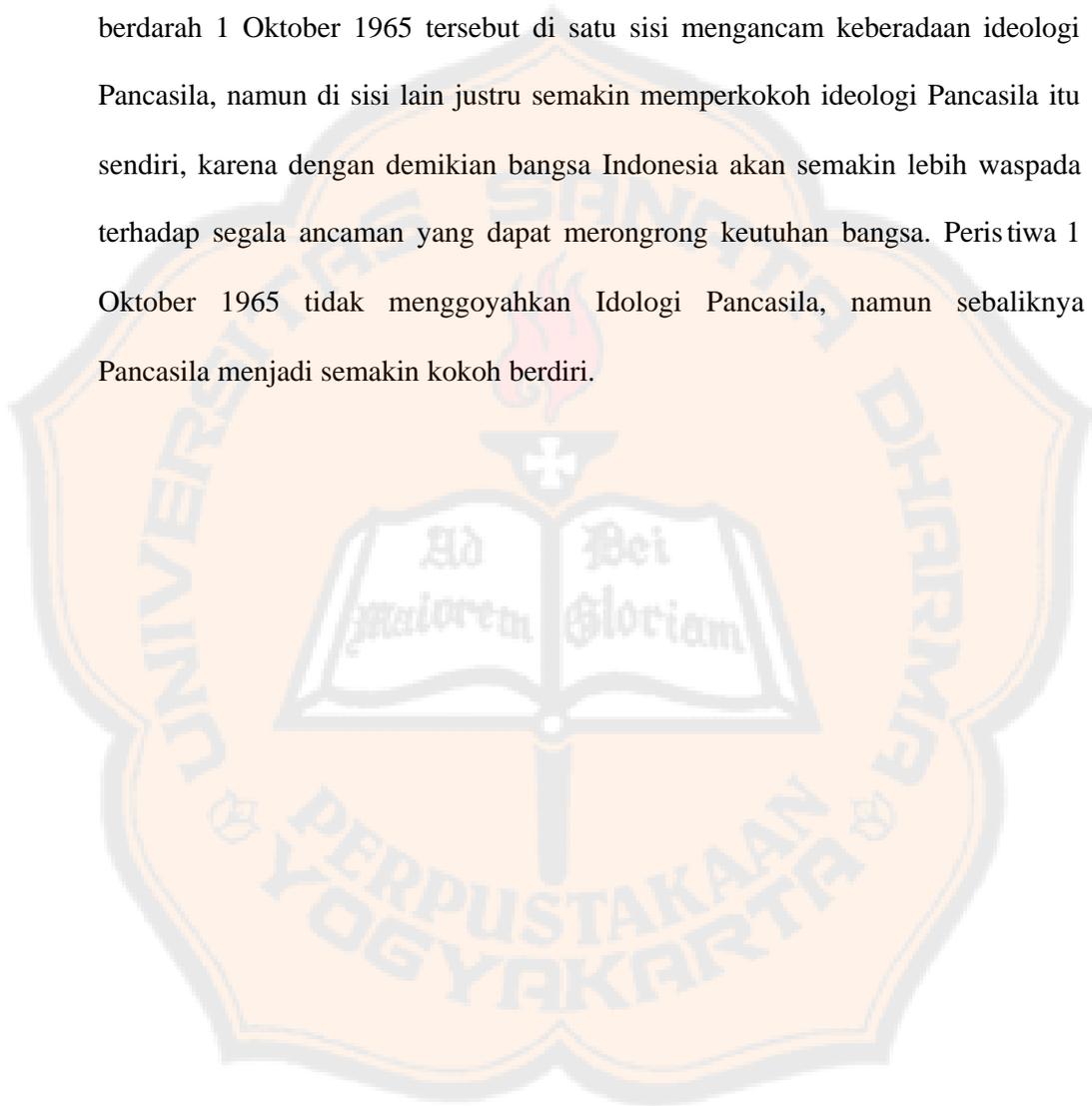
Pembubaran PKI dan dilarangnya ideologi komunisme/Marxisme-Leninisme di seluruh Indonesia bukan hanya disebabkan faham tersebut bertentangan dengan Pancasila, akan tetapi juga karena ideologi tersebut dianggap membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sekalipun komunisme di mana-mana mengalami kehancurannya, namun walaupun demikian marxisme dan ideologi komunisme tetap ada.

Mulai bulan April 1966, AD melancarkan gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang kemudian mendapat bentuk sebagai orde baru yang merupakan lawan dari orde lama yaitu orde yang telah menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai langkah selanjutnya diusahakan penyusunan kembali MPRS dengan membersihkan anasir-anasir gestapu. Sesudah lembaga tertinggi negara tersusun kembali, ditetapkanlah tanggal sidangnya yaitu tanggal 20 Juni-5 Juli 1966 di bawah pimpinan Jendral Nasution. Sidang tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya, TAP No.IX/MPRS/66 yang berisi tentang pengukuhan Supersemar, sehingga dengan demikian Presiden Sukarno tidak bisa mencabutnya, dan TAP No.XXV/MPRS/66 yang berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta dilarangnya penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.

Terjadinya Peristiwa berdarah pada 1 Oktober 1965 merupakan ancaman tersendiri bagi ideologi Pancasila, karena sejak awal kemunculannya, faham

²⁷⁹ *Ibid*, hlm 102

Komunis telah dianggap membahayakan ideologi Pancasila, karena bagaimanapun keberadaan paham komunis yang dianggap ideologi oleh para pendukungnya, bertentangan dengan Pancasila. Dengan meletusnya tragedi berdarah 1 Oktober 1965 tersebut di satu sisi mengancam keberadaan ideologi Pancasila, namun di sisi lain justru semakin memperkokoh ideologi Pancasila itu sendiri, karena dengan demikian bangsa Indonesia akan semakin lebih waspada terhadap segala ancaman yang dapat merongrong keutuhan bangsa. Peristiwa 1 Oktober 1965 tidak menggoyahkan Ideologi Pancasila, namun sebaliknya Pancasila menjadi semakin kokoh berdiri.



BAB V

PENUTUP

Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia, karena pada peristiwa tersebut telah gugur enam Pati Besar Angkatan Darat, dan peristiwa pembantaian massal terhadap orang-orang PKI sebagai dampak peristiwa itu telah menorehkan lembar paling hitam dalam sejarah Indonesia. Jika membicarakan tentang Peristiwa 1 Oktober 1965, maka yang langsung terbayang adalah kudeta yang dilancarkan oleh PKI, karena selama ini PKI lah yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Namun setelah dikaji lebih jauh, ternyata PKI sebagai partai tidak terlibat, sedang yang terlibat adalah “oknum-oknum” PKI, dan notabene oknum-oknum tersebut adalah berasal dari kalangan militer khususnya Angkatan Darat. Jadi, rasanya lebih tepat jika peristiwa ini disebut puncak dari konflik dalam Angkatan Darat, dan salah satu *klik* dalam Angkatan Darat ini diduga bekerja sama dengan intelijen Amerika Serikat, yaitu CIA.

Secara umum, PKI sebagai partai tidak terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, karena yang memainkan peranan adalah oknum PKI bukan PKI sebagai partai, karena jika PKI sebagai partai terlibat maka Jakarta akan hangus oleh jutaan massa PKI. PKI sendiri sudah berdiri sejak 1920 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 1966. Dalam perkembangannya, PKI telah dua kali melakukan pemberontakan, yaitu tahun 1926, dimana PKI memberontak terhadap Belanda dengan memanfaatkan Sarekat Islam. Tahun 1947, PKI melakukan

pemberontakan di Madiun. Pasca pemberontakan di Madiun, PKI sempat vakum karena tokoh-tokoh pimpinan PKI, seperti Aidit dan Alimin melarikan diri ke Moscow. Namun pada masa demokrasi liberal, PKI bangkit kembali setelah kembalinya Aidit dan Alimin dari Moscow.

Pada masa inilah, PKI tumbuh dan bangkit menjadi partai besar dengan jutaan massa pendukung, sehingga mampu mengantarkan PKI dalam empat partai terbesar dalam Pemilu tahun 1955 setelah PNI, NU, dan Masyumi. Untuk semakin memperkuat posisinya, PKI mendekati dan melakukan aliansi dengan PNI serta mendekati Sukarno. Pada masa demokrasi terpimpin, posisi PKI semakin kuat karena presiden Sukarno sangat dekat dengan PKI, bahkan Sukarno yang cenderung selalu mendukung dan melindungi PKI. Kedekatan PKI dengan Sukarno mendapat tentangan dari TNI AD yang menentang berkembangnya pengaruh komunis di Indonesia, karena komunis dianggap dapat menghancurkan ideologi Pancasila. Hal ini berlanjut dengan memburuknya hubungan Sukarno dengan TNI AD. Sukarno semakin melindungi PKI dengan mempertimbangkan kekuatan massa PKI untuk mengimbangi kekuatan TNI AD.

Pada tahun 1965, kondisi politik semakin tidak stabil. Isu sakitnya Presiden Sukarno yang diperparah dengan semakin gencarnya isu Dewan Jenderal serta dokumen Gilchrist, menyebabkan terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965. Tokoh-tokoh PKI, seperti Untung terlibat dalam tragedi berdarah tersebut. Peristiwa ini telah menyebabkan tewasnya enam Jenderal Besar Angkatan Darat yang dikenal dengan sebutan Pahlawan Revolusi. Selain tokoh-tokoh PKI yang notabene berasal dari militer Angkatan Darat juga memegang peranan penting dalam kup

tersebut. Pasukan Cakrabirawa yang bertugas menjemput para Jenderal serta Pasukan Pasopati yang merupakan gabungan beberapa batalyon pasukan AD, telah menunjukkan keterlibatan AD dalam G 30 S. Keterlibatan CIA juga tampak karena sebelum dan sesudah Peristiwa 1 Oktober 1965, di mana keterlibatan CIA tampak semakin jelas, terutama dalam pembantaian massal tahun 1965–1966. Dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, telah memunculkan TNI AD sebagai satu kekuatan militer yang berhasil menumpas PKI, dengan Jenderal Soeharto sebagai *figur head* nya. Keberhasilan Soeharto dalam menumpas PKI sekaligus membangun *image* bahwa Soeharto adalah pahlawan dan penyelamat bangsa di tengah situasi politik yang genting.

Peristiwa 1 Oktober 1965 telah membawa dampak yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Pembantaian massal dengan dalih menumpas PKI dan ormas-ormasnya di bawah komando Soeharto, telah menelan banyak korban. Tidak hanya orang-orang PKI, namun rakyat sipil yang tidak ada hubungannya dengan PKI pun turut menjadi korban. Pembantaian yang dilakukan secara bergelombang yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, maupun Flores tersebut telah menelan korban yang diperkirakan berkisar antara 500.000 hingga 2 juta orang. Berdasarkan saksi dan fakta, CIA diduga terlibat dengan memberikan daftar 5000 orang-orang PKI yang harus dihabisi.

Selain terjadi pembantaian massal yang menelan korban hingga mencapai jutaan orang Indonesia, orang-orang yang diduga terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 maupun orang-orang yang diduga mempunyai hubungan dengan

PKI kemudian ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Selain itu, sekitar 10.000 tahanan yang diduga berhubungan dengan PKI *dibuang* ke Pulau Buru selama bertahun-tahun sebagai budak tanpa proses pengadilan. Setelah bebas pun, para bekas Tapol ini tetap mengalami perlakuan tidak adil dengan statusnya yang bekas Tapol dan setiap KTP mereka dicap Ex-Tapol. Selain itu, anak-anak dan keturunan bekas Tapol ini tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, terutama pada rezim orde baru.

Dampak lain dari Peristiwa 1 Oktober 1965 adalah munculnya Tritura yang salah satu isi menuntut dibubarkannya PKI dan lahirnya Supersemar, yang secara *de facto* telah memberikan kekuasaan dari Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik untuk memulihkan situasi politik yang kacau. Supersemar sendiri dari fakta dan kesaksian-kesaksian pihak-pihak yang terlibat, menunjukkan bahwa Presiden Sukarno menyerahkan Supersemar ini di bawah tekanan (tidak dengan sukarela). Penyerahan Supersemar inilah yang menandakan menurunnya wibawa Sukarno, yang kemudian berimbas pada jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden ke-2 RI.

Dengan lengsernya Soeharto tahun 1998, menyebabkan pelaku-pelaku Gestapu dibebaskan dan mereka memberikan kesaksian-kesaksian yang memberatkan Soeharto. Soeharto dianggap orang yang paling bertanggung jawab dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, karena dianggap terlibat dalam peristiwa itu. Soeharto sebenarnya sudah tahu bahwa akan terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965, hanya ia sengaja membiarkan dan mengambil kesempatan dari peristiwa tersebut untuk tampil sebagai *penyelamat*. Peristiwa 1 Oktober 1965, lahirnya Supersemar,

dan pembantaian massal adalah Trilogi rekayasa yang dijalankan Soeharto untuk mengantarkannya menuju kursi presiden dengan jalan menggulingkan Sukarno, menumpas PKI sekaligus menghilangkan “saingan-saingannya” dalam Angkatan Darat yang tewas dalam peristiwa tersebut. Trilogi ini sudah cukup untuk mengantarkannya mencapai puncak kekuasaan setelah berhasil menyingkirkan Presiden Sukarno.

Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 juga berdampak besar dalam bidang ekonomi, yaitu semakin merosotnya kondisi perekonomian Indonesia, yang secara tidak langsung diakibatkan oleh semakin tingginya tingkat inflasi. Laju tingkat inflasi yang dialami bangsa Indonesia pasca terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 hingga mencapai 1320%, sedang jumlah uang yang beredar di masyarakat pasca Peristiwa 1 Oktober 1965 mencapai Rp.5000 milyar, yang mengakibatkan kondisi perekonomian menjadi semakin sulit.

Hal tersebut juga secara tidak langsung disebabkan oleh kondisi politik yang tidak stabil, di mana tidak dimungkinkan bagi investor asing untuk datang serta menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah terlalu terfokus pada pemulihan bidang politik, sehingga sektor perekonomian kurang diperhatikan dan sebagian besar anggaran belanja negara terfokus untuk kebutuhan militer. Akibatnya kondisi perekonomian negara menjadi semakin terpuruk.

Dengan terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 khususnya setelah keluarnya Supersemar dari presiden Sukarno kepada Soeharto yang kemudia membubarkan PKI menyebabkan ideologi komunis menjadi ideologi yang dilarang di Indonesia, terutama setelah terjadi penumpasan terhadap orang-orang PKI tahun 1965-1966. Jika di satu sisi ideologi komunis menjadi ideologi yang terlarang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Kuper, dkk,
2000: *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anderson, Benedict,
2005: *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Analisis Awal*. LPKSM Syarikat. Jakarta.
- Adisusilo, J.R.
1989; *Nasionalisme, Revolusi dan Perubahan Sosial di Perancis Sekitar Tahun 1789*. IKIP Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Asvi Warman Adam,
2003: *Revolusi Belum Selesai (Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara) Jilid II*. Messias. Semarang
- _____,
2004: *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Ombak. Yogyakarta.
- _____,
2004: *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Tride. Yogyakarta.
- Bilveer Singh,
1995: *Dwi Fungsi ABRI Asal Usul, Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Boerhan Soebekti,
1966: *Fakta Dan Latar Belakang G 30 S*. Semarang Sala. Semarang
- Crane Brinton,
1962: *Anatomi Revolusi* (terjemahan). Bhratara. Djakarta.
- Crouch, Harold,
1986: *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Dale Scoot, Peter,
2004: *“US and the Overthrow Of Sukarno 1965 –1967”* diterjemahkan Darma, *CIA dan Penggulingan Sukarno*. Lembaga Analisis Informasi. Yogyakarta.
- Dhakidae, Daniel,
2003: *Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Forlan, John,
2004: *The Future Revolution; masa depan di era globalisasi dan mendefinisi ulang makna revolusi*, Insist Press, Yogyakarta.
- Frederick, H. William,
1982: *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Revolusi*. Djaya Pirusa. Jakarta.
- Giebels, J. Lambert,
2005: *Pembantaian Yang Ditutup-Tutupi Peristiwa Fatal Di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Gottchalk, Louis,
1985: *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. UI Press. Jakarta.
- Hidayat Mukmin,
1992: *Dwi fungsi ABRI, Perkembangan dan peranannya Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____,
1991: *TNI Dalam Politik Luar Negeri*. Pustaka Harapan. Jakarta.
- Ismail Saleh,
1989: *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Intermasa. Jakarta.
- Kansil, C.S.T,
1987: *Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Keefer, C. Edward,
2002: *Dokumen CIA – Melacak Penggulingan Sukarno Dan Konspirasi G 30 S 1965*, diterjemahkan oleh Hasta Mitra. United States Government Printing Office. Washington.
- Koentjaraningrat,
1989: *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Koentowijoyo,
1995: *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta.
- Kursus Kader Katolik,
1966: *Kristalisasi Politik*. Sekretariat Nasional. Djakarta.
- Legge, D. John,
1985: *Kaum Intelektual Dan Perjuangan*. Sinar Harapan. Jakarta

- Lembaga Analisis Informasi (LAI),
2006: *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno – Soeharto*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Moedjanto, G,
1988: *Indonesia Abad ke-20 jilid I*. Kanisius. Yogyakarta.
- ,
1989: *Indonesia Abad ke-20 jilid II*. Kanisius. Yogyakarta.
- Mulia, T.S.G,
t. th: Ensiklopedi Indonesia. W. Van Hoeve. Bandung
- Notosusanto, Nugroho,
1989: *Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/ PKI di Indonesia*. Intermedia. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S,
1976: *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Proyek Historiografi Center For Information Analysis,
2005: *Gerakan 30 September Antara Fakta Dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Pusat Penerbangan Angkatan Darat,
1965: *Fakta – Fakta Persoalan Sekitar G 30 S*. Balai Pustaka. Djakarta.
- Radik Utoyo Sudirjo,
1979: *Fajar Orde Baru (Lahirnya Orde Baru)*. Yayasan Kesejahteraan Jayakarta. Jakarta.
- Rosihan Anwar,
1980: *Sebelum Prahara Pergolakan Politik Indonesia 1961-1965*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Hassan Sathily,
1980: *Ensiklopedi Indonesia Jilid II*. Ichtiar Baru. Jakarta.
- ,
1973: *Ensiklopedi Umum*. Yayasan Kanisius Yogyakarta.
- Sartono Kartodirjo, dkk,
1977: *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Balai Pustaka. Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia,

1989: *Peranan ABRI Dalam Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia (1965 – 1979)*. CV Haji Massagung. Jakarta.

Staf Pertahanan Keamanan Lembaga Sejarah,

1966: *40 Hari Kegagalan G 30 S 1 Oktober – 10 November 1965*. Djakarta.

Surya Lesmana,

2005: *Saksi Dan pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Suwarno, P.J,

2004: *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945 – 1966 (Dari TKR sampai Supersemar)*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Sundhaussen, Ulf,

1986: *Politik Militer Indonesia 1945 – 1969 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3S. Jakarta.

Dharmawan Tjondronegoro,

1966: *Ledakan Fitnah Subversi G 30 S*. PT Matoa. Djakarta.

Todiruaan Dydo,

1989: *Pergolakan Politik Tentara Sebelum Dan Sesudah G 30 S/PKI*. Golden Terayon Press. Jakarta.

Wardaya, T. Baskara,

2006: *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '06 Hingga G 30 S*. Galang Press. Yogyakarta.

Webb, R.A.F Paul,

2005: *Di PKI Kan Tragedi 1965 dan kaum Nasrani di Indonesia Timur*. Syarikat. Yogyakarta.

Yahya Muhaimin,

1982: *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

1971: *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Seri Penerbitan Skripsi Terbaik. Yogyakarta.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SURAT – PERINTAH**

- I. Mengingat:
Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun internasional.
- Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi/pada tanggal 6 Maret 1966.
- II. Menimbang:
- 2.1.Perlu adanya ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
- 2.2.Perlu adanya djaminan keutuhan Pimpinan Besar Revolusi/ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi Pimpinan Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja.
- III. Memutuskan/Memerintahkan:
Kepada : LETNAN DJENDRAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT.
- Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi:
1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannya Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan Panglima Angkatanlain dengan sebaik-baiknya.
 3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung djawabnja.
- IV. Selesai.

Djakarta, 11 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA
TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR
REVOLUSI/MANDATARIS

M.P.R.S.

SUKARNO



Sumber:

P.J.Suwarno, *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Supersemar)*, Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004.

ISI DEKRIT PRESIDEN

5 JULI 1959

1. Menetapkan pembubaran konstituante.
2. Menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
3. Dibentuknya MPRS dan DPRS.

Sumber:

Nugroho Notosusanto (ed)., *Pejuang dan Prajurit Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**DEKRIT NO.1
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI
INDONESIA**

- I. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya, demi keselamatan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang telah merencanakan Coup menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Sejumlah Jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnya di Ibu Kota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan “Gerakan 30 September”. Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal-jenderal Anggota Dewan Jenderal serta perwira-perwira lainnya yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata di luar Angkatan Darat.
- II. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada Gerakan 30 September 1965, maka oleh Pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatan sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan Gerakan 30 September.
- III. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bias berakibat luas. Semyua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.
- IV. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang) dan Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-

orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan-dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di propinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di kecamatan dan di desa dibantu oleh pimpinan Front Nasional setempat yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

- V. Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil komandan Gerakan 30 September. Komandan dan wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi Indonesia.
- VI. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat di atasnya tentang susunan lengkap anggota dewan. Dewan-dewan Revolusi Propinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidium Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Propinsi. Dewan Revolusi Kecamatan dan Desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

Jakarta, 1 Oktober 1965

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Komandan : Letnan Kolonel Untung

Wakil Komandan : Brigjen Supardjo

Wakil Komandan : Letnan Kolonel Udara Heru

Wakil Komandan : Kolonel Laut Sunardi

Wakil Komandan : Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965, sekitar jam 13.00)

Sumber:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994.

**KEPUTUSAN NO. 1
TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA**

- I. Memenuhi isi Dekrit No.1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia :
1. Letnan Kolonel Untung, Ketua Dewan
 2. Brigjen Supardjo, Wakil Ketua Dewan
 3. Letnan Kolonel Udara Heru, Wakil Ketua Dewan
 4. Kolonel laut Sunardi, Wakil Ketua Dewan
 5. Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas, Wakil Ketua Dewan
 6. Omar Dhani, Laksamana Madya Udara
 7. Sutjibto Judodihardjo, Inspektur Jendral Polisi
 8. E. Martadinata, Laksamana Madya Laut
 9. Dr. Subandrio
 10. Dr. J.Laimena
 11. Ir. Suracman (golongan nasionalis)
 12. Fattah Jassin (golongan agama)
 13. K.H.Siradjudin Abas (golongan agama)
 14. Tjugito (golongan komunis)
 15. Arudji Kartawinata
 16. Sjiwau Giok Tjan
 17. Sumarno, S.H.
 18. Hartono, Mayjen KKO
 19. Sutarto, Brigjen Polisi
 20. Zaini Mansyur (Front Pemuda Pusat)
 21. Jahja, S.H. (Front Pemuda Pusat)
 22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
 23. Bambang Kusnohadi (PPM)
 24. Rachman (Wakil Sekjen Front Nasionalis)
 25. Hardojo (Mahasiswa)
 26. Basuki Rachmat, Mayjen
 27. Ryacudu, Brigjen
 28. Solichin, Brigjen
 29. Amir Mahmud, Brigjen
 30. Andi Rivai, Brigjen
 31. Sujono, Mayor Udara
 32. Leo Wattimena, Komodor Udara
 33. Dr. Utami Surjadarma
 34. A.Latief, Kolonel
 35. Umar Wirahadikusumah, Mayjen
 36. Ny.Supeni
 37. Ny.Mahmudah Mawardi
 38. Ny.Suharti Suwarno
 39. Fatah, Kolonel

40. Suherman, Kolonel
41. Samsu Sutjibto, Kolonel Laut
42. Suhardi (Wartawan)
43. Drs.Sumartono, Komisaris Besar Polisi
44. Dfjunta Suwardi
45. Karim D.P.(Persatuan Wartawan Indonesia)

II. Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang di antara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.

III. Semua Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sipil diberi hak memakai tanda pangkat militer Letnan Kolonel atau yang setingkat. Anggota Dewan Revolusi dari kalangan Angkatan Bersenjata tetap dengan pangkat yang lama, kecuali yang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September, yaitu Letnan Kolonel atau yang setingkat.

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ketua Dewan Revolusi Indonesia

Ttd

(Letnan Kolonel Untung)

Jakarta, 1 Oktober 1965

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 13.00)

Sumber:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI:Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994.

**KEPUTUSAN NO. 2
TENTANG PENURUNAN DAN PENAIKAN PANGKAT**

- I. Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965 diambil alih oleh Gerakan 30 September yang komandannya adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel, maka dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang di atas Letnan Kolonel atau setingkat. Semua perwira yang tadinya berpangkat di atas Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaan secara tertulis kepada Dewan Revolusi Indonesia dan baru sesudah itu berhak memakai pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel adalah pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia.
- II. Karena Gerakan 30 September pada dasarnya adalah gerakan daripada prajurit bawahan, terutama daripada tamtama dan bintangara, maka dengan ini dinyatakan bahwa semua tamtama dan bintangara dari semua Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendukung Gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.
- III. Semua tamtama dan bintangara yang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal pada tanggal 30 September malam di Jakarta, dinaikkan pangkatnya 2 tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.

Komandan Gerakan 30 September/Ketua

Dewan Revolusi Indonesia

ttd

(Letnan Kolonel Untung)

Jakarta, 1 Oktober 1965

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 13.000)

Sumber :
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Gerakan 30 September
Pemberontakan PKI : Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya, Jakarta,
1994.

THE GILCHRIST DOCUMENT

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA

Perkara H. Dr. Subandrio

Turunan

March 24, 1965

Draff

Telegram to:

any:

FOREIGN OFFICE

PERSONAL

Date: March 24, 1965

Security Classification, if

TOP SECRET,

Addressed to FOREIGN OFFICE
FOR SIR HAROLD CACCIA
Telegram No.....Date: March 24, 1965

I discussed with the American Ambassador the questions set out in your No. 67786/65.

The Ambassador agreed in principal with our position but asked for time to investigate certain aspects of the matter.

To my question on the possible influence of Bunkers visit, to Jakarta, the Ambassador stated that he saw *no chance of improving* the situation, and that there was therefore no reason for changing our joint plans. On the contrary, the visit of the U.S.S. Presidents personal onvoy would give us more time to prepare the operation in the outmost detail.

The Ambassador felt that further measures were necessary to bring our efforts into closer alignment. In this connection, he said that it would be useful to impress again on our local army friends that extrime care, discipline and coordination of action were essential for the success of the enterprise.

I promise to take all necessary measures. I will report my own views personally in due course.

GILCHRIST

Document No. 18 n 371

Diturun dari photocopy

Panitera,

S. Madidy BC/HK

Kap.CKH.Nro.250718

Sumber:

Victor M.Fic, *Kudeta 1 Oktober 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Terjemahan

DOKUMEN GILCHRIST

MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA TURUNAN

Perkara H. Dr. Subandrio
1965

24 Maret

Draff

Telegram Kepada: SANGAT RAHASIA, PRIBADI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TANGGAL : 24 Maret 1965

Kepada KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Untuk SIR HAROLD CACIA
Telegram No.....tanggal: 24 Maret 1965

Saya telah mendiskusikan dengan Duta Besar Amerika tentang masalah yang Saudara kemukakan No. 67786/65.

Duta Besar Amerika pada prinsipnya telah menyetujui tentang posisi kita, tetapi meminta waktu untuk menyelidiki segi-segi tertentu dari masalah tersebut.

Atas pertanyaan saya mengenai pengaruh yang mungkin ditimbulkan atas kunjungan Bunker ke Jakarta, Duta Besar Amerika menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya harapan untuk memperbaiki situasi dan karenanya tidak ada alasan untuk mengubah rencana-rencana kita bersama.

Sebaiknya kunjungan pribadi Presiden Amerika Serikat tersebut akan memberi waktu lebih banyak untuk mempersiapkan gerakan sampai pada perincian yang sekecil-kecilnya.

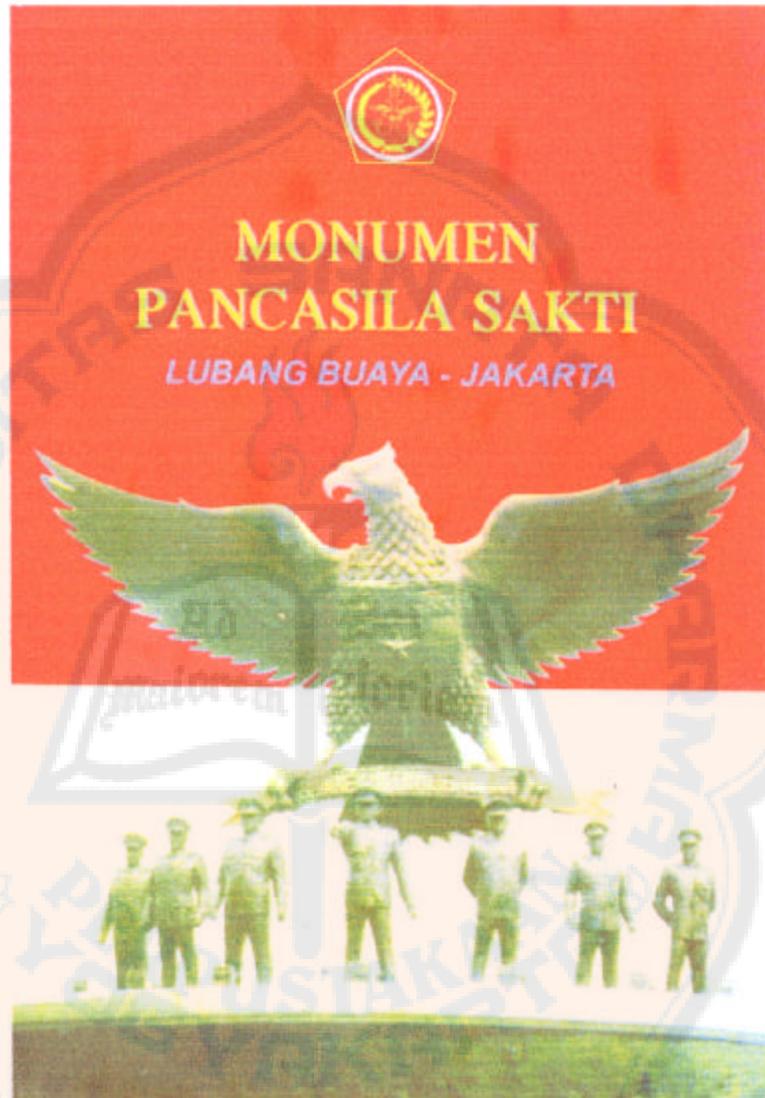
Duta besar merasa bahwa usaha-usaha lebih jauh adalah perlu untuk lebih mendekatkan usaha-usaha bersama. Dalam hubungan ini ia mengatakan bahwa sangat berguna untuk memberikan kesan kepada our local army friends (kawan-kawan dari Angkatan Darat di sini) bahwa ketelitian, disiplin, dan kerja sama dari segala tindakan sangat penting untuk berhasilnya tujuan. Saya berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Saya akan melaporkan pendapat saya sendiri secara pribadi pada saatnya.

GILCHRIST

Sumber:

Victor M.Fic, *Kudeta 1 Oktober 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

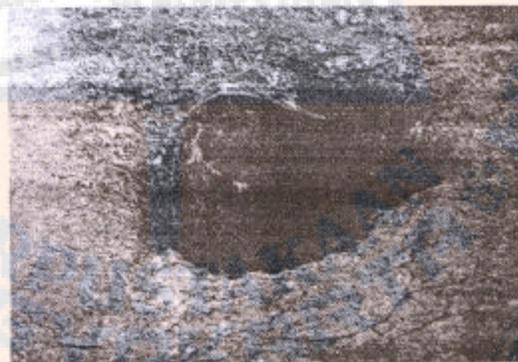


Gambar: Monumen Pancasila Sakti

Sumber Internet: www.google.com... lubang buaya



Gambar Lobang Buaya (Sekarang)



Gambar Lobang Buaya (Tahun 1965)

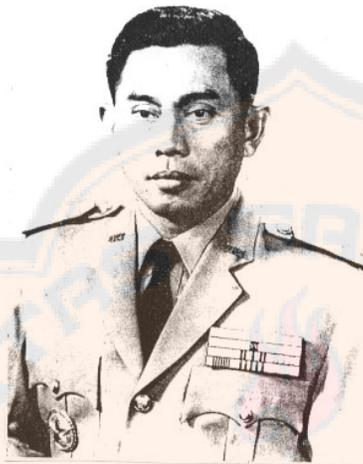
Sumber Internet: [www.google.com...lobang buaya](http://www.google.com...lobang_buaya)



As two men await certain death, a soldier bayonets those at his feet. (October 1965)

Gambar: Pembantaian Massal Terhadap Orang-Orang PKI Tahun 1965-1966

Sumber Internet: www.google.com...lobang banyu



Letnan Jendral Ahmad Yani,
Menteri Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Koti



Brigadir Jenderal Donald Izacus Pandjaitan,
Asisten IV Men/Pangad



Brigadir Jenderal Soetojo Siswomihardjo,
Inspektur Kehakiman AD



Mayor Jenderal R. Soeprapto,
Deputi II Men/Pangad

Gambar: Pahlawan Revolusi



Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo,
Deputi III Men/Pangad



Mayor Jenderal Suwondo Parman,
Asisten I Men/Pangad



Letnan Satu Pierre Tendeau,
Ajudan Menko Hankam/Kasab



Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun



Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo,
Deputi III Men/Pangad



Mayor Jenderal Suwondo Parman,
Asisten I Men/Pangad



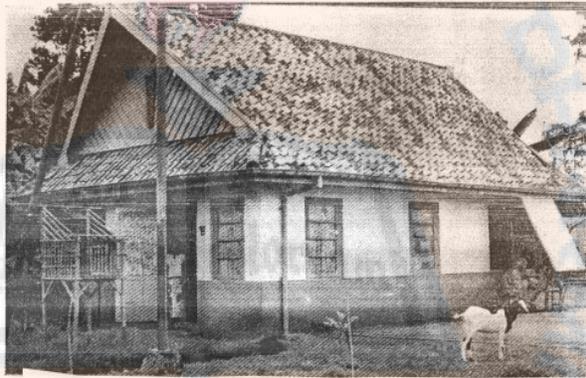
Letnan Satu Pierre Tendeau,
Ajudan Menko Hankam/Kasab



Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun



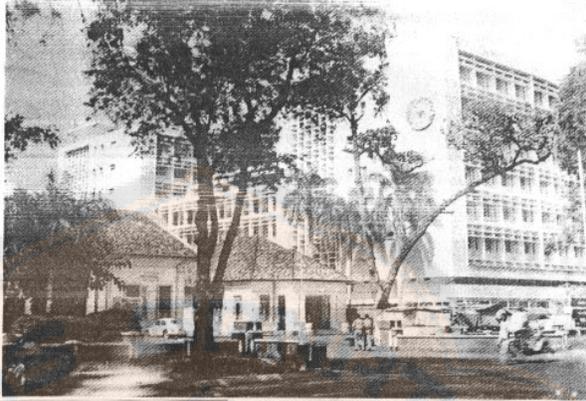
Markas Besar Sjam, Untung, Supardjo, Latief,
Sujono, Heru, Walujo, Pono; Rumah Sersan Udara Anis Sujatno.



Gambar: Markas Besar Aidit di Halim, Rumah Sersan Udara Suwardi



Gambar: Gedung Pengadilan Rakyat Lubang Buaya



Gedung Pusat Telekomunikasi.



Markas Besar Tjakrabirawa, Pengawal Istana.



Markas Besar KOSTRAD: Komando Strategis Angkatan Darat.



Gambar 1



Gambar 2

Gambar: Pemakaman Putri Jend.A.H.Nasution
(Salah Satu Korban G30S)



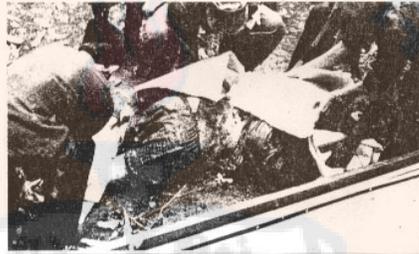
Gambar: Kondisi Awal Lobang Buaya Yang Ditutupi Sampah



Gambar: Lobang Buaya Dibongkar



Gambar: Seorang Prajurit Kipam (Komando Intai Amphibi) Sedang memasuki Lobang Buaya untuk mengeluarkan jenazah para jenderal korban G30S



Gambar: Saat-saat penggalian dan pengangkatan tujuh jenazah korban G30S dari Lobang Buaya



Gambar: Seorang Prajurit Kipam (Komando Intai Amphibi) Sedang memasuki Lobang Buaya untuk mengeluarkan jenazah para jenderal korban G30S



Ket. Gambar di Atas: Peti jenazah diangkut dengan kendaraan lapis baja disertai upacara militer



Gambar: Saat-saat pemakaman jenazah korban G30s

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah
 Satuan Pendidikan : SMA
 Kelas/Program : XII
 Semester : I
 Standar Kompetensi : Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber bahan
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
Memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan G30S/PKI	Menjelaskan latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965	1. Latar belakang politik a. Muncul dan berkembangnya PKI b. PKI pada masa demokrasi liberal c. PKI pada masa demokrasi terpimpin d. Situasi politik Indonesia menjelang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 2. Latar belakang	Siswa dapat menjelaskan dalam diskusi tentang latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ideologi	Tes	Uraian	1. Jelaskan latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965!	2X45 menit	.Buku paket Harold Crouch, <i>Militer Dan Politik di Indonesia</i> , Sinar Harapan Jakarta. Asvi Warman Adam, <i>Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia</i> , Ombak, Yogyakarta. G Moedjanto, <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 2</i> , Kanisius, Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		ekonomi 3.Latar belakang sosial 4.Latar belakang ideologi						
	Mendeskripsikan keterlibatan TNI-AD, PKI, CIA, dan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965	1.TNI-AD penghalang utama PKI. 2.Keterlibatan PKI dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 3.Keterlibatan TNI-AD dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 4.Keterlibatan CIA dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 5.Keterlibatan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.	Siswa dapat mendeskripsikan keterlibatan TNI-AD, PKI, CIA dan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.	Tes	Uraian	2.Deskripsikan keterlibatan TNI-AD, PKI, CIA, dan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965?		.Buku paket Harold Crouch, <i>Militer Dan Politik di Indonesia</i> , Sinar Harapan Jakarta.Asvi Warman Adam, <i>Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia</i> , Ombak,Yogyakarta. G Moedjanto, <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 2</i> , Kanisius, Yogyakarta.Surya Lesmana, <i>Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965</i> , Media Pressindo, Yogyakarta.
	Menguraikan dampak Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang	1.Dampak politik dari Peristiwa 1 Oktober 1965. a.Munculnya Tritura dan	Siswa dapat menguraikan dampak Peristiwa 1 Oktober 1965	Tugas	Uraian	3.Uraikan dampak Peristiwa 1 Oktober		.Buku paket Lambert Giebels, <i>Pembantaian yang Ditutup-tutupi Peristiwa Fatal Di</i>

	<p>politik, ekonomi, sosial dan ideologi di Indonesia.</p>	<p>terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) b.Terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang PKI tahun 1965-1966 c.Pembuangan tahanan politik ke Pulau Buru e.Jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden RI ke-2. 2.Dampak sosial dari Peristiwa 1 Oktober 1965 3.Dampak ekonomi dari Peristiwa 1 Oktober 1965 4.Dampak ideologi dari Peristiwa 1 Oktober 1965</p>	<p>dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan ideologi di Indonesia.</p>			<p>1965 dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ideologi di Indonesia!</p>	<p><i>Sekitar Kejatuhan Bung Karno</i>, Gramedia, Jakarta. Harold Crouch, <i>Militer Dan Politik di Indonesia</i>, Sinar Harapan Jakarta. Asvi Warman Adam, <i>Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia</i>, Ombak, Yogyakarta. G Moedjanto, <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 2</i>, Kanisius, Yogyakarta. Yahya Muhaimin, <i>Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966</i>, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Yogyakarta, ...Desember 2006

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Drs.Zai Zai

Mikael Lipo



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Nama Sekolah : SMU
Mata Pelajaran : Sejarah
Kelas/Semester : XII/I
Alokasi Waktu : X45 Menit

A. Standar Kompetensi

Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga lahirnya orde baru.

B. Kompetensi Dasar

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi terutama dari pergolakan dan pemberontakan G30S/PKI.

C. Materi Pokok

Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965

D. Indikator

- Menjelaskan latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965
- Menjelaskan dan menganalisis ketelibatan TNI-AD, PKI, CIA dan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.
- Menguraikan dampak Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ideologi di Indonesia.

E Uraian Materi (Ringkasan)

1. Latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965

a. Latar belakang politik

- Muncul dan berkembangnya PKI

Awal mula pertentangan ini terjadi yaitu sejak kemunculan PKI yang berfaham komunis pada tahun 1920. Kehadiran PKI ini sangat ditentang oleh golongan TNI khususnya TNI-AD dengan alasan bahwa kehadiran PKI dianggap dapat mengancam eksistensi Pancasila. Komunisme di Indonesia di bawa oleh seorang sosialis Belanda bernama Henricus Sneevliet (1883-1942) yang mendirikan

Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV) pada tahun 1914 dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920. TNI-AD menyadari bahwa secara ideologis, Marxisme-Leninisme suatu waktu dapat mengancam keselamatan Pancasila karena paham tersebut pada akhirnya akan diperjuangkan melalui perjuangan bersenjata dan pertumpahan darah.

- PKI pada masa demokrasi liberal

Periode tahun 1950-1959 disebut-sebut sebagai masa demokrasi liberal yang merupakan jaman keemasan bagi kehidupan partai-partai politik di Indonesia, karena dengan dianutnya sistem ini menyebabkan berkurangnya kekuasaan presiden, mengingat kekuasaan riil sepenuhnya berada ditangan perdana menteri. Oleh karena itu, keberadaan partai politik kecuali kekuasaan politik sekaligus penentu dalam pengambilan keputusan politik, sedang kekuasaan presiden dan kaum militer kecil sekali.

Pada masa demokrasi liberal inilah PKI dapat kembali bangkit dan mampu mensejajarkan dirinya dengan partai-partai besar lainnya. Bahkan dalam pemilu tahun 1955, PKI masuk sebagai salah satu dari empat partai besar pemenang pemilu setelah PNI, Masyumi dan NU.

- PKI pada masa demokrasi terpimpin

Pada periode ini perkembangan PKI semakin meningkat drastis terutama dengan adanya dukungan dari Presiden Sukarno. Pada masa ini pengaruh partai-partai dalam pemerintahan mulai berkurang, karena kekuasaan hampir sepenuhnya berada di tangan Presiden Sukarno. Namun berbeda halnya dengan PKI, bila partai-partai lain relatif tidak punya suara lagi dalam penentuan nasib negara, PKI setahap demi setahap mampu bangkit menjadi satu partai politik yang kokoh.

Perkembangan PKI yang semakin pesat tersebut nampak dalam penambahan jumlah anggota (massa) PKI yang meningkat drastis dari 7910 orang menjadi 400.000 orang, dan meningkat terus hingga menjadi 3,5 juta anggota, hal tersebut belum termasuk para simpatisannya. PKI menjadi semakin kuat dan disegani, setelah PKI berhasil mendekati dan menjalin hubungan baik dengan Presiden Sukarno. Namun kedekatan hubungan tersebut menyebabkan hubungan antara Presiden Sukarno dengan TNI-AD menjadi tidak baik.

- Situasi politik Indonesia pada saat terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965.

Menjelang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965, situasi politik Indonesia semakin memanas terutama dengan renggangnya hubungan antara Presiden Sukarno dengan TNI-AD karena sikap Sukarno yang cenderung melindungi PKI, di samping adanya di dalam tubuh TNI-AD sendiri, terutama yang beraliran kanan. Situasi politik semakin memanas setelah adanya kabar bahwa Presiden Sukarno jatuh sakit dan dikabarkan bahwa presiden Sukarno akan meninggal. Kondisi ini semakin kacau dengan munculnya isu adanya dewan jenderal yang akan melakukan kudeta kepada

pemerintah. Isu dewan jenderal tersebut semakin diperparah dengan adanya isu dokumen Gilchrist yang berisi rencana kudeta yang akan dilakukan oleh TNI-AD. Kekacauan politik ini bermuara pada terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965.

b. Latar belakang sosial ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan terutama pada masa demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan karena ketidakstabilan kondisi politik Indonesia, ditambah dengan terjadinya krisis ekonomi yang kemudian semakin diperparah dengan terjadinya inflasi hingga mencapai 65%. Kondisi perekonomian rakyat semakin memburuk, nilai rupiah semakin menurun yang berdampak pada devaluasi mata uang rupiah, harga-harga kebutuhan hidup rakyat semakin tinggi, yang berdampak pada daya beli masyarakat semakin rendah. Akibatnya rakyat hidup sangat menderita dan kelaparan terjadi di mana-mana.

c. Latar belakang ideologi

Latar belakang ideologi yang dimaksud di sini adalah pertentangan ideologi antara TNI-AD dengan PKI yang notabene beraliran komunis. TNI-AD sangat menentang kehadiran pengaruh komunis di Indonesia, sehingga TNI-AD berusaha menekan pengaruh komunis karena ideologi ini dipandang sebagai ancaman serius yang pada akhirnya kelak dapat meruntuhkan Pancasila.

2. Keterlibatan TNI-AD, PKI, CIA dan Soeharto dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.

a. TNI-AD penghalang utama PKI

TNI-AD adalah basis kekuatan militer di Indonesia, jadi secara tidak langsung TNI-AD adalah penghalang utama bagi tumbuh dan berkembangnya PKI, karena TNI-AD adalah salah satu golongan yang sangat menentang kehadiran pengaruh komunis di Indonesia. PKI sendiri memandang bahwa lawan utamanya adalah TNI-AD, pimpinan TNI-AD pun menyadari hal tersebut maka TNI-AD selalu waspada dan tidak ragu-ragu dalam menghadapi PKI. Apapun yang dilakukan oleh PKI selalu mendapat tentangan dari TNI-AD, dan setiap rencana PKI selalu digagalkan oleh TNI-AD. Bagi PKI, TNI-AD adalah penghalang utama yang harus dilawan, bila perlu disingkirkan.

b. Keterlibatan PKI pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Yang dimaksud dengan keterlibatan PKI di sini lebih mengacu pada PKI sebagai oknum-oknum yang melakukan bukan PKI sebagai partai. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKI dalam hal ini juga terlibat, terutama tokoh-tokoh PKI seperti Untung, Aidit, Latief, Supardjo, Syam dan tokoh-tokoh lain. Ironisnya sebagian besar tokoh PKI yang terlibat dalam peristiwa tersebut berasal dari kalangan militer terutama Angkatan Darat.

c. Keterlibatan TNI-AD pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Keterlibatan TNI-AD dalam peristiwa tersebut tidak dapat dipungkiri karena di satu sisi tokoh-tokoh inti pelaku G30S sendiri berasal dari kalangan TNI-AD. Selain itu keterlibatan pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa tersebut mengindikasikan bahwa TNI-AD juga terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Indikasi keterlibatan TNI-AD tersebut semakin menguat dengan keterlibatan pasukan Pasopati di mana di dalamnya terdiri dari satuan-satuan militer batalion I Resimen Cakrabirawa, battalioan 454 Divisi Diponegoro, batalion 530 Divisi Brawijaya, Pasukan Gerak Cepat AURI, Brigade Infanteri I Jakarta Raya serta didukung oleh Pasukan Cakrabirawa.

d. Keterlibatan CIA pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa secara tidak langsung, Amerika Serikat melalui CIA terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965, terutama dalam pembantaian massal terhadap orang-orang PKI dalam rentang tahun 1965-1966. Jika dianalisis, maka sangatlah tidak mustahil bahwa Amerika Serikat terlibat dalam Peristiwa 1 Oktober 1965 karena jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Amerika sudah terlibat terlalu dalam dalam urusan intern politik Indonesia dengan tujuan untuk menghancurkan PKI, salah satunya dengan cara memberi dana kepada partai Masyumi agar dapat mengalahkan PKI dalam pemilu tahun 1955. Setelah terjadi Peristiwa 1 Oktober 1965, keterlibatan Amerika tampak semakin jelas.

e. Keterlibatan Soeharto pada Peristiwa 1 Oktober 1965

Selain keterlibatan TNI-AD, PKI, dan CIA, secara personal Soeharto ikut terlibat dalam kejadian berdarah tersebut. Tanpa banyak diketahui, ternyata antara Soeharto dan tokoh-tokoh inti pelaku G30S sudah terjalin hubungan yang erat, bahkan Soeharto sudah mengetahui bahwa akan terjadi penculikan terhadap para jenderal AD, namun Soeharto terkesan sengaja membiarkan peristiwa itu terjadi. Jadi dengan terjadinya peristiwa tersebut, Soeharto mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus yaitu *pertama* Soeharto tidak memiliki saingan lagi untuk menguasai AD, *kedua* melemahnya kepemimpinan Presiden Sukarno karena kehadirannya di Halim Perdana Kusuma yang menimbulkan dugaan bahwa beliau terlibat dalam G30S, *ketiga* melemahnya pendukung-pendukung loyalis Sukarno dan *keempat* Soeharto dapat tampil sebagai figur utama yang akan menjadi penyelamat dalam kondisi genting.

3. Dampak Peristiwa 1 Oktober 1965

a. Dampak Politik

● Munculnya Tritura dan terbitnya Supersemar

Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 menyebabkan terjadinya kemelut politik yang semakin tidak menentu, terjadinya demonstrasi-demonstrasi yang menuntut

dibubarkannya PKI terjadi di mana-mana. Selain menuntut dibubarkannya PKI, para demonstran juga menuntut agar dilakukan perbaikan ekonomi khususnya penurunan harga-harga barang yang kemudian dikenal dengan istilah Tritura. Sementara pada tanggal 11 Maret 1965, saat kabinet mengadakan sidang paripurna, istana dikepung oleh pasukan tidak dikenal yang ternyata adalah pasukan RPKAD di bawah kendali Soeharto. Kondisi ini menyebabkan Presiden Sukarno pergi ke istana Bogor dan dari sanalah kemudian memunculkan Supersemar.

- Terjadinya Pembantaian massal terhadap orang-orang PKI tahun 1965-1966

Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 menyebabkan terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang PKI dengan alasan sebagai konsekuensi pembalasan dendam atas kematian enam jenderal korban G30S. Pembantaian massal tersebut untuk kawasan Asia hanya dikalahkan oleh pembantaian Pol Pot di Kamboja. Langkah pertama yang ditempuh Soeharto dengan berbekal Supersemar adalah mengamankan seluruh daerah, selanjutnya mengejar dan menahan orang-orang PKI yang ternyata disertai dengan pembunuhan-pembunuhan yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Jumlah korban pembantaian tersebut diperkirakan mencapai 500.000 hingga 2 juta orang yang meliputi pulau Jawa, Bali, Sumatera hingga Flores. Pembantaian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti pisau, golok, dan senjata api. Sedangkan bagi yang lolos dari pembantaian tersebut kemudian ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan.

- Pembuangan terhadap tahanan politik ke Pulau Buru

Korban-korban keganasan militer dalam upaya menumpas PKI, selain dipenjara di wilayah Jawa, mereka juga ditangkap dan diasingkan di tempat lain sebagai tahanan politik (Tapol), salah satunya di Pulau Buru. Pulau ini termasuk dalam lingkungan kabupaten Maluku Tengah dengan luas daerah sekitar 9.599 km persegi dan pada tahun 1969 pulau ini dijadikan sebagai tempat pemasyarakatan sekitar 25.000 orang tahanan politik PKI.

- Jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden kedua RI.

Terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 secara tidak langsung telah menurunkan kewibawaan presiden Sukarno karena Sukarno dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dengan kehadirannya di Halim Perdana Kusuma. Lambat laun kekuasaan presiden Sukarno mulai memudar, apalagi setelah terbitnya Supersemar serta satu persatu pendukungnya mulai meninggalkannya. Di sisi lain Soeharto semakin gencar dalam mempengaruhi opini publik sehingga rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada presiden Sukarno. Puncaknya ketika pidato Nawaksara presiden Sukarno ditolak dan mandatnya sebagai presiden dicabut oleh MPRS, kemudian presiden Sukarno dilarang melakukan aktivitas politik hingga terpilihnya presiden yang baru.

b. Dampak Sosial

- Dampak sosial yang paling nyata adalah dampak yang dialami oleh korban pembunuhan yaitu keluarga para jenderal AD. Mereka telah kehilangan sosok ayah, suami, kepala keluarga dan yang pasti peristiwa tersebut telah meninggalkan duka dan trauma yang sangat dalam.
- Dampak yang dialami oleh para tahanan politik yang dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan, mereka telah kehilangan keluarga dan sanak familinya.
- Nasib para tahanan politik di Pulau Buru yang mengalami perampasan berangkai atas segala hak miliknya. Dampak paling nyata adalah perampasan dalam kehidupan seksual para tapol sehingga banyak terjadi kasus homoseksual di pulau tersebut karena para tapol tersebut telah diputus dunianya dari dunia normal yang di huni oleh laki-laki dan perempuan.
- Bagi korban pembantaian massal dan orang-orang yang di cap sebagai orang-orang serta keturunan PKI, mereka mengalami penderitaan selama hidupnya, dikucilkan, mengalami diskriminasi seperti misalnya KTP yang dibubuhi Ex-tapol. Selanjutnya mereka tidak boleh dipilih dalam pemilu dan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, dan anak-anak mereka pun diberlakukan ketentuan-ketentuan diskriminatif yaitu seperti misalnya tidak boleh menjadi pegawai negeri.

c. Dampak Ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia yang merosot drastis sebelum terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 justru semakin parah pasca terjadinya peristiwa tersebut. Tercatat bahwa inflasi semakin parah dan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk karena pemerintah yang terlalu terfokus pada pemulihan kondisi politik. Selain itu 45% anggaran belanja negara hanya dipergunakan untuk keperluan militer saja, akibatnya sektor ekonomi terabaikan.

Dari uraian di atas, tampak bahwa tingkat inflasi yang dialami oleh bangsa ini semakin meningkat sehingga berimbas pada kehidupan rakyat yang semakin menderita. Karena itulah yang menjadi fokus utama diawal-awal pemerintahan orde baru adalah pemulihan kondisi perekonomian bangsa yang hancur.

d. Dampak Ideologi

Dampak dalam bidang ideologi yang paling nyata adalah hancurnya pengaruh komunis di Indonesia seiring dengan dibubarkannya PKI serta dilarangnya partai tersebut untuk berkembang di Indonesia. Hancurnya ideologi komunis tersebut diiringi dengan terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang PKI yang tidak

hanya terjadi di pulau jawa, namun juga merembet hingga ke luar pulau jawa. Seiring dengan hancurnya ideologi komunis, ideologi Pancasila justru semakin kokoh.

F. Metode Belajar

- Ceramah.
- Diskusi
- Tanya Jawab
- Presentasi

G. Pengalaman Belajar

- Siswa mampu menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965.
- Siswa mampu menguraikan tentang keterlibatan TNI-AD, PKI, CIA dan Soeharto pada Peristiwa 1 Oktober 1965.
- Siswa mampu menguraikan dampak terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965.

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Pendahuluan (Pengalaman siswa)

Guru membuka pelajaran dengan salam, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang seputar peristiwa 1 Oktober 1965. Namun sebelum menjelaskan tentang Peristiwa 1 Oktober 1965, guru terlebih dahulu mengajak siswa untuk mencermati peristiwa lokal yang kontekstual yang terjadi di daerah yang mirip dengan Peristiwa 1 Oktober 1965 sehingga siswa dapat dengan cepat memahami ketika nanti guru menjelaskan tentang materi yang sesungguhnya yaitu tentang Peristiwa 1 Oktober 1965.

2. Kegiatan inti

a. Orientasi

Setelah siswa memahami contoh yang kontekstual tersebut, kemudian siswa membentuk kelompok dengan jumlah 4 orang perkelompok dan kemudian ke perpustakaan untuk mencari sumber yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan yaitu tentang Peristiwa 1 Oktober 1965.

b. Latihan

Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru.

c. Umpan balik

- Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, dilanjutkan dengan tanya jawab dan siswa saling menanggapi.
- Guru memberikan penguatan atas jawaban siswa.

d. Tindak Lanjut

- Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok di kertas folio yang telah disediakan oleh guru.
- Guru mengadakan tes tertulis secara singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa atas materi yang telah disampaikan.

e. Penutup

- Guru menginformasikan kegiatan belajar pada pertemuan berikutnya
- Refleksi: meminta pendapat siswa tentang cara belajar hari tersebut.

I. Media dan Sumber Belajar

a. Media

Perpustakaan, handout, foto kopi, buku paket, gambar, peta, floppy disc.

b. Sumber Belajar

- Surya Lesmana.2005.*Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*. Yogyakarta.Media Pressindo.
- Suwarno,P.J.2004.*Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Sampai Supersemar)*.Yogyakarta.Sanata Dharma.
- Baskara T.Wardaya.2006.*Bung Karno Menggugat dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 1965 Hingga G30S*. Yogyakarta. Galang Press
- Asvi Warman Adam.2004.*Pelurusan Sejarah Indonesia*.Yogyakarta.Trice
- Crouch,Harold.1986.*Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta. Sinar Harapan
- Lambert.J.Giebels.2005.*Pembantaian Yang Ditutup-Tutupi Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*.Jakarta.Gramedia.
- Proyek Historiografi Centre For Information Analysis.2005.*Gerakan 30 September Antara Fakta Dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*.Yogyakarta.Media Pressindo
- Todiruan Dydo.1989.*Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G30S/PKI*.Jakarta.Golden Terayon Press
- Boerhan Soebekti.1966.*Fakta dan Latar Belakang G30S/PKI*.Semarang.Semarang Sala.

J. Penilaian

1. Penilaian Proses

Berupa ketekunan, tingkah laku, keseriusan, kerajinan yang dimiliki siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

2. Penilaian Hasil

Dilakukan dengan mengadakan tes tertulis tentang materi yang dibahas (evaluasi)

Contoh:

- 1.Coba anda jelaskan latar belakang terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965 dalam bidang politik dan ideologi!
- 2.Jelaskan dampak terjadinya Peristiwa 1 Oktober 1965!

Yogyakarta, ...Desember 2006

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi

Hideaky Takizawa

Mikael Lipo

